

LAPORAN KINERJA (Lkj) TRIWULAN III TAHUN 2024



BPSPL MAKASSAR

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSE, BSSN

BerAKHLAK bangga
BERSAMA SAMA MELAKUKAN
KEBENEHARAN



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2024 pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja berisi gambaran menyeluruh organisasi sekaligus berupa informasi mengenai target dan capaian hasil kinerja BPSPL Makassar, dalam hal ini capaian pada triwulan III Tahun 2024. Selain itu, laporan kinerja juga meliputi capaian tujuan strategis, pengukuran kinerja, evaluasi program, serta tinjauan dari berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi.

diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan dan tuntutan publik yang menghendaki agar akuntabilitas senantiasa dikedepankan oleh setiap instansi pemerintah serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan untuk pemangku kepentingan yang lebih tinggi.

Disadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaannya. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan BPSPL Makassar diucapkan terima kasih

Maros, 14 Oktober 2024

**Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya
Pesisir dan Laut Makassar**

Permana Yudianto, S.T., M.T.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan kinerja (LKj) triwulan III tahun 2024 BPSPL Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan triwulan I tahun 2024. Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada triwulan III tahun 2024 ini mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Kinerja BPSPL Makassar Triwulan III Tahun 2024 terdiri atas satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan lima Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis/ NPSS atau Nilai Capaian Kinerja BPSPL Triwulan III Tahun 2024 adalah **117.50** dengan predikat kinerja **"Istimewa"**.

Nilai capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

(IKU 6) Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar dengan capaian 120% dari target dua kelompok dengan realisasi tiga kelompok.

(IKM 17) Laporan SPIP yang disusun di BPSPL Makassar telah mencapai target dengan capaian 100% dengan total capaian tiga laporan sampai dengan triwulan III atau target dan realisasi satu (1) laporannya untuk setiap triwulan.

(IKM 18) Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar telah mencapai target dengan % capaian 141.81% dengan realisasi nilai 133.3 dari target 94.

(IKM 19) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan telah mencapai target dengan % capaian 100 dari target 80.

Total pagu anggaran tahun 2024 BPSPL Makassar pagu anggaran tahun ini adalah sebesar **Rp 20.035.392.000,-** yang berasal dari Rupiah Murni, PNBPN, dan PHLN dimana realisasi anggaran BPSPL Makassar adalah sebesar **Rp. 13.970.117.399,-** atau dengan prosentase sebesar **69.73%** dari pagu total.


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Tugas dan Fungsi	1
1.4 Organisasi	2
1.6 Sistematika Penyajian.....	6
II. PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
2.3 Keselarasan PK Eselon 1 dan UPT	20
2.4 Postur Anggaran 2024	20
III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian kinerja.....	24
3.1.1 IKU1 Nilai PNBSP BPSPL Makassar (Rp.000).....	24
3.1.2 IKU2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Orang)	27
3.1.3 IKU3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	28
3.1.4 IKU4 Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	35
3.1.5 IKU5 Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan).....	37
3.1.6 IKU6 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok).....	39
3.1.7 IKU7 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	42
3.1.8 IKU8 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis).....	44
3.1.9 IKU 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	62
3.1.10 IKU10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	76
3.1.11 IKU11 Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kawasan)	79
3.1.12 IKM12 Nilai Indikator Pelaksana Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	81
3.1.13 IKM13 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	84
3.1.14 IKM14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai).....	85
3.1.15 IKM15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	87

3.1.16IKM16	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	90
3.1.17IKM17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	93
3.1.18IKM18	Presentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	95
3.1.19IKM19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	97
3.1.20 IKM20	Presentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)	98
3.1.21 IKM21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	100
3.1.22 IKM22	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Bpspl Makassar (Nilai)	102
3.2	Perbandingan Capaian Dengan Unit Kerja Lain (UPT PSPL Lingkup DJPRL)..	105
3.3	Akuntabilitas Keuangan	109
IV. PENUTUP		111
4.1	Kesimpulan	111
4.2	Rekomendasi	111
4.3	Tindak Lanjut	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi pegawai BPSPL Makassar.....	5
Tabel 2. Perbandingan Sasaran Kegiatan Tahun 2023 dan 2024.....	15
Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dan 2024	16
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2024.....	18
Tabel 5. Postur Anggaran BPSPL Makassar Tahun 2024.....	21
Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja BPSPL Makassar TW III Tahun 2024	22
Tabel 7. Capaian Realisasi IKU 1	25
Tabel 8. Capaian Realisasi IKU 2	27
Tabel 9. Capaian Realisasi IKU 3	29
Tabel 10. Hasil Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW III di BPSPL Makassar ..	33
Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU 1	35
Tabel 12. Capaian IKU Realisasi IKU 4	36
Tabel 13. Realisasi anggaran IKU4	37
Tabel 14. Capaian Realisasi IKU 5	38
Tabel 15. Realisasi anggaran IKU 5.....	39
Tabel 16. Capaian Realisasi IKU 6	40
Tabel 17. Realisasi anggaran IKU 6.....	41
Tabel 18. Capaian Realisasi IKU 7	42
Tabel 19. Realisasi anggaran IKU 7.....	43
Tabel 20. Capaian Realisasi IKU 8	44
Tabel 21. Rekapitulasi Respon Cepat di Wilayah Kerja BPSPL Makassar s.d. TW III .	57
Tabel 22. Realisasi Capaian IKU 8	61
Tabel 23. Capaian Realisasi IKU 9	62
Tabel 24. Realisasi Anggaran IKU 5	75
Tabel 25. Capaian Realisasi IKU 10	76
Tabel 26. Hasil Identifikasi ALSE	78
Tabel 27. Realisasi Anggaran IKU 7	79
Tabel 28. Capaian Realisasi IKU 7	79
Tabel 29. Realisasi Anggaran IKU 7	81
Tabel 30. Capaian Realisasi IKU 12	83
Tabel 31. Capaian Realisasi IKM 13.....	84
Tabel 32. Capaian Realisasi IKM 14.....	86
Tabel 33. Realisasi Anggaran IKM 11.....	87
Tabel 34. Capaian Realisasi IKM 15	89
Tabel 35. Capaian Realisasi IKM 16	92
Tabel 36. Realisasi Anggaran IKM 16.....	93
Tabel 37. Capaian Realisasi IKM 17	94
Tabel 38. Capaian Realisasi IKM 15.....	96
Tabel 39. Capaian Realisasi IKM 19	97
Tabel 40. Capaian Realisasi IKM 20	99
Tabel 41. Capaian Realisasi IKM 21	101
Tabel 42. Capaian Realisasi IKM 22	103



Tabel 43. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di Lingkup DJPRL.....	105
Tabel 44. Pagu dan realiasi anggaran per program BPSPL Makassar Tahun 2024 ...	109
Tabel 45. Revisi Anggaran BPSPL Makassar tahun 2023	109
Tabel 46. Tindak lanjut atas rekomendasi TW II Tahun 2024	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan struktur Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar.....	2
Gambar 2. Grafik Pegawai Negeri Sipil di BPSPL Makassar berdasarkan tiap keorganisasian.....	3
Gambar 3. Grafik Pegawai Negeri Sipil di BPSPL Makassar berdasarkan tiap jabatan	4
Gambar 4. Grafik Pegawai BPSPL Makassar berdasarkan penempatan wilayah kerja	4
Gambar 5. Visi, Misi, dan Arahan Presiden serta Agenda Perubahan	8
Gambar 6. Misi KKP dan DJPRL	10
Gambar 7. Tujuan KKP dan DJPRL	10
Gambar 8. Misi BPSP Makassar	13
Gambar 9. Tujuan BPSP Makassar	13
Gambar 10. Capaian Kinerja BPSPL Makassar pada aplikasi Kinerjaku	22
Gambar 11. PNBP Pemanfaatan Jenis Ikan BPPSL Makassar TW III Tahun 2024	26
Gambar 12. Grafik nilai pre test dan post test.....	30
Gambar 13. Dokumentasi Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	31
Gambar 14. Grafis Verifikasi Teknis Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Makassar s.d. TW II	32
Gambar 15. Rekapitulasi Penerbitan dokumen angkut / perizinan di BPSPL Makassar	63
Gambar 16. Pelaku usaha di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	64
Gambar 17. Pemilik SIPJI di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	65
Gambar 18. Rekapitulasi Penerbitan SAJI di BPSPL Makassar.....	66
Gambar 19. Rekapitulasi Penerbitan SAJI di BPSPL Makassar.....	67



photo by: M. Rizal B. (BPSPL Makassar)

BAB I

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan *Good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Pelaporan Kinerja merupakan upaya dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis; Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja, Pengelolaan data kinerja, **Pelaporan Kinerja**, dan Reviu dan evaluasi kinerja

Laporan Kinerja (LKj) ini akan memuat hasil pengukuran sasaran strategis dan program / kegiatan melalui Indikator Kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan akan tersaji informasi kinerja BPSPL Makassar yang terukur sesuai dengan parameter yang sudah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja TW III ini adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan BPSPL Makassar sampai dengan Triwulan III Tahun 2024

1.3 Tugas dan Fungsi

A. Tugas

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar (BPSPL Makassar) mempunyai tugas **melaksanakan pengelolaan, meliputi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER. 65/MEN/2020 Tanggal 28 Desember 2020 perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL). Berkedudukan di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan wilayah kerja meliputi 6 (enam) Provinsi di Pulau Sulawesi, yaitu: Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan PER. 65/MEN/2020 tersebut

ada perubahan pada struktur organisasi yang hanya ada 2 pejabat struktural yaitu Kepala Balai dan Subbagian Umum, dan sisanya adalah Kelompok Jabatan Fungsional. Di bawah ini adalah Struktur organisasi BPSPL Makassar Tahun 2024.



Gambar 1. Bagan struktur Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, BPSPL Makassar mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- 2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya.
- 3) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya.
- 4) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis dan genetika ikan.
- 5) Pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi.
- 6) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 7) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut.
- 8) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil.
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

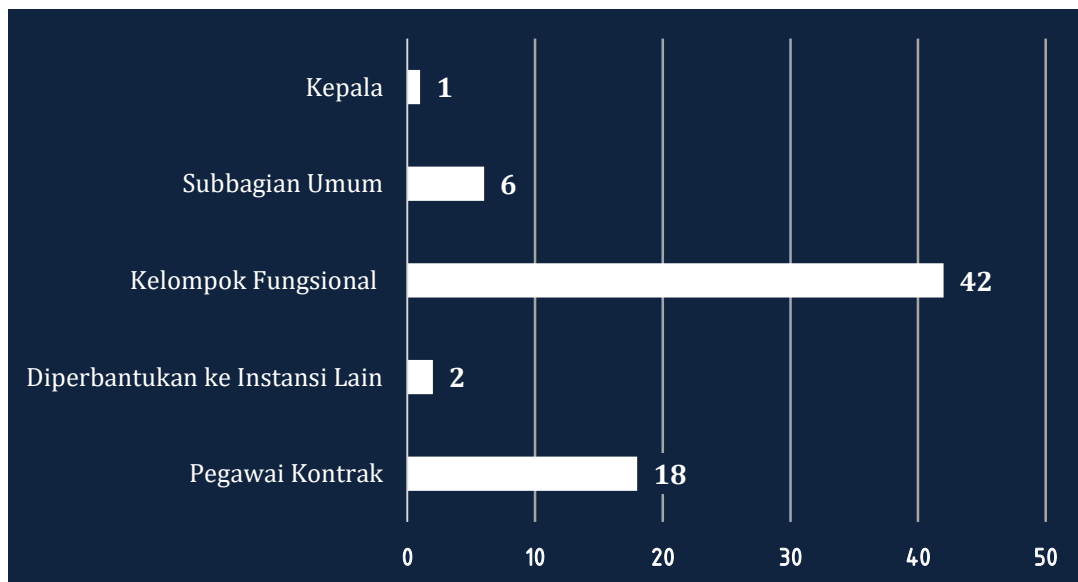
1.4 Organisasi

Secara keorganisasian BPSPL Makassar dipimpin oleh Kepala Balai dengan pangkat Eselon III A yang bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dan membawahi sub bagian umum dan kelompok jabatan fungsional dengan rincian tugas sebagai berikut berikut:

A. **Sub Bagian umum**, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan pelaporan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang ada di Sub Koordinator kelompok Tata Usaha adalah Pranata keuangan APBN dan Penata Laksana Barang yang terdiri dari Pranata keuangan APBN Mahir sebanyak 2 (dua) Orang dan Penata Laksana Barang Terampil sebanyak 1 (Satu) orang. Subbagian Umum juga mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program evaluasi, dan laporan. Namun pada saat ini tugas penyusunan rencana program dan monitoring serta evaluasi didelegasikan kepada perencana yang ada di BPSPL Makassar dan tergabung di kelompok kerja tersendiri

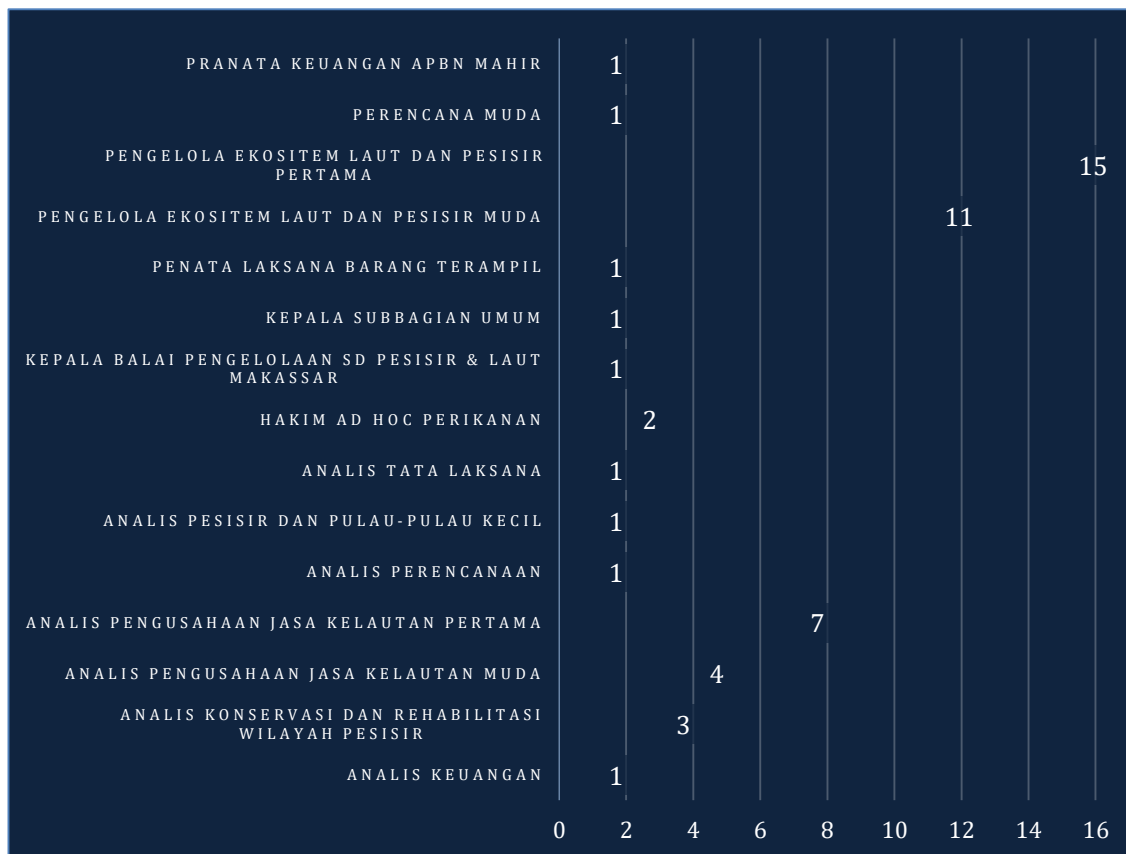
B. **Kelompok Jabatan Fungsional**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta analisis ekosistem dan valuasi ekonominya juga kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di BPSPL Makassar adalah jabatan fungsional **Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP)** dengan jumlah **26 (Dua Puluh Enam)** orang yang terdiri dari **15 fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) Ahli Pertama, 11 fungsional Pengelola Ekosistem Pesisir (PELP) Ahli Muda, tujuh Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) Ahli Pertama, empat Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK) Ahli Muda serta lima fungsional umum.**

Berikut ini adalah grafik jumlah Staf BPSPL Makassar berdasarkan tiap keorganisasian:



Gambar 2. Grafik Pegawai Negeri Sipil di BPSPL Makassar berdasarkan tiap keorganisasian

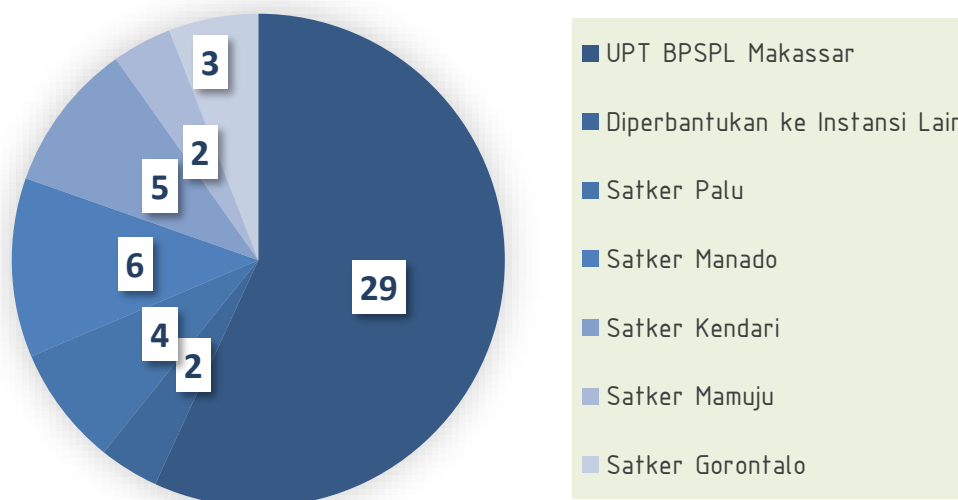
Sedangkan Berikut ini adalah grafik jumlah Staf BPSPL Makassar berdasarkan tiap jabatan:



Gambar 3. Grafik Pegawai Negeri Sipil di BPSPL Makassar berdasarkan tiap jabatan

Selain Pejabat Struktural yang berkantor di Maros, ada juga staf yang ditugaskan di satuan kerja BPSPL Makassar yang mencakup wilayah seluruh Sulawesi. Pada Tahun 2023 ini ada 5 (lima) daerah yang ditempatkan penanggung jawab Satuan Kerja beserta staf yaitu di Palu, Manado, Kendari, dan Mamuju, serta Gorontalo. Selain staf yang bertempat di Kantor UPT dan wilayah kerja BPSPL Makassar, terdapat juga dua staf yang diperbantukan ke instansi lain yaitu ke Mahkamah Agung sebagai Hakim Ad hoc.

Berikut ini grafik jumlah staf ASN BPSPL Makassar berdasarkan lokasi penempatan:



Gambar 4. Grafik Pegawai BPSPL Makassar berdasarkan penempatan wilayah kerja

Tabel 1. Komposisi pegawai BPSPL Makassar

Pendidikan	Golongan (PNS)						P3K	Jumlah Total
	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b		
D3	1	1						2
D4				3				3
S1	8	14	1	4			3	30
S2		1	1	5	7	2		16
Jumlah Total	9	16	2	12	7	2	3	51

Pada Tahun 2024 ini jumlah pegawai BPSPL Makassar total yang berstatus **Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 47 (Empat Puluh Tujuh)** orang dan **3 (tiga) orang P3K**. Selain PNS ada juga tenaga kontrak yang bekerja di BPSPL Makassar, jumlah tenaga kontrak sampai dengan Tahun 2024 adalah sebanyak **18 (delapan belas)** orang dimana 14 (empat belas) orang ditempatkan di Kantor BPSPL Makassar dan 5 (lima) orang ditempatkan di masing-masing kantor Wilayah Kerja BPSPL Makassar. Adapun distribusi pegawai BPSPL Makassar yang lengkap ditunjukkan pada Gambar 3. Sedangkan komposisi pegawai BPSPL Makassar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

1.5 Isu Strategis, Potensi, dan Permasalahan

Pulau Sulawesi merupakan wilayah kerja BPSPL Makassar dengan panjang pantai Pulau Sulawesi kurang lebih 4.270.305 KM, dengan panjang pantai seperti itu dipastikan banyak sekali sumberdaya pesisir yang ada di Pulau Sulawesi seperti pemanfaatan jenis ikan dan pemanfaatan ruang laut yang dapat memberikan sumbangsih pemasukan terhadap negara berupa PNBP.

Terdapat juga isu yang menjadi isu strategis di wilayah kerja BPSPL Makassar diantaranya adalah perlindungan, pelestarian, pemanfaatan jenis ikan terancam punah dan optimalisasi PNBP di Wilayah Kerja BPSPL Makassar.

Selain potensi dan namun selain sumberdaya tentunya banyak permasalahan di daerah pesisir Sulawesi, beberapa permasalahan utama yang ada di Sulawesi antara lain:

1. Belum semua tugas pokok dan fungsi bisa dijalankan oleh BPSPL Makassar. Tugas pokok fungsi yang belum bisa dijalankan diantaranya Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil. Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya anggaran yang diturunkan ke BPSPL Makassar terkait pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut.
2. Belum dibedakan kedalaman data untuk permohonan KKPRL antara pemohon yang akan memanfaatkan ruang laut untuk skala dan resiko kecil dengan skala dan resiko besar.
3. Belum terdapat basis data (subjek hukum, koordinat, dan luasan) KKPRL yang telah terbit yang bisa diakses oleh UPT. Hal ini menghambat pelaksanaan monitoring pemanfaatan ruang laut serta berpotensi memunculkan resiko tumpang tindih koordinat yang sudah terbit KKPRL dan pemohon yang akan

mengajukan pemanfaatan ruang laut.

4. Masih minimnya petugas dan pemohon KKPRL yang memiliki kompetensi tentang mekanisme perizinan pada OSS.
5. Belum adanya staf BPSPL Makassar di semua area yang terdapat pemanfaatan atau pengiriman jenis ikan sehingga verifikasi harus dilakukan secara daring atau meminta bantuan dengan karantina untuk verifikasi langsung. Hal ini rawan menyebabkan penyalahgunaan dokumen.
6. Masih banyak adanya pemanfaatan atau lalu lintas biota dilindungi ataupun *look alike* yang dilakukan lewat jalur darat dan tidak bisa dimonitor oleh BPSPL Makassar. Hal ini mengakibatkan turunnya realisasi PNBP.
7. Ancaman abrasi akibat kerusakan ekosistem mangrove, alih fungsi lahan pesisir terutama mangrove menjadi tambak, pelabuhan/terminal khusus, pemukiman, industri, dan perkebunan yang mengarah pada tekanan dan penurunan luasan vegetasi mangrove.
8. Permasalahan yang dihadapi dalam pemberian bantuan pemerintah bagi kelompok masyarakat penggiat Konservasi diantaranya; kurang memadainya nominal nilai bantuan untuk memenuhi kebutuhan barang yang diperlukan oleh kelompok. Berdasarkan permasalahan yang ada maka diperlukan peningkatan nilai bantuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam mendukung kegiatan Konservasi. Evaluasi dan pengembangan bantuan bagi kelompok masyarakat yang telah menerima bantuan KOMPAK juga harus menjadi perhatian BPSPL Makassar dalam pemberian bantuan selanjutnya. Kelompok masyarakat penerima bantuan KOMPAK dengan nilai evaluasi baik selama 2 tahun dapat dipertimbangkan memperoleh bantuan yang dinilai diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan konservasi kawasan dan/atau jenis.
9. Banyak potensi pariwisata di Sulawesi belum terkelola dengan baik dan Akses di beberapa tempat wisata yang berada di pulau cukup jauh dari pusat kota, dan daerah tidak ada akses melalui udara sehingga perlu menempuh perjalanan darat dan laut yang cukup jauh.
10. Kurangnya tenaga kerja administrasi / bagian umum. Pada saat ini di BPSPL Makassar masih mengalami kekurangan tenaga administrasi dan kekurangan ini diakomodasi dengan memberikan tugas bantuan kepada jabatan fungsional untuk pemenuhan pada bagian keuangan, kepegawaian, persuratan, tata laksana, dan program serta evaluasi.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini **bertujuan menginformasikan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024**. Capaian Kinerja (*Performance Results*) 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) BPSPL Makassar Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

A. Bab 1 Pendahuluan,

Pada bab ini berisi hal-hal umum tentang Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar seperti visi, misi, tujuan organisasi, tugas dan fungsi serta struktur organisasi.



B. Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Pada bab ini uraian singkat tentang rencana kinerja 2024 dan penetapan kinerja Tahun 2024 BPSPL Makassar.

C. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja,

Pada bab ini berisi hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.

D. Bab 4 Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan saran untuk perencanaan Tahun berikutnya.

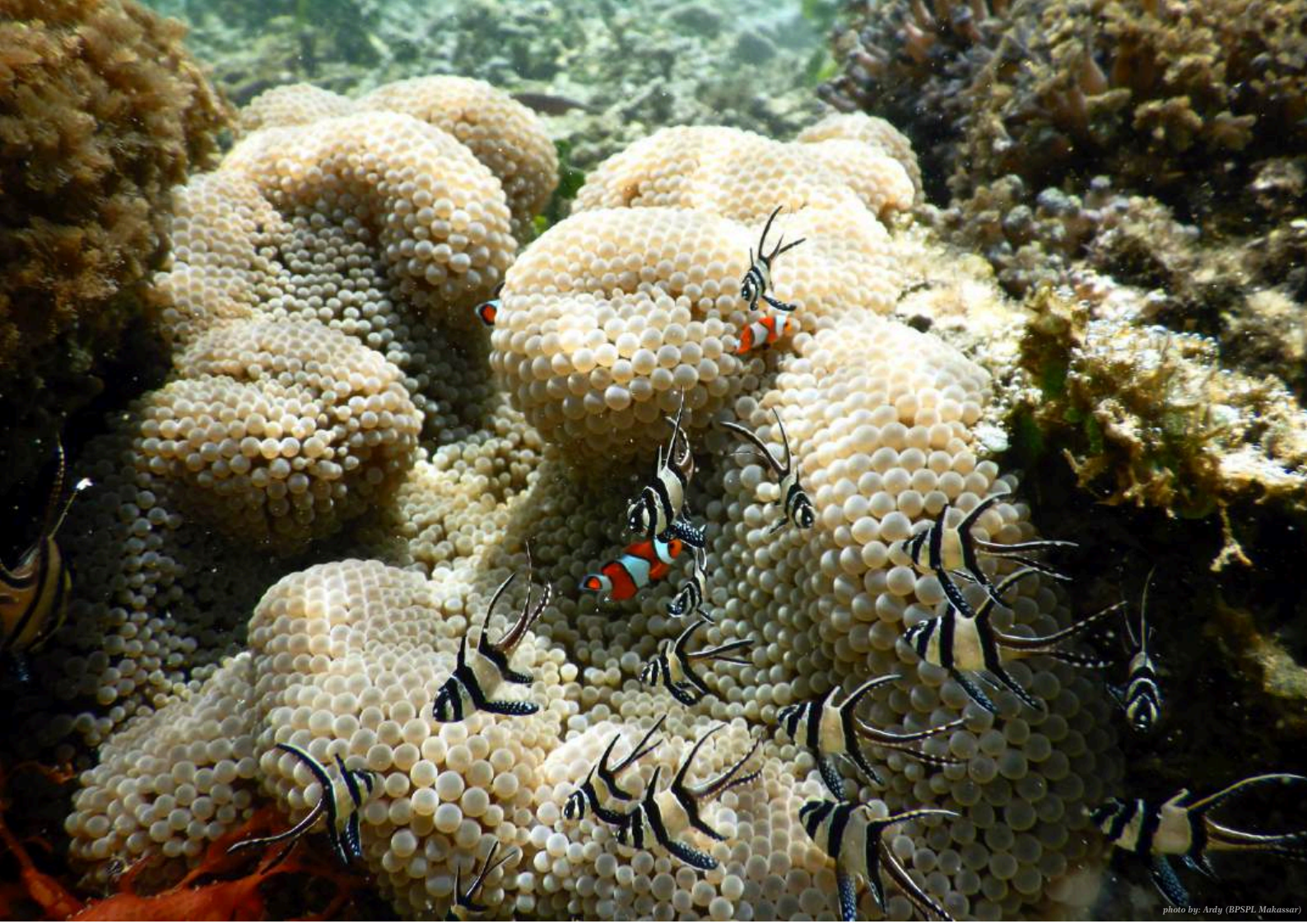


photo by: Ardy (BPSPL Makassar)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP, termasuk Ditjen PRL. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahannya Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada Gambar berikut:



Gambar 5. Visi, Misi, dan Arahannya Presiden serta Agenda Perubahan

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang

Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/ PERMEN-KP/2020 pda tanggal 2 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Visi KKP Tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi DJPRL 2020 – 2024 adalah **“Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”**. Visi BPSPL Makassar tidak terlepas dari Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang merujuk pada Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Visi Presiden Tahun 2020 – 2024. Dengan demikian Visi BPSPL Makassar adalah **“Terdepan dalam mewujudkan pengelolaan ruang laut Wilayah Sulawesi menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL”**.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi

Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:



Gambar 6. Misi KKP dan DJPRL

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan KKP dan DJPRL adalah:



Gambar 7. Tujuan KKP dan DJPRL

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP Tahun 2020-2024, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PRL terdiri dari:

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat,
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan

SS-6 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab

SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing

SS-9 Tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Ditjen PRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Sasaran Ditjen RPL Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

- **Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan**

- a. Sasaran: "Kesejahteraan petambak garam meningkat", dengan Indikator Kinerja:
 - Nilai Tukar Petambak Garam, dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024.
- b. Sasaran: "Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat", dengan Indikator Kinerja:
 - Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi, sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
 - Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan, 15(lima belas) kawasan pada tahun 2020 dan 22 (dua puluh dua) kawasan per tahunnya sampai dengan tahun 2024.
- c. Sasaran: " Meningkatkan lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan", dengan Indikator Kinerja:
 - Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024.
- d. Sasaran: "Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat", dengan Indikator Kinerja:
 - Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024.
- e. Sasaran: "Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT", dengan Indikator Kinerja:
 - Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
- f. Sasaran Program:"Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya", dengan Indikator Kinerja:
 - Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5(lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024.
- g. Sasaran: "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat", dengan Indikator Kinerja:
 - Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab Ditjen PRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

- **Program Kualitas Lingkungan Hidup**

- a. Sasaran: “Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja:
 - Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024.
 - Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024.
- b. Sasaran: “Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan”, dengan Indikator Kinerja:
 - Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024.
- c. Sasaran: “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali”, dengan Indikator Kinerja:
 - Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024.
- d. Sasaran: “Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”, dengan Indikator Kinerja:
 - Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai SKPT, dari level 4 pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

- **Program Dukungan Manajemen**

- a. Sasaran: “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL”, dengan Indikator Kinerja:
 - Nilai PMPRB DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
 - Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.
 - Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen PRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.
 - Nilai PM SAKIP DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
 - Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
 - Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
 - Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
 - Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
 - Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.

- Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020 menjadi 89 (Baik) pada tahun 2024.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan Visi BPSPL Makassar, maka, ditetapkan Misi BPSPL Makassar sebagai berikut :



Gambar 8. Misi BPSPL Makassar

Dalam mewujudkan visi dan misi BPSPL Makassar, BPSPL Makassar merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020 – 2024 sebagai berikut:



Gambar 9. Tujuan BPSPL Makassar

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Makassar Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar;

2. Tujuan meningkatkan penataan dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan:
 - 1) terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 2) terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Program Kualitas Lingkungan Hidup

3. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan:
 - 1) meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 2) meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 3) meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Makassar;
 - 4) meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar;
4. tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan “meningkatkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Makassar”;

Program Dukungan Manajemen

5. tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Makassar dengan sasaran kegiatan tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Makassar.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja BPSPL Makassar pada Tahun 2024 menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala BPSPL Makassar dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Terdapat perubahan perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023. Perubahan tersebut berupa penambahan indikator kinerja utama dan indikator kinerja manajemen. Pada tahun 2024 terdapat total 22 Indikator Kinerja, jumlah ini lebih banyak apabila dibandingkan dengan indikator kinerja pada tahun 2023 yang berjumlah 16. Berikut adalah detail perbandingan sasaran kegiatan dan indikator kinerja tahun 2023 dan 2024:

Tabel 2. Perbandingan Sasaran Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

SASARAN KEGIATAN 2023		SASARAN KEGIATAN 2024	
1	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
2	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
3	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	6	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
4	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
5	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	7	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
6	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar	1	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar
7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	11	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Makassar
		2	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar
		5	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
		9	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar
		10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran

Berikut adalah perbedaan antara Indikator Kinerja Kegiatan pada tahun 2023 dan tahun 2024:

Tabel 3. Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2023		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2024	
1	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
2	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	4	Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)
3	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	6	Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)
4	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	8	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)
5	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)
6	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.)	1	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.)
7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)
8	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	13	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)
9	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)
10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)
11	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	16	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2023		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2024	
12	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)
13	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	18	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)
14	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)
15	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)	20	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)
16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)
		2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)
		5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)
		7	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)
		10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)
		11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar
		22	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar(nilai)

Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2024 terdiri **22 Indikator Kinerja** yang terdiri dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Apabila dibandingkan dengan Indikator Kinerja Tahun 2023 terdapat enam (6) Indikator Kinerja tambahan pada Tahun 2024. Penambahan indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di atas. Berikut ini adalah perjanjian kinerja BPSPL Makassar Tahun 2024:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar	1.	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)	500.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	320
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	2
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	3
		7.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	10.	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar	4
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	86
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Makassar (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		18. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Makassar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Makassar (%)	80
		22. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar(nilai)	65

2.3 Keselarasan PK Eselon 1 dan UPT

Perjanjian Kinerja di level UPT pasti selaras dengan perjanjian kinerja di eselon 1, karena perjanjian kinerja di level UPT merupakan turunan dari perjanjian kinerja eselon 1. Perjanjian kinerja di level UPT mendukung pencapaian kinerja di eselon 1 baik di Indikator Kinerja Utama maupun di Indikator Kinerja Manajemen.

Pada Tahun 2024 Perjanjian Kinerja Eselon 1 terdiri dari Tiga Program, 10 Sasaran Program, dan 29 Indikator Kinerja. Sementara Perjanjian Kinerja di BPSPL Makassar Tahun 2023 terdiri dari Tiga Program, Delapan Sasaran Kegiatan, dan 18 Indikator Kinerja. Ada beberapa indikator kinerja UPT yang capaiannya secara langsung mendukung capaian indikator kinerja eselon 1 atau dapat dikatakan merupakan bagian dari indikator kinerja eselon 1 seperti nilai PNPB, Jenis keanekaragaman hayati yang dilindungi dan dilestarikan, dan IP ASN serta unit kerja berpredikat menuju WBK.

2.4 Postur Anggaran 2024

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU BPSPL Makassar tahun 2024, BPSPL Makassar didukung dengan alokasi anggaran total sebesar **Rp. 20.035.392.000,-** (Dua puluh Milyar tiga puluh lima juta tida ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sumber dana sebesar **Rp. 15.599.172.000,-** (Lima Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dari **Rupiah Murni** dan **Rp. 1.910.000.000,-** (Satu Milyar Sembilan Ratus

Sepuluh Juta RUpiah) dari **PNBP** dan **Rp.2.526.220.000,-** (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dari **PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri)**.

Tabel 5. Postur Anggaran BPSPL Makassar Tahun 2024

KODE/ NAMA KEGIATAN	RUPIAH MURNI (000)	PNBP (000)	PHLN (000)	TOTAL (000)
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.105.000	1.360.000	2.526.220	5.991.220
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	800.000	0	0	800.000
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	0	150.000	0	150.000
Perencanaan Ruang Laut	700.000	400.000	0	1.100.000
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	11.994.172	0	0	11.994.172
Jumlah	15.599.172	1.910.000	2.526.220	20.035.392



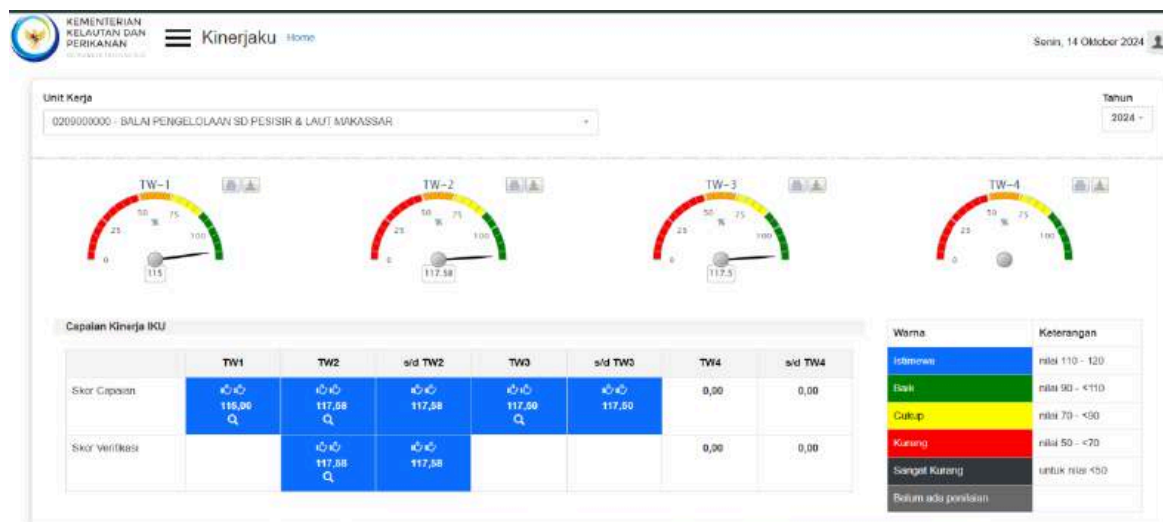
BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Triwulan III tahun 2024 terdapat satu (1) Indikator Kinerja Utama dan tiga (3) Indikator Kinerja Manajemen (IKM) yang terdapat capaian targetnya. Nilai Capaian Kinerja BPSPL Makassar Triwulan III Tahun 2024 adalah **117.50** dengan predikat “Istimewa”.



Gambar 10. Capaian Kinerja BPSPL Makassar pada aplikasi Kinerjaku

Untuk detail dan keseluruhan capaian sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja BPSPL Makassar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Target dan Capaian Kinerja BPSPL Makassar TW III Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target 2024	Target TW III	Realisasi TW III	%	Capaian TW III Terhadap 2024
1 Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)	500.000				
2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	320				
3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3				
4 Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	2				

5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)	1				
6	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	3	2	3	120	120
7	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1				
8	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6				
9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5				
10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1				
11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar	4				
12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	93.76				
13	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	86				
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)	75				

15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	88				
16	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	81				
17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4	3	3	100	75
18	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	94	133.3	141.81	141.81
19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	80	80	100	125	125
20	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)	100				
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)	80				
22	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar (nilai)	65				

3.1 Capaian kinerja

3.1.1 IKU1 Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Makassar adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, meliputi Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, pengelolaan BMN, denda dan lain-lain. Teknik menghitung capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

$$PNBP_{BPSPL\ MAKASSAR} = PNBP_{layanan} + PNBP_{BMN} + PNBP_{lainnya}$$

Dimana:

Saji DN = Pungutan dokumen Saji DN 1) + pungutan perdagangan + pungutan pengambilan 2)

Surat Rekomendasi = pungutan dokumen rekomendasi + pungutan perdagangan

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen

angkut

keterangan:

1) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 25%

2) dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang dimiliki

Formulasi penghitungan pungutan :

Pungutan pengambilan = jumlah individu x Tarif PNBP x harga patokan jenis ikan

Pungutan perdagangan = volume x Tarif PNBP x harga patokan jenis ikan

Denda = Tarif PNBP x jumlah produk yang tidak sesuai dengan permohonan

PNBPLayanan :Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya dan Jasa Kelautan dan Perikanan.

PNBPBMN :Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

PNBPLainnya :Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 7. Capaian Realisasi IKU 1

SS -1	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar							
IKU - 1	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					500.000			

IKU ini belum terdapat capaian pada Triwulan III karena target IKI ini adalah tahunan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU 1 ini merupakan IKU yang realisasi targetnya adalah tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

IKU 1 ini merupakan IKU yang realisasi targetnya adalah tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan dengan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

PNBP Makassar didapat dari pemanfaatan jenis biota yang dilalulintaskan dan BPSPL Makassar memberikan pelayanan prima untuk pelayanan perizinan baik verifikasi lapangan untuk pengajuan dokumen SIPJI, penerbitan dokumen SAJI dan Rekomendasi untuk optimalisasi pemenuhan target PNBP yang sudah ditetapkan. Selain PNBP layanan, terdapat juga PNBP dari dukungan manajemen.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

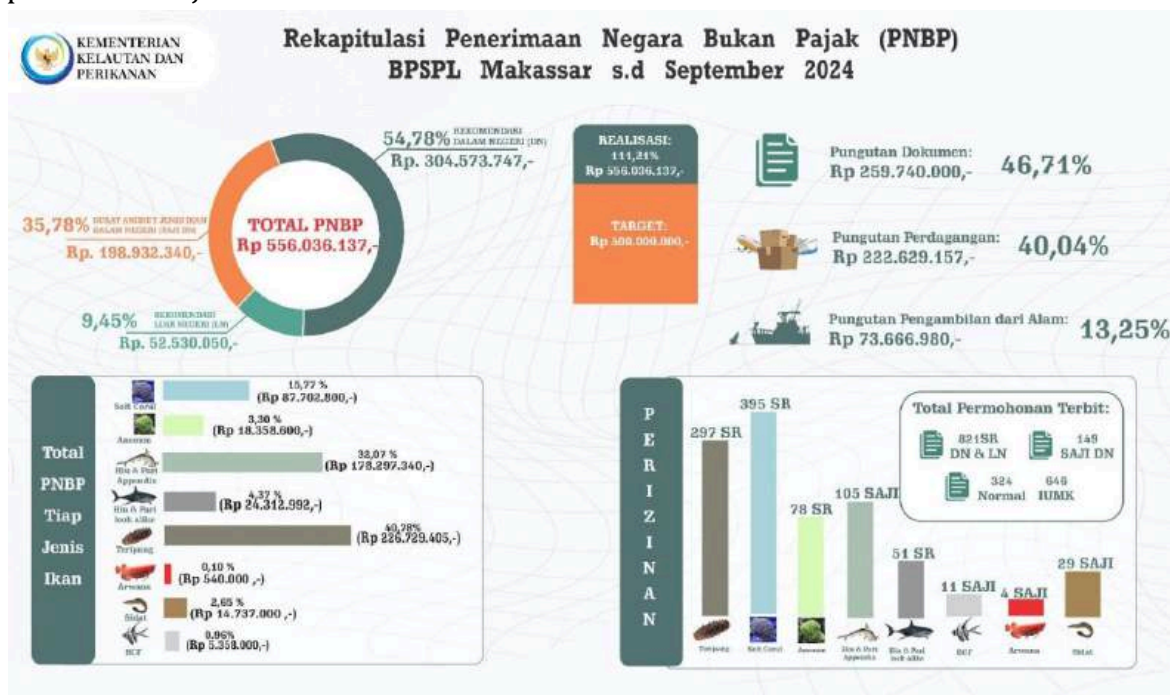
Untuk mencapai target IKU1 tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus dan dapat dikatakan bahwa anggaran untuk pencapaian IKU 1 ini **adalah 0 Rupiah**.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada triwulan III 2024, PNBP BPSPL Makassar sudah mencapai **Rp 599.732.738,-** atau **119.95% dari target yang ditetapkan Rp.500.000.000,-**. PNBP terdiri dari PNBP sektor teknis dari pemanfaatan jenis ikan dan PNBP dari sektor dukungan manajemen seperti sewa rumah negara, penjualan peralatan dan mesin serta penerimaan kembali belanja tahun anggaran sebelumnya. Berikut adalah rekapitulasi PNBP BPSPL Makassar sampai dengan TW III 2024:

Kode Akun / Jenis Pendapatan	Realisasi
425131 Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	4.331.679
425259 Pendapatan Perizinan Lainnya	259.740.000
425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	300.000
425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	14.656.181
425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	3.209.541
425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	296.296.137
425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	21.199.200

Berdasarkan infografis di atas komposisi terbesar PNBP berasal dari sektor teknis yaitu **pemanfaatan jenis ikan** dari pendapat perizinan lainnya (pungutan dokumen) dan dari pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya (pungutan perdagangan dan pengambilan dari alam). Berikut adalah detail PNBP dari pemanfaatan jenis ikan:



Gambar 11. PNBP Pemanfaatan Jenis Ikan BPPSL Makassar TW III Tahun 2024

Berdasarkan infografis di atas didapat bahwa pungutan yang paling besar berasal dari pungutan dokumen dengan proporsi sebesar **46.71%**. Sedangkan jenis ikan yang paling besar berasal dari jenis teripang dengan proporsi sebesar **40.78%**.

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mencapai indikator kinerja (PNBP BPSPL Makassar) ini sehingga dapat dikatakan **0 Rupiah**.

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU pada Triwulan IV yaitu berupa penarikan PNPB untuk pemanfaatan jenis.

3.1.2 IKU2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non-fisik yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar. Kegiatan Bulan Cinta Laut tahun 2024 dilaksanakan di empat lokasi yaitu Kota Makassar, Kota Kendari, Gorontalo, dan Kota Manado. Jumlah tenaga yang terlibat yang dijadikan capaian pada IKU ini adalah hasil akumulasi tenaga kerja yang terlibat dari keempat lokasi tersebut.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 8. Capaian Realisasi IKU 2

SS -2	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat Dalam Kegiatan Nasional Gerakan Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar							
IKU - 2	Tenaga Kerja yang Terlibat Dalam Kegiatan Nasional Gerakan Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Orang)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					320			

IKU ini adalah IKU yang baru ada di tahun 2024 dan target IKU ini adalah target tahunan sehingga belum ada capaian sampai dengan Triwulan III 2024.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU 2 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena IKU ini baru terdapat di tahun 2024 dengan target tahunan.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi IKU 2 ini belum bisa dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra karena IKU ini baru terdapat di tahun 2024.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor penyebab keberhasilan dari pemenuhan Indikator Kinerja ini adalah koordinasi yang optimal dengan penyuluh, perangkat desa serta kelompok Masyarakat nelayan yang menjadi target lokasi kegiatan BCL. Berdasarkan identifikasi awal, target 320 orang dengan rincian di empat lokasi adalah 85 orang Makassar, 86 orang Kendari, 69 orang Gorontalo, 80 orang Manado. Berdasarkan hasil identifikasi di atas kemungkinan target ini bisa tercapai.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung IKU ini adalah anggaran kegiatan Bulan Cinta Laut sebesar 800 juta rupiah untuk empat lokasi. Pelaksanaan kegiatan direncanakan dilaksanakan pada Bulan Mei s.d. Juni. Bentuk efisiensi penggunaan anggaran yaitu dengan mengkolaborasikan dengan kegiatan sosialisasi perizinan pemanfaatan jenis ikan maupun pemanfaatan ruang laut.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja



Kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah pelaksanaan Bulan Cinta Laut berupa kegiatan bersih pantai di Wilayah Kerja BPSPL Makassar.

Kegiatan Bulan Cinta Laut berlangsung di empat Lokasi yaitu di Kota Makassar, Kendari, Manado, dan Gorontalo. Sampai dengan triwulan II, telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Sosialisasi, Gerakan Bimtek I dan II, dan kegiatan pemungutan dan penimbangan sampah yang dilakukan secara simultan selama dua bulan.

Pada triwulan III telah terdata nelayan yang turut menjadi tenaga kerja dalam kegiatan Bulan Cinta Laut adalah 320 orang. Jumlah ini sudah memenuhi target tahunan dalam IKU ini.

G. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung IKU ini adalah sebesar Rp. 800.000.000. Namun anggaran ini adalah anggaran kegiatan Bulan Cinta Laut yang secara spesifik menjadi indikator kinerja tersendiri yaitu pada IKU 11.

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada triwulan IV adalah penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut.

3.1.3 IKU3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang *existing*, dan/atau Verifikasi Perizinan. Dokumen yang menjadi output sebagai capaian dalam Indikator Kinerja ini adalah Laporan Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut, Laporan Verifikasi Teknis Pemanfaatan Ruang Laut, dan Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.

Teknik menghitung indikator kinerja ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 9. Capaian Realisasi IKU 3

SS -3	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar							
IKU - 3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					320			

Berdasarkan tabel di atas, belum terdapat capaian realisasi target pada TW III. Hal ini karena target IKU ini adalah target tahunan sehingga capaian baru terealisasi pada akhir tahun.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Target IKU ini adalah target tahunan sehingga belum terdapat realisasi capaian pada TW III yang bisa dibandingkan dengan realisasi tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

IKU 3 ini tidak bisa dibandingkan realisasinya dengan target jangka menengah organisasi atau renstra, karena IKU ini belum terdapat di jangka menengah organisasi atau Renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini, diantaranya sudah terdapat basis data identifikasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Makassar, sudah terdapat prasarana seperti GPS geodetic dan drone yang dapat mendukung pelaksanaan verifikasi lapangan maupun verifikasi teknis, dan baiknya koordinasi antar instansi baik dari pusat maupun PSDKP di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Selain faktor penyebab keberhasilan, terdapat juga faktor yang dapat menjadi penghambat atau kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja ini, diantaranya adalah belum terdapat basis data (subjek hukum, koordinat, dan luasan) KKPRL yang telah terbit yang bisa diakses oleh UPT. Hal ini menghambat pelaksanaan monitoring pemanfaatan ruang laut serta berpotensi memunculkan resiko tumpang tindih koordinat yang sudah terbit KKPRL dan pemohon yang akan mengajukan pemanfaatan ruang laut.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan pelaksanaan sosialisasi secara *hybrid* (daring dan luring) dapat mengoptimalkan penyampaian informasi yang lebih detail serta jangkauan informasi yang lebih luas untuk peserta yang tidak dapat hadir secara luring dengan penggunaan biaya yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan hanya pelaksanaan secara luring. Pelaksanaan penilaian teknis secara daring melalui aplikasi zoom juga

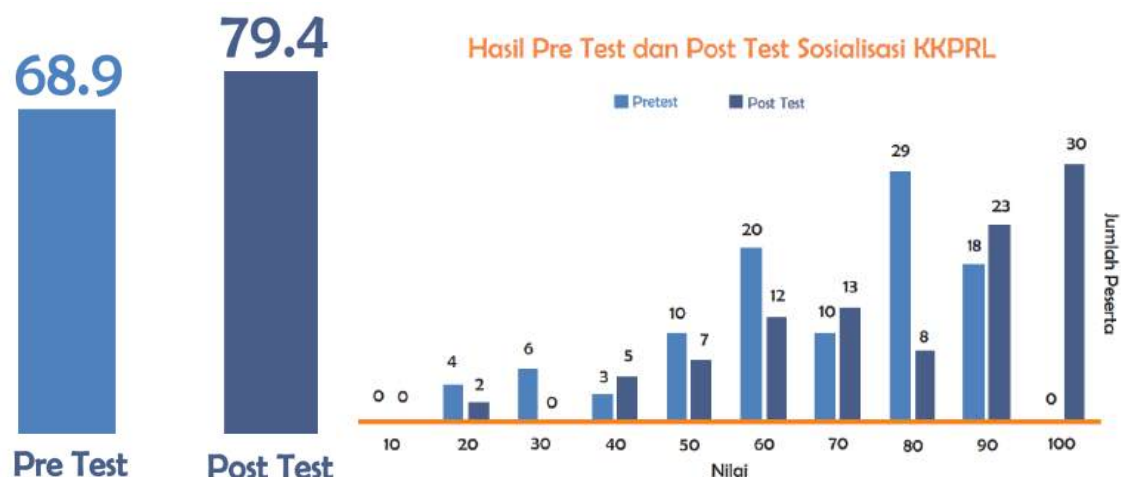
memberikan efisiensi anggaran yang signifikan. Pelaksanaan penilaian teknis secara langsung ke lapangan hanya akan dilakukan apabila terdapat kondisi yang dirasa perlu seperti kurangnya kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan data lapangan seperti data titik koordinat, hidro oseanografi, dan data ekosistem sekitar saat dilakukan verifikasi teknis secara daring.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan perizinan pemanfaatan ruang laut dibagi memiliki dua produk hukum, yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diberikan kepada kegiatan berusaha dan Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKPRL) yang diberikan kepada kegiatan non berusaha seperti pemerintah dan pemanfaatan untuk masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung progress capaian kinerja IKU1 pada Tahun 2024 antara lain: Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, Penilaian Teknis Pemanfaatan Ruang Laut, dan Monitoring/ Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dilaksanakan di Kota Manado pada tanggal 4 Maret 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Direktorat Penataan Ruang Laut, Direktorat Konservasi Ekosistem Biota Perairan, Direktorat Jasa Kelautan, dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Materi yang disampaikan pada sosialisasi pemanfaatan ruang laut antara lain: Perizinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Materi Teknis RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Perizinan Berusaha Jasa Kelautan, dan Pengawasan Perizinan Ruang Laut. Setelah paparan dilanjutkan dengan proses diskusi dan tanya jawab. Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sosialisasi, maka dilakukan pre test dan post test. Berikut adalah hasil pre test dan post test.



Gambar 12. Grafik nilai pre test dan post test

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat peningkatan kompetensi peserta sosialisasi dari pre test ke post test sebesar sekitar 10.5%. Pada post test banyak peserta yang mendapat nilai sempurna 100.



Gambar 13. Dokumentasi Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan di Kota Makassar pada tanggal 28 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Kerja Hukum dan Advokasi DJPKRL, Tim Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Direktorat Perencanaan Ruang Laut, dan Perwakilan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP). Materi yang disampaikan pada sosialisasi antara lain Penilaian Pelaksanaan KKPRL dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut, Kepdirjen PKRL 77/2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, dan Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta sosialisasi, maka dilakukan pre test dan post test.

Penilaian Teknis Pemanfaatan Ruang Laut

Proses pemberian PKKPRL melalui tahapan pendaftaran pada sistem OSS, pemeriksaan dokumen, penilaian kelayakan dokumen oleh tim teknis melalui kegiatan verifikasi teknis dan verifikasi lapangan, pembayaran PNBP oleh pemohon, dan proses penerbitan PKKPRL. Sedangkan proses pemberian KKRL melalui tahapan pendaftaran pada sistem Si-HANDAL, pemeriksaan dokumen, penilaian kelayakan dokumen oleh tim teknis melalui kegiatan penilaian teknis dan verifikasi lapangan, serta proses penerbitan KKRL. Pelaksanaan Kegiatan perizinan pemanfaatan ruang laut dilaksanakan melalui tim penilai teknis yang dilaksanakan di pusat dan penilaian teknis yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui penugasan oleh pusat. Selama triwulan III, total 141 penilaian teknis yang telah dilaksanakan di wilayah kerja BPSPL Makassar. Berikut ini adalah verifikasi/ penilaian teknis yang dilaksanakan di wilayah kerja BPSPL Makassar:



Gambar 14. Grafis Verifikasi Teknis Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Makassar s.d. TW II

Total **141** verifikasi teknis ini merupakan jumlah total dari pelaksanaan oleh pusat dan oleh UPT dengan pendelegasian pusat. Selama triwulan III tahun 2024, penilaian teknis dilakukan untuk berbagai bentuk pemanfaatan. Setelah dilakukan verifikasi / penialain teknis, tindak lanjut yang dilakukan antara lain yaitu verifikasi lapang yang dilakukan apabila dalam penilaian teknis ditemukan ketidaksesuaian antara permohonan dan hasil penilaian teknis oleh verifikator. Verifikasi Lapangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian kegiatan verifikasi permohonan kesesuaian ruang laut. Kegiatan ini dilakukan atas hasil penilaian teknis oleh pusat maupun penilaian teknis yang dilakukan oleh BPSPL Makassar.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan RTR dan/atau rencana zonasi, agar pemegang izin menaati RTR yang telah ditetapkan dan memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana RTR dan/atau rencana zonasi, dan Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKRPL.

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan pemegang KKPRL terhadap dokumen KKPRL dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Waktu penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan



KKPRL dilakukan selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan dan/atau setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca Pembangunan. Metodologi dalam pelaksanaan monitoring KKPRL ini adalah dengan observasi langsung survei lapangan dan wawancara beserta pengisian kuisioner. Target pemegang izin yang akan dilakukn monitoring atau pengendalian pada Tahun 2024 ditentukan oleh pusat dengan total 24 subjek hukum. Sampai dengan triwulan III tahun 2024, BPSPL Makassar telah melakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut terhadap 23 pemegang izin KKPRL di wilayah BPSPL Makassar yang izinnya telah terbit di tahun 2021 - 2022. Berikut adalah hasil kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut s.d. TW III 2024:

Tabel 10. Hasil Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut TW III di BPSPL Makassar

Subjek Hukum	Jenis Dokumen Permohonan	Provinsi	Detil Kegiatan	Luas/ Panjang	Keterangan Status
PT Kolaka Nickel Indonesia	Persetujuan	Sulawesi Tenggara	Pengembangan Terminal Khusus	249.7 Ha	Taat dengan catatan
PT Bumi Mineral Sulawesi	Persetujuan	Sulawesi Selatan	Terminal Khusus	20.3 Ha	Taat dengan catatan
Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Anggrek	Konfirmasi	Gorontalo	Pelabuhan Anggrek	707.36 Ha	Taat dengan catatan
But Job Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi	Persetujuan	Sulawesi Tengah	Pipa Dan Kabel Bawah Laut Lapangan Senoro	7 Km	Taat dengan catatan
Pt Kembang Utara	Persetujuan	Sulawesi Utara	Reklamasi	1.14 Ha	Taat dengan catatan
Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Ii Teluk Palu	Persetujuan	Sulawesi Tengah	Pelabuhan Donggala Dan Pembuangan Hasil Pengerukan	491.22 Ha	Taat dengan catatan

Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Teluk Palu	Persetujuan	Sulawesi Tengah	Pelabuhan Wani	137.37 Ha	Taat dengan catatan
PT Manado Utara Perkasa	Persetujuan	Sulawesi Utara	Pembangunan pusat bisnis dan periwisata	90,00 Ha	Taat dengan catatan
Pt Yasmin Bumi Asri	Persetujuan	Sulawesi Selatan	Reklamasi Pulau Lae-Lae	14.11 Ha	Taat dengan catatan
PT Panca Digital Solution	Persetujuan	Sulawesi Selatan	Pembangunan Terminal Khusus	9.65 Ha	Tidak taat
PT Bukit Makmur Solution	Persetujuan	Sulawesi Selatan	Pembangunan Terminal Khusus	124.9 Ha	Taat dengan catatan
Bupati Bulukumba	Konfirmasi	Sulawesi Selatan	Pembangunan Masjid Pinisi	0.48 Ha	Taat dengan catatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	Konfirmasi	Sulawesi Selatan	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Desa Lamantu	21.62	Taat dengan catatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	Konfirmasi	Sulawesi Selatan	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Desa Nyiur Indah	13.24	Taat dengan catatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Selayar	Konfirmasi	Sulawesi Selatan	Pembangunan Dermaga Penyeberangan Desa Kalotoa	6.88 Ha	Taat dengan catatan
PT Mahakarya Sentra Mineral	Persetujuan	Sulawesi Tengah	Pembangunan Tersus dan Stockpile	8.19 Ha	Taat dengan catatan
PT Anugrah Tambang Industri	Persetujuan	Sulawesi Tengah	Pembangunan Kawasan Industri (Reklamasi, Tersus, serta sarana penunjang)	104.41 Ha	Taat dengan catatan
PT Indo Mina Grasia	Persetujuan	Sulawesi Utara	Pembangunan Dermaga	1.43 Ha	Taat dengan catatan
Dirjen Perikanan Tangkap, KKP	Konfirmasi	Sulawesi Utara	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Likupang	171.09 Ha	Taat dengan catatan
Dirjen Perikanan Tangkap, KKP	Konfirmasi	Sulawesi Utara	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung	22.85 Ha	Taat dengan catatan
Dinas PUPR Kab. Wakatobi	Konfirmasi	Sulawesi Tenggara	Penataan Kawasan Waterfront City Marina	6.36 Ha	Taat dengan catatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Wakatobi	Konfirmasi	Sulawesi Tenggara	Pembangunan Rumah Susun Mandati	3.88 Ha	Taat dengan catatan
Dinas Perhubungan Kab. Wakatobi	Konfirmasi	Sulawesi Tenggara	Pembangunan Pemecah Gelombang	0.84 Ha	Tidak taat

Berdasarkan tabel hasil pengendalian pemanfaatan KKPRL di atas, didapat bahwa 21 dari 23 subjek hukum dikategorikan taat dengan catatan sedangkan dua subjek hukum dikategorikan tidak taat. Berdasarkan hasil pengendalian, subjek hukum yang tidak taat tersebut berbeda antara pemegang izin KKPRL dengan pengelola di lapangan. Hal ini terjadi karena adanya konflik internal subjek hukum yang berimbas subjek hukum mengajukan pencabutan izin KKPRL. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan KKPRL paling banyak dilaksanakan di Sulawesi Selatan dengan delapan subjek hukum. Sementara berdasarkan jenis dokumen paling banyak adalah jenis dokumen persetujuan dengan total sebanyak 10 dokumen.

G. Anggaran

Postur anggaran untuk mendukung pencapaian IKU3 tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 1.100.000.000.** yang berasal dari sumber anggaran RM dan PNPB. Realisasi anggaran pada Triwulan III mencapai **72.81%**. untuk detail realisasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Realisasi Anggaran IKU 1

No	Komponen / Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	267,000,000	258,296,302	96.74
2	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	322,600,000	226,406,749	70.18
3	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	510,400,000	480,364,163	94.12
JUMLAH		1.100.000.000	965,067,214	87.73

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU3 pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah Pelaksanaan Penilaian/ Verifikasi Teknis Pemanfaatan Ruang Laut terhadap permohonan KKPRL yang masuk dan pengendalian pemanfaatan ruang laut di satu subjek hukum serta penyusunan laporan tahunan.

3.1.4 IKU4 Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah Provinsi yang didampingi penyusunan percepatan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan, atau pendampingan lain sesuai dengan kondisi Kawasan Konservasi.

Teknik menghitung capaian indikator kinerja ini adalah dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Makassar yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan Kawasan konservasinya.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 12. Capaian IKU Realisasi IKU 4

SS - 4	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang Diterapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar							
IKU - 4	Dokumen yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					2			

Berdasarkan tabel di atas belum ada realisasi target IKU ini pada triwulan III 2024 karena IKU ini adalah IKU dengan target tahunan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Target IKU ini adalah target tahunan sehingga belum terdapat realisasi capaian pada TW III yang bisa dibandingkan dengan realisasi tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

IKU 4 ini tidak bisa dibandingkan realisasinya dengan target jangka menengah organisasi atau renstra, karena IKU ini belum terdapat di jangka menengah organisasi atau Renstra.

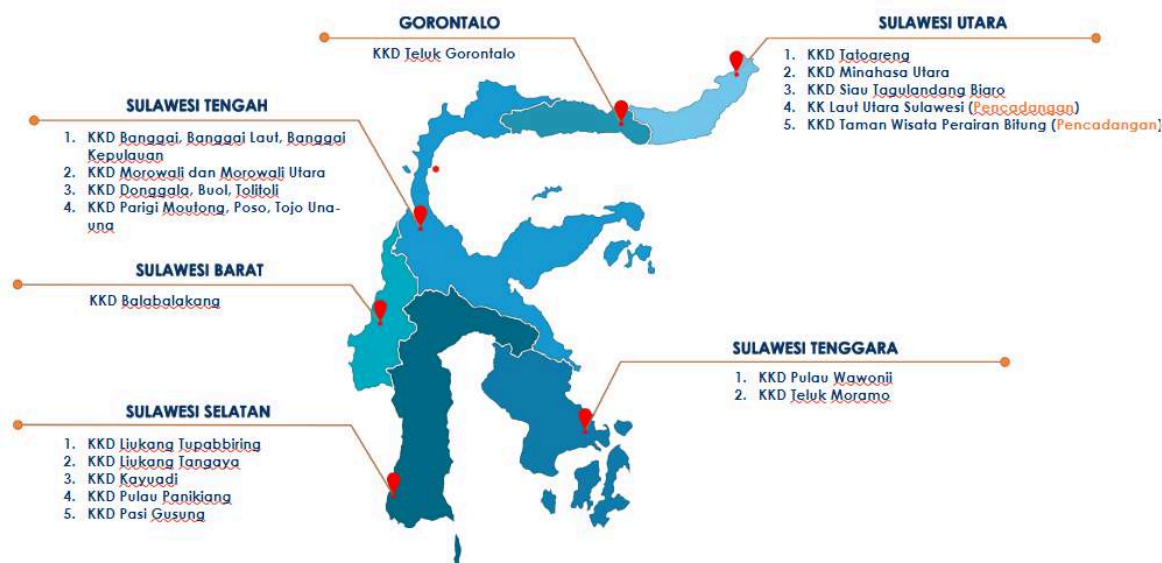
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan dalam capaian IKU4 dikarenakan baiknya koordinasi antara BPSPL Makassar dengan DKP Provinsi yang ada di wilayah kerja BPSPL Makassar, Akademisi, praktisi konservasi, dan tim penyusun materi teknis perairan RZWP3K Integrasi. Hal ini memudahkan dalam pencapaian progress capaian IKU4.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi Penggunaan Sumber daya pelaksanaan IKU 4 pada TW III ini adalah pelaksanaan rapat sekaligus pembahasan terkait pembahasan KKPd kayuadi, kasibusung, panikiang untuk provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan secara bersamaan.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja



Sampai dengan triwulan III Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Sulawesi Selatan telah ditetapkan. Kawasan Konservasi tersebut antara lain KKPD Panikiang, KKPD Kayuadi, dan KKPD Pasigusung. Untuk mendukung kegiatan pada IKU ini terdapat beberapa kegiatan yakni Rapat Koordinasi Teknis, Penetapan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja Sulawesi, Pembahasan Surat Keputusan Menteri Tentang KKD Sulawesi Selatan, Pembahasan Surat Keputusan Menteri tentang Pencadangan Kawasan Konservasi di Perairan Laut Sulawesi, Penetapan Surat Keputusan Menteri tentang Kawasan Konservasi Daerah Sulawesi Selatan, dan Pendampingan Fasilitasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Polewali Mandar Sulawesi Barat.

G. Anggaran

Tabel 13. Realisasi anggaran IKU4

No	Komponen / Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	100.000.000	78,099,839	78.1
JUMLAH		100.000.000	78,099,839	78.1

Anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian IKU4 tahun 2024 adalah **Rp. 100.000.000**, realisasi anggaran sampai dengan triwulan III sebesar **Rp. 78.099.839** atau **78.1%**.

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah koordinasi penyusunan laporan tahunan.

3.1.5 IKU5 Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)

Kegiatan inisiasi penyusunan draft Kerja sama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022

tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih Lembaga/badan/ organisasi untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama dapat dilakukan dengan kementerian dan Lembaga pemerintah non kementerian. Pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha/ industri/ perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan IKU ini dicapai dengan menginventarisasi dan menjumlahkan rancangan kerja sama yang disusun/difasilitasi penyusunannya di wilayah kerja BPSPL Makassar untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon 1.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 14. Capaian Realisasi IKU 5

SS - 5	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif di Wilayah Kerja BPSPL Makassar							
IKU - 5	Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					2			

Berdasarkan tabel di atas belum terdapat realisasi capaian pada triwulan III. Hal ini karena target IKU ini adalah target tahunan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU 5 ini belum bisa dibandingkan dengan realisasi tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya. Hal ini karena IKU ini tidak terdapat di tahun sebelumnya dan beberapa tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi IKU ini belum bisa dibandingkan dengan target jangka menengah pada renstra. Hal ini karena IKU ini adalah IKU baru dan targetnya adalah tahunan sehingga belum terdapat capaian pada triwulan III.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor yang bisa menjadi penyebab keberhasilan pencapaian pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU3 antara lain adalah koordinasi yang baik yang dilakukan BPSPL Makassar dengan calon mitra diantaranya perguruan tinggi di Sulawesi. Koordinasi yang baik ini direalisasikan dengan kolaborasi kegiatan antara BPSPL Makassar dengan perguruan tinggi selaku calon mitra. Kolaborasi kegiatan yang rutin antara lain pelaksanaan mahasiswa untuk Praktik Kerja Lapangan (PKL) maupun Kerja Praktik.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya terkait pelaksanaan IKU 5 ini antara lain pelaksanaan progress penyusunan perjanjian kerjasama dilakukan oleh personal masing-masing wilker sesuai dengan lokasi perguruan tinggi yang akan dijadikan mitra.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung IKU ini adalah penyusunan rancangan perjanjian kerjasama dengan universitas sam ratulangi, Sulawesi Utara dan Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Selain penyusunan draft, dilakukan juga evaluasi implementasi Perjanjian Kerja Sama dengan Unoversitas Muhammadiyah Sinjai (UMSI) Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan. Pada triwulan II telah dilakukan penandatanganan kerja sama dengan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin pada tanggal 20 Mei 2024. Sedangkan pada triwulan III telah disusun rancangan perjanjian kerja sama antara BPSPL Makassar dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Manado.

G. Anggaran

Postur anggaran untuk mendukung pencapaian IKU5 tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 70.000.000**. Sumber dana berasal dari Rupiah Murni (RM). Untuk detail realisasinya dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 15. Realisasi anggaran IKU 5

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Kerjasama Konservasi	70,000,000	26,436,798	38.34
JUMLAH		70,000,000	26,436,798	38.34

H. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan IV 2024 adalah finalisasi dan pengesahan perjanjian Kerjasama dengan Universitas Sam Ratulangi, Manado.

3.1.6 IKU6 Bantuan Pemerintah Untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)

Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar adalah kelompok masyarakat penggerak konservasi yang menerima Bantuan Konservasi di wilayah kerja BPSPL Makassar.

Bantuan Konservasi merupakan bantuan penyediaan sarana dan prasarana konservasi yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi, diberikan pada Kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan, pengawasan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan Keanekaragaman Hayati Laut secara berkelanjutan.

Capaian indikator kinerja ini akan diketahui dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan melalui Kepdirjen Pengelolaan Ruang Laut.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 16. Capaian Realisasi IKU 6

SS – 6	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar							
IKU – 6	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
3	2	3	120	0	3	100	4	75

Berdasarkan tabel di atas belum terdapat realisasi capaian IKU ini pada triwulan III 2024. Target IKU adalah triwulanan dengan total target tiga kelompok dengan target target satu kelompok masing-masing di triwulan II, triwulan III, dan triwulan IV.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU ini apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sama, dimana realisasi pada triwulan III adalah tiga kelompok.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi IKU ini belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena target pada jangka menengah adalah target tahunan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor yang bisa menjadi penyebab keberhasilan pencapaian pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU6 antara lain adalah koordinasi yang baik yang dilakukan BPSPL Makassar dengan direktorat KKHL, Pemerintah Daerah dan juga dengan kelompok calon penerima bantuan. Selain itu, baiknya koordinasi antara pejabat pengadaan barang dan jasa dengan penanggungjawab kegiatan juga memudahkan dalam proses pengadaan barang bantuan KOMPAK sehingga capaian IKU ini dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya terkait pelaksanaan IKU 6 ini antara lain pelaksanaan survey Harga Pokok Satuan (HPS) barang-barang bantuan dengan menggunakan e-katalog dan komunikasi secara langsung dengan calon penyedia yang pada tahun sebelumnya sudah menjadi penyedia bantuan kompak menyebabkan efisiensi penggunaan anggaran karena tidak membutuhkan banyak anggaran untuk terlaksanakannya survey HPS ini.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sampai dengan Triwulan III telah dilakukan serah terima bantuan KOMPAK kepada tiga kelompok yaitu:



Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) OK Dive Community pada tanggal 7 Mei 2024 di Gedung Pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari. Bantuan yang disalurkan adalah 4 set paket alat selam, media transplantasi, dan alat penunjang seperti kamera bawah air dengan total nilai bantuan Rp. 103.710.000,-.



Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Yayasan Lolie Bahari pada tanggal 29 Mei 2024 di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Bantuan yang disalurkan adalah 2 set paket alat selam, media transplantasi, dan alat penunjang seperti kamera bawah air serta alat pengolahan data berupa laptop dengan total nilai bantuan Rp. 90.118.625,-.



Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Sangkarrang Ocean Dive pada tanggal 24 Juni 2024 di Kantor BPSPL Makassar, Sulawesi Selatan. Bantuan yang disalurkan adalah 1 unit kompresor, 1 set paket alat selam, dan media transplantasi dengan total nilai bantuan senilai Rp. 106.160.000,-.

G. Anggaran

Postur anggaran untuk mendukung pencapaian IKU6 tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 425.000.000**. Untuk detail realisasinya dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 17. Realisasi anggaran IKU 6

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pemberian bantuan KOMPAK	375,750,000	367,854,974	97.89
2	Monitoring dan Evaluasi bantuan KOMPAK	49,250,000	22,578,000	48.84
JUMLAH		425,000,000	390,432,974	91.87

H. Rencana Aksi Triwulan IV Tahun 2024

Rencana aksi pada Triwulan IV 2024 adalah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bantuan KOMPAK khususnya untuk bantuan yang disalurkan pada tahun 2023 dan 2024

3.1.7 IKU7 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Kelompok masyarakat di kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Teknik menghitung untuk memenuhi capaian IKU ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di wilayah kerja BPSPL Makassar

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 18. Capaian Realisasi IKU 7

SS - 6	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar							
IKU - 7	Bantuan Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					2	-		

Target capaian IKU ini adalah target tahunan sehingga belum ada realisasi capaian pada Triwulan III ini.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU 7 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena pada Triwulan III sama-sama belum terdapat capaian dan IKU ini adalah Indikator kinerja yang baru ada di tahun sekarang sehingga belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi IKU 7 ini belum bisa dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi IKU ini baru terdapat di tahun 2024.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Penyebab keberhasilan pencapaian pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU7 tidak lepas dari koordinasi yang baik yang dilakukan BPSPL Makassar dengan satker Dinas Kelautan dan Perikanan di KKPD serta dengan kelompok di dalam kawasan konservasi.

Sedangkan faktor yang bisa menyebabkan kegagalan pada IKU ini adalah adanya pemblokiran anggaran sampai dengan akhir tahun.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat kawasan konservasi di Pulau Salemo, Desa Mattiro Bombang, Kec. Tupabbiring Utara, Kab. Pangkajene dan Kepulauan yang melibatkan BPSPL Makasar, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Cabang Dinas Kelautan Kab. Pangkajene dan Kepulauan (CDK Pangkep), Dinas Perikanan Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Kab. Pangkep, Kepala Desa Mattiro Bombang dan masyarakat Desa Mattiro Bombang dengan peserta sebanyak 51 masyarakat. Kegiatan berupa pemberian materi dan pelatihan diantaranya Materi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Secara Berkelanjutan untuk Peningkatan Ekonomi, Materi Pengantar Pengolahan Rumput Laut, dan materi Pengolahan Ikan Tenggiri menjadi Amplang untuk

Peningkatan Nilai Ekonomis Hasil Perikanan. Selain sesi materi diberikan juga sesi praktik berupa praktik pengolahan rumput laut menjadi beberapa produk seperti kerupuk rumput laut, permen rumput laut, permen rumput laut, dan rumput laut goreng tepung serta pelatihan bleaching rumput laut hingga tidak berwarna atau bening dan juga praktik pembuatan amplang ikan oleh masing-masing kelompok. Setelah pemberian materi teknis dan praktik maka diberikan pelatihan terakhir yaitu materi pembukuan dan pemasaran hasil produk perikanan.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pada IKU ini adalah pelaksanaan bimtek atau pelatihan untuk kelompok di dalam kawasan konservasi.

G. Anggaran

Postur anggaran untuk mendukung pencapaian IKU7 tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 200.000.000**. Sumber dana berasal dari Rupiah Murni (RM) dan PNBPN, anggaran pada kegiatan ini sempat mengalami pemblokiran dan baru dibuka pada akhir Bulan Juni.

Tabel 19. Realisasi anggaran IKU 7

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi	200.000.000	54,072,865	27.03
JUMLAH		200.000.000	54,072,865	27.03

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana aksi pada Triwulan IV adalah pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis atau pembinaan kepada kelompok Masyarakat atau masyarakat di dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

3.18.1 IKU8 Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat, pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Makassar adalah Jenis ikan yang diintervensi pengelolaannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan.

Target Jenis Ikan berjumlah 6 (enam), yaitu BCF, Cetacea/Lumba-lumba, Dugong, Bambu Laut, Hiu Paus, dan Penyu

Upaya yang dilakukan melalui:

- 1) Survei Pendataan Sebaran dan Populasi Banggai Cardinal Fish di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara
- 2) Pendataan Dan Pemantauan Kemunculan Cetacea (LumbaLumba) di Sulawesi Selatan
- 3) Monitoring dan Pendataan Dugong dan Habitat Dugong (Lamun) di Kab. Toli Toli Sulawesi Tengah
- 4) Survei Pendataan Populasi Bambu Laut di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
- 5) Monitoring Habitat Hiu Paus Gorontalo
- 6) Monitoring dan Pendataan Penyu Sulawesi Utara
- 7) Monitoring Coral Stok Centre di Malalayang dan Bokori
- 8) Rehabilitasi Anemon Habitat BCF di Banggai
- 9) Respon Cepat Penanganan Dan Penyelamatan Biota Laut Dan Mamalia Terdampar
- 10) Edukasi Penanganan Dan Penyelamatan Biota Perairan Dan Mamalia Laut Terdampar
- 11) Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan dilindungi/terancam punah

Teknik menghitung capaian indikator kinerja ini adalah dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat kritis jenis ikan, dan/ atau penanganan respon cepat.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui belum terdapat realisasi capaian pada triwulan III. Hal ini karena target IKU ini adalah target tahunan

Tabel 20. Capaian Realisasi IKU 8

SS - 7	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/ atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar							
IKU - 8	Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					6	-	8	-

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU 8 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena pada Triwulan III sama-sama belum terdapat capaian.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi IKU 8 ini belum bisa dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi karena pada Triwulan III sama-sama belum terdapat capaian.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor yang dapat menjadi penyebab keberhasilan capaian target IKU8 antara lain adalah: penempatan enumerator hiu paus, hiu pari, sidat, dan teripang yang tepat sasaran membantu terealisasinya pendataan yang dilakukan secara kontinu di BPSPL Makassar, Pelaksanaan monitoring CSC Bokori dan Malalayang yang berkelanjutan sesuai jadwal, penentuan waktu survei yang tepat, penentuan lokasi sosialisasi di tempat-tempat yang strategis yang masyarakatnya membutuhkan penyadartahuan mengenai status biota dilindungi, pembinaan dan komunikasi yang baik dengan kelompok penerima bantuan KOMPAK untuk optimalisasi upaya pelaksanaan konservasi. Sedangkan faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan adalah faktor cuaca yang tidak menentu dan bisa berakibat terhambatnya pelaksanaan survey. Selain faktor cuaca, ketidak sanggupan enumerator dalam menghadapi kondisi di lapangan juga menjadi faktor potensi kegagalan dalam pencapaian kinerja ini.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dalam pencapaian progress IKU 8 adalah seleksi enumerator yang dilakukan secara *hybrid* (luring dan daring) sangat efektif dalam meminimalisasi **bahkan tidak ada penggunaan anggaran** dalam proses rekrutmen enumerator.

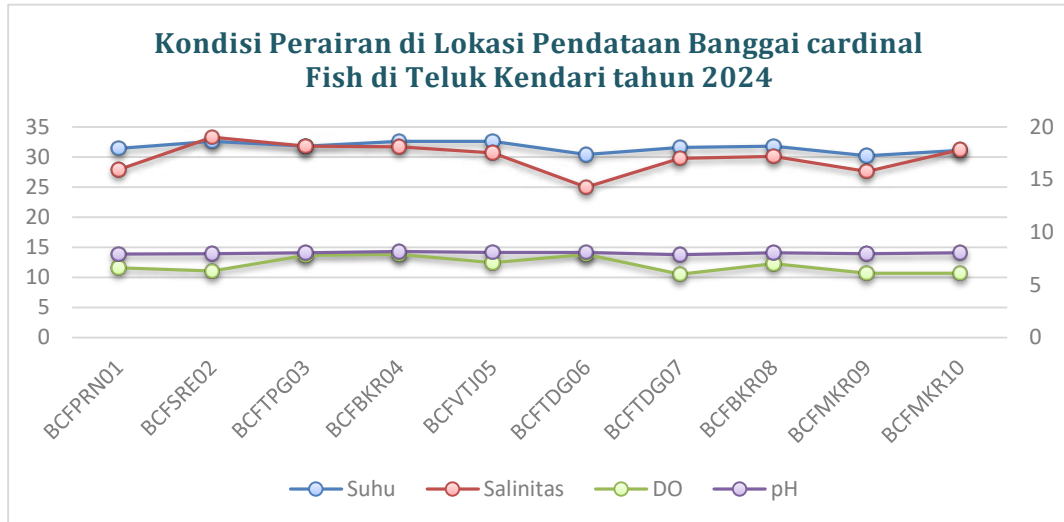
F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III untuk mendukung ketercapaian IKU ini antara lain:

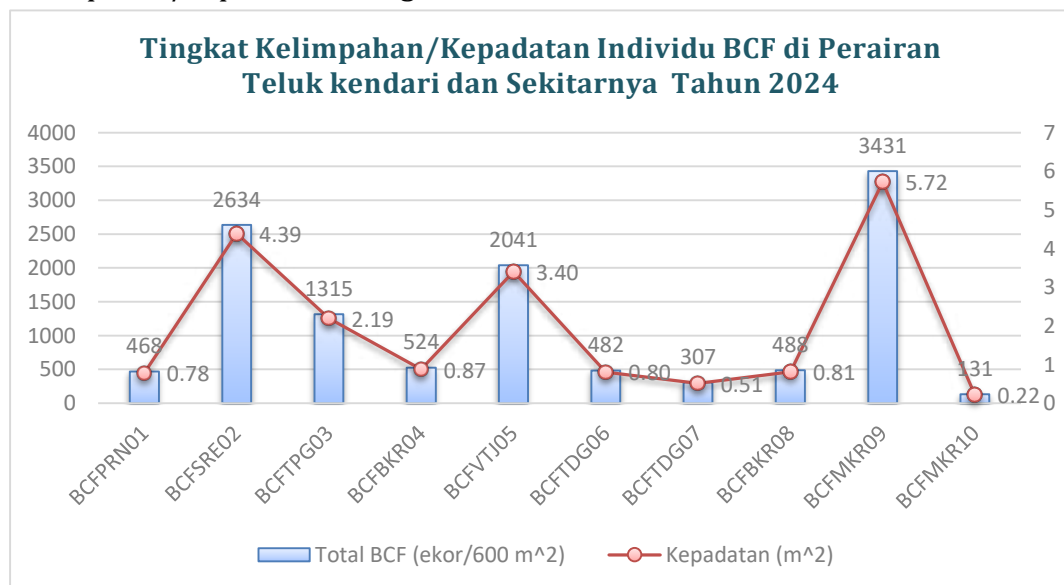
1) Survei Pendataan Sebaran dan Populasi Banggai Cardinal Fish di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kegiatan Survei Pendataan Sebaran dan Banggai Cardinal Fish/BCF (*Pterapogon kauderni*) dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 4 – 8 Maret 2024 di perairan Teluk Kendari dan Sekitarnya meliputi wilayah administrasi Kota Kendari dan Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi survei merupakan Lokasi penangkapan/pemanfaatan Banggai Cardinal Fish yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Kendari. Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

Kondisi lingkungan perairan pada lokasi pendataan ikan Capungan Banggai diperoleh bahwa parameter suhu berkisar 30,2–32,6°C serta salinitas berkisar 25 – 23,3‰ berada di atas/ dibawah ambang batas baku mutu air laut untuk biota laut sedangkan pH (7,85 – 8,08) dan oksigen terlarut/DO (6-7,9) masih dalam ambang batas baku mutu air laut untuk biota laut (KepMen LH No. 51 tahun 2004).

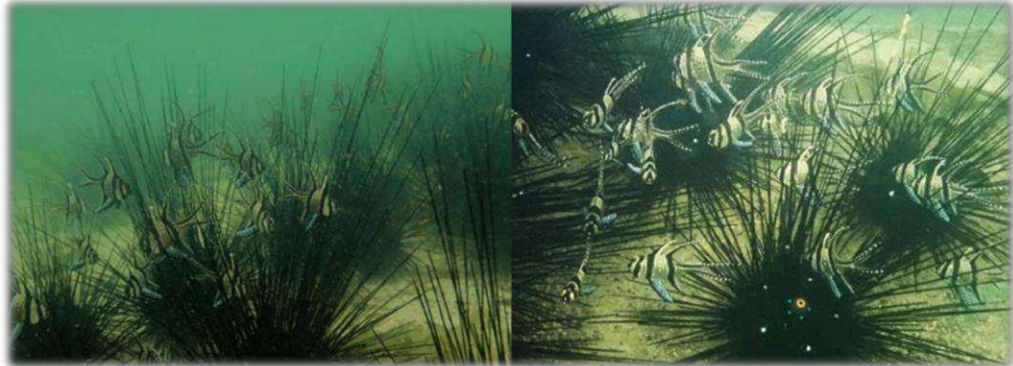


Tingkat kelimpahan populasi ikan Capungan Banggai berkisar antara 131 – 3.431 ekor/600m² dengan tingkat kepadatan 0,22 – 5,72 ekor/m², sedangkan rata-rata tingkat kelimpahan ikan Capungan Banggai di perairan Teluk Kendari yaitu **1.182 ekor/600m²** dengan Tingkat kepadatan sebesar **1,97 ekor/m²**. Berdasarkan Kelompok Umur ikan Capungan Banggai diperoleh Tingkat kelimpahan/kepadatan sebagai berikut:



- Tingkat kelimpahan/kepadatan fase Rekrut (anakan) berkisar antara 5 – 175 ekor dengan Tingkat kepadatan 0,01-0,29 ekor/m²,
- Tingkat kelimpahan/kepadatan fase Juvenil berkisar antara 2 – 681 ekor dengan kepadatan antara 0,003 – 1,14 ekor/m²,
- Tingkat kelimpahan/kepadatan fase Juvenil berkisar antara 100 – 2.617 ekor dengan kepadatan antara 0,17 – 4,36 ekor/m².
- ukuran individu ikan Capungan Banggai di perairan Teluk Kendari dan sekitarnya didominasi oleh kelompok ukuran tahap Dewasa (>3,5 cm)

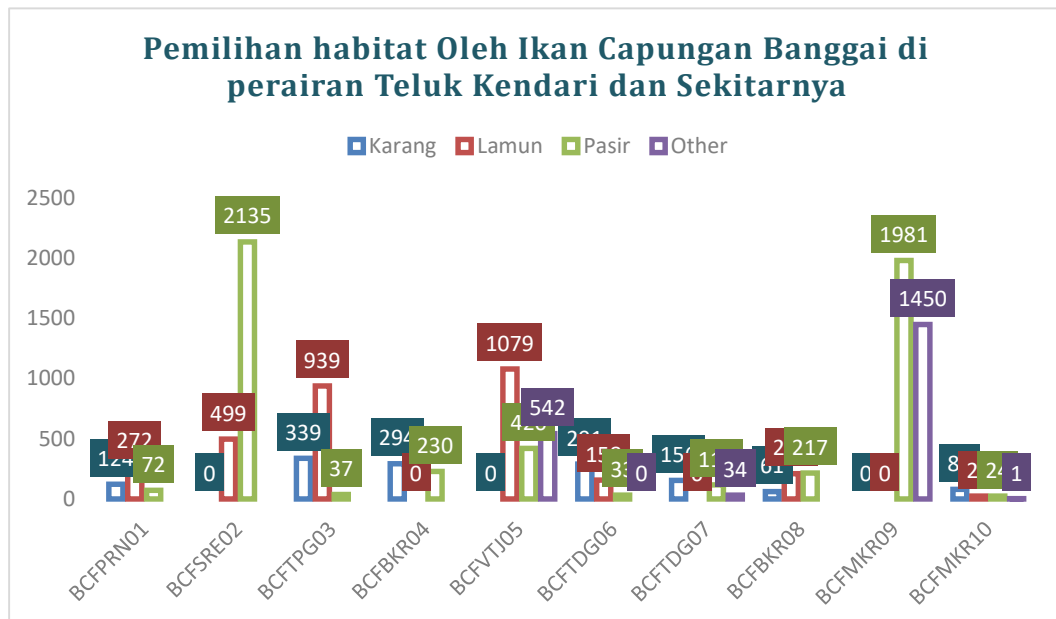
dengan total rata-rata kelimpahan sebesar 870,9 ekor (74%) dengan Tingkat kepadatan 1,45 ekor/m². Sedangkan kelompok umur Juvenil (1,8 – 3,5 cm) sebanyak 249,2 ekor (21%) dengan ringkat kepadatan 0,42 ekor/m², dan terendah adalah kelompok umur rekrut (anakan) sebesar 62 ekor (5%) dengan Tingkat kepadatan 0,1 ekor/m².



Pemilihan habitat oleh Ikan Capungan Banggai di 10 lokasi pengamatan di perairan Teluk Kendari didominasi pada lokasi dengan dasar perairan **berpasir** dengan jumlah ikan Capungan Banggai yaitu **5.266 ekor (45%)** serta habitat **lamun** dengan jumlah ikan Capungan banggai sebanyak **3.181 ekor**. Sedangkan pemilihan habitat oleh ikan Capungan Banggai dengan komposisi terkecil adalah habitat ekosistem terumbu karang yaitu 1.347 ekor.

Pemilihan mikrohabitat oleh ikan Capungan Banggai terdiri dari Bulu Babi (D sitosum), Hard Coral (Coral Branching dan Submassive), Anemon (H crispa dan Actinodendron sp) dan mikrohabitat lainnya, dimana ikan Capungan Banggai lebih memilih mikrohabitat Bulu Babi jenis D sistosum dengan persentase jumlah ikan capungan Banggai sebesar **98,11% dengan total individu yautu 11.600 ekor** untuk semua kelompok umur. Sedangkan mikrohabitat Hard Coral (karang keras) dan Anemon hanya ditemukan di beberapa stasiun dengan persentase ikan Capungan banggai sebesar 1,2% (142 ekor) yang memilih karang keras serta 0,47% (56 ekor) yang memilih mikrohabitat Anemon;

Hasil analisis pola sebaran Morista ikan Capungan Banggai yaitu (Id) 1,84 dimana > 1 (satu) sehingga pola penyebaran Ikan Capungan Banggai di perairan Teluk Kendari Sulawesi Tenggara adalah mengelompok. Pola sebaran tersebut tidak merata dikarenakan Ikan Capungan Banggai berasosiasi dengan mikrohabitat yang tepat untuk mencari makan dan perlindungan.



2) Monitoring Habitat Hiu Paus Gorontalo

Survei dilakukan pada tanggal 19 - 23 Maret 2024 tim Survei habitat hiu paus telah melaksanakan Kegiatan Monitoring habitat hiu paus bertempat di Desa Botubuarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui kondisi biofisik habitat Hiu Paus dan mengetahui sebaran lokasi makan (*feeding area*) Hiu Paus.



Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan yaitu hiu paus yang teridentifikasi selama pendataan sejak 2016 hingga Maret 2024 yaitu **60 Ekor (Foto ID) dengan keseluruhan berjenis kelamin Jantan** dengan estimasi ukuran yaitu 4 hingga 7 meter. Adapun data presentase tutupan dan kondisi karang pada 3 stasiun yang sudah diamati yaitu, Pada stasiun I diperoleh Kondisi terumbu karang di Stasiun I berada dalam kategori Baik sebesar 59.40%, pada stasiun II diperoleh kondisi terumbu karang berada dalam kondisi kategori baik sebesar 59.93%, Sedangkan pada Stasiun III Kondisi terumbu karang berada dalam kategori Sedang sebesar 43.67%.

Mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.4 tahun 2001 Tentang

Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang. Pengambilan data Kepadatan plankton di lakukan pada 2 stasiun yaitu zona inti dan zona interaksi. Kemudian di Analisis oleh Tim lab Universitas Negeri Gorontalo, dari hasil Analisis yaitu Pada zona inti terdapat 17 spesies plankton, dengan jumlah terbanyak dari spesies Closterium gracile dan paling sedikit dari spesies Synedra Acus sedangkan pada zona Interaksi terdapat 19 spesies plankton, jumlah terbanyak dari spesies Melosira italica dan paling sedikit dari spesies Epithrmia zebra, Eunotia arcus dan Rhopalodia gibba. Data sosial ekonomi dan sebaran pakan alami masih akan dilakukan sambil menunggu musim ikan Nike tiba.



Pada triwulan II telah dilaksanakan survei lanjutan untuk pada tanggal 4-6 Mei 2024 untuk mengetahui kondisi biofisik habitat Hiu Paus dan mengetahui sebaran lokasi makan (feeding area) Hiu Paus, khususnya terkait dengan kemunculan ikan Nike. Pendataan dilakukan di malam hari dan didapatkan bahwa kemunculan ikan Nike berada pada tiga Lokasi yaitu perairan Olalo dan tamboo Kelurahan Leato Selatan kota Gorontalo, dan di perairan Kurenai Desa Botubarani Kab. Bone Bolango. Pada lokasi kemunculan tersebut juga dilaksanakan pengambilan sampel air untuk analisis plankton, sehingga didapatkan 3 sampel air sama dengan jumlah titik kemunculan ikan Nike. Dari hasil analisis laboratorium yang dilakukan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNG, ditemukan bahwa pada lokasi Tamboo, ditemukan bahwa terdapat 19 spesies fitoplankton dan 8 spesies zooplankton dengan jumlah total individu yang didapatkan sebanyak 279; Pada lokasi Olalo, ditemukan bahwa terdapat 17 spesies fitoplankton dan 6 spesies zooplankton dengan jumlah total 267 individu; sementara pada lokasi Kurenai, ditemukan bahwa terdapat 13 spesies fitoplankton dan 7 spesies zooplankton, dengan jumlah total plankton yang didapatkan sebanyak 260 individu

3) Pendataan Dan Pemantauan Kemunculan Cetacea (Lumba-Lumba) di Sulawesi Selatan

Pendataan dilaksanakan di perairan Bira, Kab. Bulukumba pada tanggal 3 s.d. 7 Mei 2024. Metode yang digunakan adalah metode pengamatan langsung dan pengamatan udara menggunakan drone. Proses pengamatan dan observasi dengan menggunakan kapal. Apabila terdapat kemunculan, tim observer akan melakukan pengambilan data titik koordinat dengan menggunakan GPS dan mendokumentasikan serta melakukan pencatatan terkait tingkah laku cetacea. Sedangkan pengamatan dari udara menggunakan drone dilakukan pada saat menemukan cetacea untuk mengetahui jenis, jumlah, dan arah pergerakan cetacea. Dari hasil observasi yang dilakukan, ditemukan hasil kemunculan sebanyak empat kali sebagai berikut:



dolphin (*Stenella longirostris*)

- Tanggal 5 Mei pada sekitar pukul 17.15 sampai pukul WITA ditemukan lumba-lumba sekitar 4 ekor di perairan sebelah Tenggara Pulau Liukang Loe, jenis lumba-lumba adalah lumba-lumba hidung botol indo-pasifik (*Tursiops aduncus*);
- Tanggal 6 Mei pada sekitar pukul 07.03 sampai pukul 07.28 WITA ditemukan kemunculan sebanyak 4 ekor di perairan sebelah Utara Pulau Liukang Loe, dengan jenis lumba-lumba hidung botol indo-pasifik (*Tursiops aduncus*);
- Tanggal 6 Mei pada sekitar pukul 08.11 sampai pukul 08.38 WITA ditemukan kemunculan sebanyak 2 ekor di perairan sebelah Barat Pulau Liukang Loe, dengan jenis lumba-lumba hidung botol indo-pasifik (*Tursiops aduncus*);
- Tanggal 6 Mei pada pukul 10.30 sampai pukul 11.05 WITA ditemukan kemunculan sebanyak lebih dari 30 ekor di perairan antara pulau kambing dan titik 0 km Tanjung Bira Bulukumba, dengan jenis lumba-lumba pemintal/ spinner dolphin (*Stenella longirostris*);
- Tanggal 7 Mei pada pukul 11.17 sampai pukul 11.50 WITA ditemukan kemunculan sebanyak lebih dari 40 ekor sebanyak 2 kelompok di perairan antara pulau kambing dan titik 0 km Tanjung Bira Bulukumba, dengan jenis lumba-lumba pemintal / spinner

4) Monitoring dan Pendataan Dugong dan Habitat Dugong (Lamun)

a) Monitoring dan Pendataan Dugong dan Habitat Dugong (Lamun) di Kab. Toli Toli Sulawesi Tengah

Kegiatan Monitoring dan Pendataan Dugong dan Habitat Dugong (Lamun) dilaksanakan di Kabupaten Tolitoli dilaksanakan pada tanggal 31 Mei s.d. 8 Juni 2024 di lima desa yaitu Desa Ogotua, Desa Sese, Desa Bambupula Kecamatan Dampal Utara, Desa Malala Kecamatan Dondo, dan Desa Lalos Kecamatan Galang. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, pengamatan dugong baik secara langsung maupun pengamatan dari udara menggunakan drone, sedangkan metode pengumpulan data habitat lamun menggunakan tarsek kuadrat sepanjang 100 meter sebanyak tiga transek dalam setiap stasiun pengamatan. Berikut adalah data dan informasi sebagai berikut:



- Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, keseluruhan responden baik di Desa Ogotua, Desa Sese, Desa Bambapula, Desa Malala, maupun di Desa Lalos menjawab pernah melihat kemunculan dugong dalam kurun beberapa hari terakhir, dengan rata-rata jumlah kemunculan antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) ekor, Dimana waktu kemunculan pada pagi hari atau sore hari. Informasi sebaran dan waktu kemunculan berdasarkan hasil wawancara tersebut menjadi acuan bagi tim dalam melakukan pengamatan dengan aerial survei.

- Pada saat pengamatan melalui aerial survei menggunakan drone, tim menemukan kemunculan sebanyak 2 (dua) kali, yakni (1) Pada tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 05.45 WITA di lokasi Dusun Jalejje Desa Ogotua sebanyak 1 ekor ukuran dewasa dengan ciri-ciri khusus terdapat beberapa goresan pada bagian punggungnya; dan (2) Pada Tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA di Lokasi Desa Lalos sebanyak 1 (satu) ekor ukuran dewasa dengan ciri-ciri khusus terdapat sejenis lekukan pada sirip dada bagian kanan.

- Hasil pengamatan habitat lamun yang dilakukan di beberapa titik, yakni Dusun Babanji Desa Bambapua sebanyak 1 (satu) titik (3 transek); Pulau Lingayan sebanyak 3 (tiga) titik (9 transek); Dusun Jalejje Desa Ogotua sebanyak 1 (satu) titik (3 transek), dimana hasil pengamatan sementara rata-rata tutupan lamun pada keseluruhan

stasiun antara 30-60%, dengan hasil identifikasi jenis lamun terdiri dari jenis *Enhalus acoroides*, *Cymodocea rotundata*, *Thalassia hemprichii*, *Halophila ovalis*, dan *Syringodium isoetifolium*.

- Hasil pengamatan jejak makan Dusun Babanji Desa Bambapua ditemukan 3 (tiga) titik jejak makan pada kedalaman 3 Meter dengan rata-rata panjang 2,9 meter dan lebar 0,2 meter.

b) Monitoring dan Pendataan Dugong dan Habitat Dugong (Lamun) di Kab. Tahuna, Sulawesi Utara

Monitoring ini dilaksanakan pada tanggal 2 - 9 September 2024 berlokasi di Perairan Desa Barangka, Desa Kulur, Desa Lesabe, Desa Petta, Desa Likuang, Desa Naha, dan Desa Bukide Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara. Ruang lingkup kegiatan adalah pengumpulan data terkait monitoring kemunculan dugong dan habitat lamun pada lokasi DSCP sebelumnya yang meliputi: (1) Koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Sangihe dan Satuan PSDKP Tahuna; (2) Pelaksanaan Survei; dan (3) Pengolahan data dan Pelaporan Daily News.

Metode yang digunakan pada saat survei adalah metode pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, pengamatan dugong baik secara langsung maupun pengamatan dari udara menggunakan drone, sedangkan metode pengumpulan data habitat lamun menggunakan transek kuadrat sepanjang 100 meter sebanyak 3 transek dalam setiap stasiun pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh hasil sebagai berikut:



- Dari hasil wawancara yang dilakukan, keseluruhan responden menjawab pernah melihat kemunculan dugong dalam kurun beberapa hari terakhir, dengan rata-rata jumlah kemunculan antara 1 sampai 5 ekor, dimana waktu kemunculan pada saat air laut dalam kondisi pasang.



- Pada saat aerial survei menggunakan drone, tim menemukan kemunculan dugong sebanyak 4 kali dengan total jumlah sebanyak 6 ekor, yakni (1) Pada tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 15.45 WITA di lokasi Desa Lesabbe sebanyak 1 ekor ukuran dewasa; (2) Pada tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 16.05 WITA di lokasi Desa Lesabbe sebanyak 3 ekor, dimana 2 ekor merupakan ukuran dewasa, dan 1 ekor diduga ukuran anakan; (3) Pada tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di lokasi Desa Lesabbe sebanyak 1 ekor ukuran dewasa; dan (4) Pada tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 10.45



WITA di lokasi Desa Petta sebanyak 1 ekor ukuran dewasa.

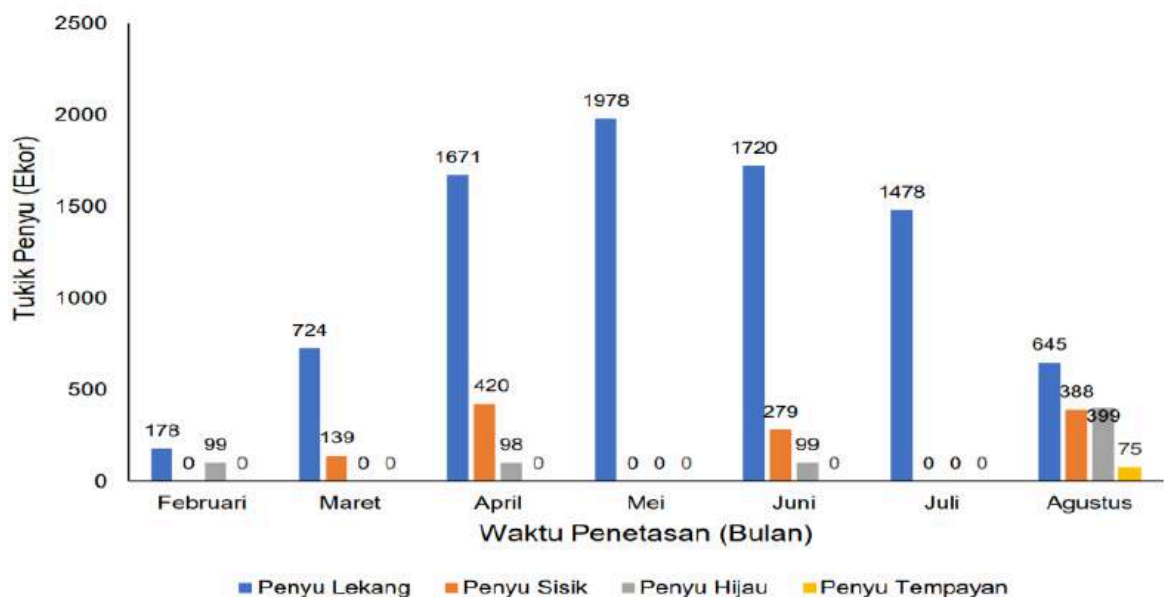
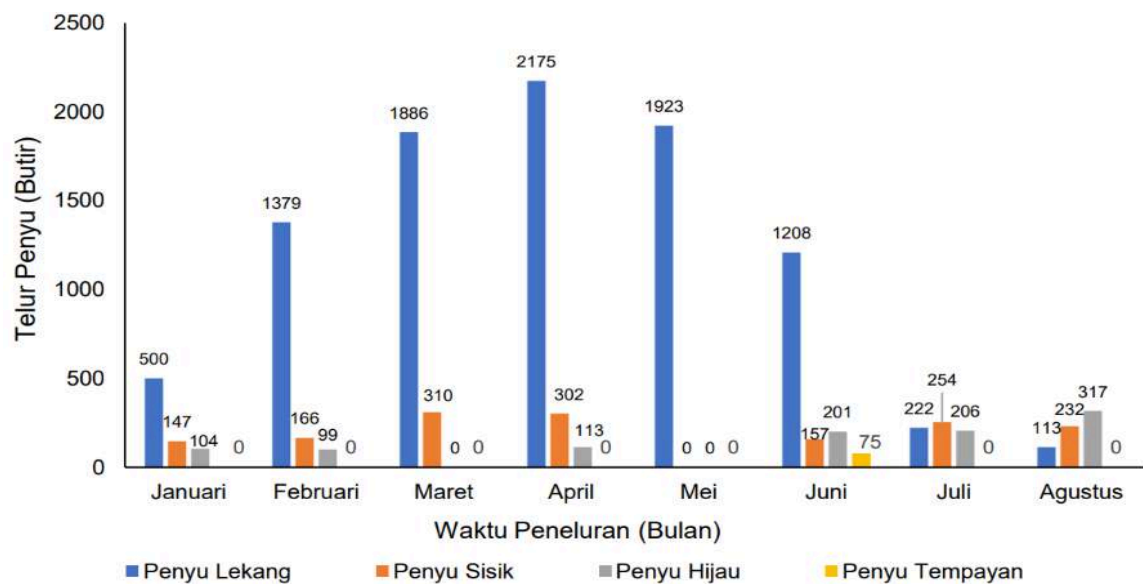
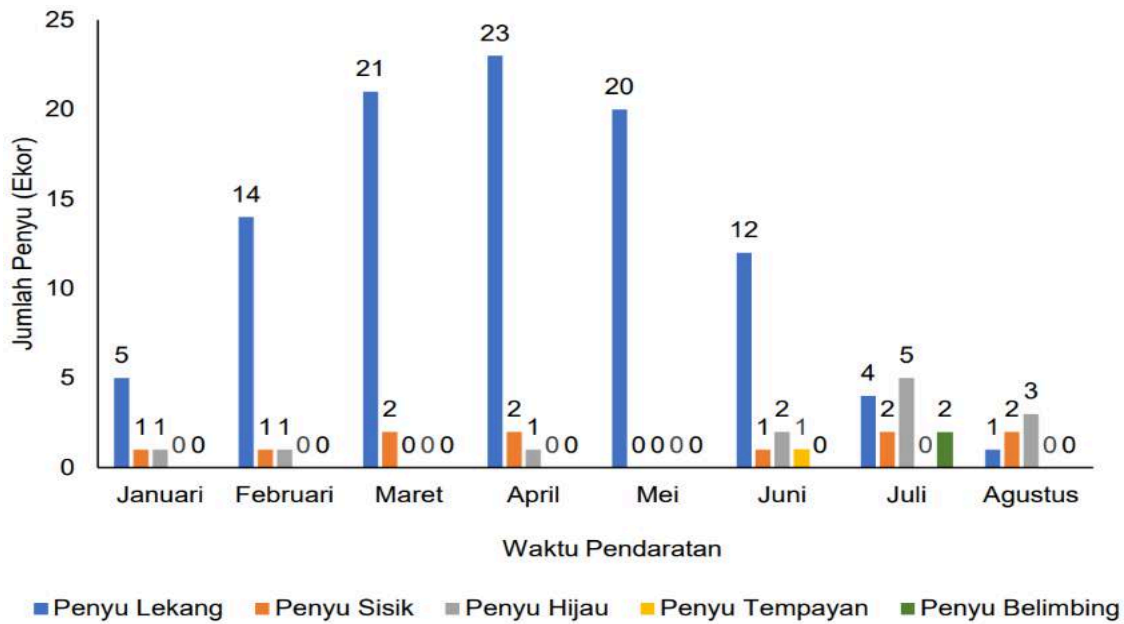
- Hasil pengamatan habitat lamun yang dilakukan di beberapa titik, yakni Desa Bukide sebanyak 1 lokasi (3 transek); dan Desa Likuang sebanyak 1 lokasi (3 transek), dimana hasil pengamatan sementara rata-rata tutupan lamun pada keseluruhan stasiun antara 30-60% dengan dominasi *Halophila ovalis*.

5) Monitoring dan Pendataan Penyu Sulawesi Utara



Monitoring dan Pendataan Penyu di Sulawesi Utara dilaksanakan pada Bulan Februari sampai dengan Desember 2024 yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. data dasar yang harus dikumpulkan dalam pemantauan Penyu adalah sebagai berikut:

- a. Spesies/Jenis Penyu;
- b. Jumlah Penyu yang mendarat;
- c. Jumlah sarang Penyu;
- d. Jumlah sarang yang aman dan yang hilang;
- e. Daya tetas telur;
- f. Masa inkubasi telur;
- g. Koordinat lokasi;
- h. Karakteristik habitat peneluran Penyu yaitu informasi tentang vegetasi di sekitar habitat/Pantai peneluran, jarak habitat peneluran ke pemukiman terdekat, Panjang Pantai, dan penggunaan lahan di sekitar habitat/Pantai peneluran; dan
- i. Ancaman/gangguan yaitu predator, abrasi, perburuan, aktivitas perikanan, pencahayaan dan lain-lain





Berdasarkan hasil pendataan penyu sampai TW III, dapat disimpulkan bahwa jenis penyu yang mendarat adalah Penyu Lekang, Penyu Hijau, Penyu Sisik, Penyu Tempayan, dan Penyu Belimbing. Jumlah penyu yang mendarat total sejumlah 127 ekor dengan jumlah terbanyak berada di Bulan April sebanyak 26 ekor. Prosentase daya tetas penyu antara 55.2% – 100%, sedangkan prosentase tukik survive antara 54.76% - 99.04%. Jenis penyu yang memiliki daya tetas dan tukik survive tertinggi adalah penyu le kang dan penyu hijau.

Terdapat vegetasi di sepanjang Lokasi yaitu Pohon Ketapang, Kelapa, Pepaya, Waru, Beringin, dan Katang-Katang. Jarak Lokasi habitat peneluran penyu dari kampung/ desa terdekat sekitar

100 m. Terdapat resort yang telah dibangun untuk kegiatan pariwisata. Ancaman terhadap habitat peneluran penyu di Lokasi pendataan yaitu abrasi Pantai, predator alami (biawak), dan akar tumbuhan yang merambat di dalam sarang.

6) Monitoring Coral Stok Centre di Malalayang dan Bokori

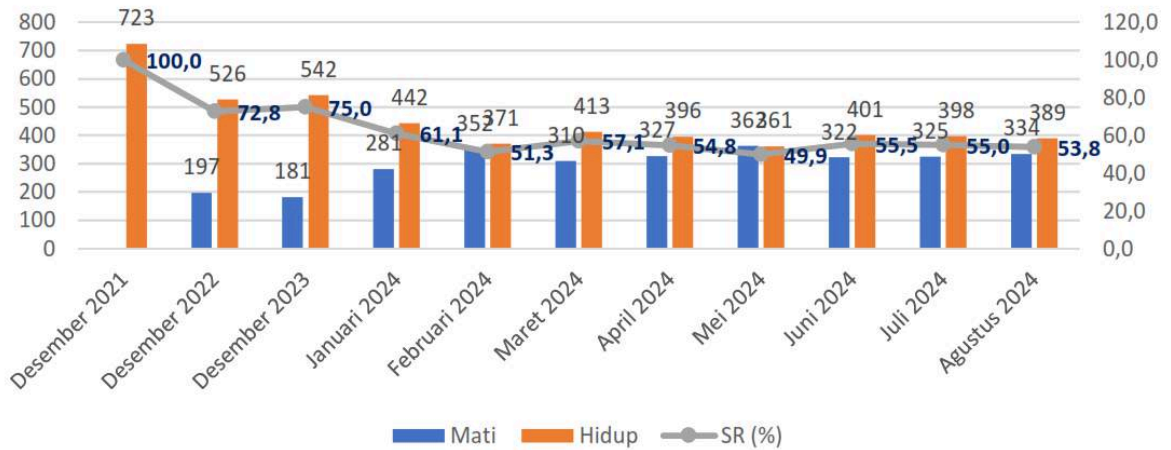
Monitoring CSC dilaksanakan di dua lokasi yaitu di CSC Malalayang dan CSC Bokori. Monitoring dilakukan setiap bulan selama setahun dan sampai dengan triwulan II telah dilakukan monitoring CSC mulai Bulan Januari s.d. Juni. Tujuan utama pelaksanaan monitoring CSC adalah untuk mengukur *survival rate* (SR), mengukur rata-rata laju pertumbuhan tiap fragmen, Pembersihan dan perawatan pada media dan fragmen, serta memonitor kemunculan biota sekitar dan data lingkungan.



CSC Bokori

Kegiatan Monitoring CSC Bokori melibatkan LP3 Universitas Muhammadiyah Kendari, Kelompok Bajo Bangkit, OK Dive Community, SDC UMK, dan UKM Selam Universitas Haluoleo, serta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone.

Tingkat Kelangsungan Hidup Berdasarkan Total Fragmen
Awal 2021 - Agustus 2024



Berdasarkan grafik di atas, Tingkat Kelangsungan Hidup atau *Survival Rate* (SR) transplantasi karang pada CSC Bokori berdasarkan fragmen yang hidup dari Desember tahun 2021 s.d. Agustus tahun 2024 adalah 53.8%. Tingkat keberlangsungan hidup tersebut cukup rendah.

Masih rendahnya tingkat kelangsungan hidup disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kondisi suhu dan salinitas perairan yang tidak sesuai dengan kondisi optimum pertumbuhan karang, dan masih tingginya volume algae yang menempel pada media dan fragmen karang sehingga berdampak pada kematian karang, di samping itu masih terdapat media yang mengalami kerusakan yang belum dilakukan pergantian fragmen secara keseluruhan.

Terdapat kemunculan berbagai biota di Coral Stock Center Pulau Bokori yang mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Juli yaitu diperoleh 10 Family biota laut dan 16 jenis biota laut yang teridentifikasi.

Diperoleh kondisi suhu perairan yaitu 27.8°C yang sudah sesuai dengan kondisi optimum pertumbuhan karang namun terdapat penurunan salinitas sebesar 34.3 sehingga tidak sesuai dengan baku mutu air laut untuk kehidupan karang, sehingga tidak sesuai dengan baku mutu air laut untuk kehidupan karang, sedangkan kondisi salinitas, PH, dan DO sesuai dengan kondisi optimum pertumbuhan karang. Sampai dengan Bulan Agustus 2024 total fragmen karang hidup setelah dilakukan penambahan/penggantian fragmen yaitu sebesar 1064 fragmen dengan rincian media rak dan spider sebanyak 472 fragmen dan 592 fragmen pada media VAR.

CSC Malalayang

Kegiatan monitoring CSC pada bulan Agustus 2024 dilaksanakan dengan melibatkan kelompok masyarakat Mudung Family. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kemampuan terumbu karang bertahan hidup (*survival rate*) untuk semua rak transplantasi didapatkan hasil **survival rate sebesar**



93.06%. Berdasarkan hasil pengukuran laju pertumbuhan karang yang dilakukan pada rak transplantasi yang diturunkan pada bulan Mei 2024 diperoleh data laju pertumbuhan paling tinggi adalah jenis karang *Acropora formosa* dengan **laju pertumbuhan sebesar 4.06 cm** dan laju pertumbuhan paling rendah adalah pada jenis karang *Pocillopora sp.* dengan laju pertumbuhan sebesar 1.86 cm; Terdapat kemunculan berbagai biota di Coral Stock Center (CSC) Malalayang pada monitoring tahap VIII bulan Agustus 2024 yaitu 9 jenis ikan karang; dan Pada monitoring tahap VIII di CSC Malalayang pada bulan Agustus 2024 dilakukan pengukuran kualitas air sebagai data pendukung. Data kualitas air yang

diukur pada kegiatan monitoring adalah suhu, salinitas, pH, dan DO (*Dissolved Oxygen*). Dari pengukuran kualitas air diperoleh data suhu 31.1 °C, Salinitas 34.1 ppt, pH 8.41, dan DO (Dissolved Oxygen) 39.6 Mg/l (ppm).

7) Respon Cepat Penanganan dan Penyelamatan Biota Laut Dan Mamalia Terdampar

Sampai dengan triwulan III terdapat beberapa kejadian respon cepat penanganan biota laut terdampar di wilayah kerja BPSPL Makassar. Berikut adalah tabel kejadian respon cepat biota laut terdampar di BPSPL Makassar s.d. Triwulan III:

Tabel 21. Rekapitulasi Respon Cepat di Wilayah Kerja BPSPL Makassar s.d. TW III

Waktu Kejadian	Lokasi	Spesies	Kondisi Ditemukan	Kondisi Dilepas	Metode Penanganan
18 Januari 2024	Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan	Penyu Hijau	Terdampar Hidup	Mati	Direhabilitasi dan pada saat dilepasliarkan kemudia mati
		Penyu Sisik	Terdampar Hidup	Hidup	Dilepasliarkan
		Penyu Lekang	Terdampar Hidup	Hidup	Dilepasliarkan
26 Januari 2024	Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat	Penyu Sisik	Mati	Mati	Dikubur
28 Januari 2024	Kab. Buton, Sulawesi Tenggara	Paus Sperma	Mati	Mati	Dibakar
30 Januari 2024	Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan	Pesut Pesisir	Tertangkap Jaring (Mati)	Mati	Dilakukan Pembinaan dan Himbauan
4 Februari 2024	Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat	Dugong	Mati	Mati	Dikubur

11 Maret 2024	Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan	Penyu Lekang	Terdampar Mati	Mati	Dikubur
24 Maret 2024	Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara	Dugong	Hidup	Hidup	Dilepasliarkan
25 April 2024	Kab. Bone Bolango, Gorontalo	Paus Sperma	Mati	Mati	Dikubur
13 Mei 2024	Kota Manado, Sulawesi Utara	Bayi Dugong	Hidup	Hidup	Dilepasliarkan
26 Mei 2024	Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat	Pari Kupu-Kupu	Hidup	Mati	Tim BPSPL Makassar Memberikan Edukasi dan Sosialisasi terkait Jenis Biota
27 Mei 2024	Kab. Mamuju, Sulawesi Barat	Penyu Hijau	Hidup	Hidup	Dilepasliarkan
31 Mei 2024	Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat	Penyu Hijau	Terdampar Mati	Mati	Dikubur
	Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat	Penyu Lekang	Terdampar Mati	Mati	Dikubur
20 Juli 2024	Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat	Dugong	Terdampar Mati	Mati	Dikubur
5 September 2024	Kab. Minahasa, Sulawesi Utara	Dugong	Terdampar Mati	Mati	Dikubur



Berdasarkan rekapitulasi data di atas dapat disimpulkan bahwa total respon cepat sampai dengan triwulan III adalah **14 kejadian** dengan kejadian paling banyak terjadi pada **Bulan Januari dan Mei dengan empat kejadian**. Respon cepat paling banyak terjadi di **Provinsi Sulawesi Barat dengan total tujuh kejadian**.

dari 14 pelaksanaan respon cepat total sudah terdapat 17 biota yang telah ditangani, dari **17 biota** tersebut yang

paling banyak adalah **Penyu dengan delapan ekor**, disusul dengan Dugong lima ekor, Paus dua ekor, Pesut satu ekor, dan Pari satu ekor. dari 17 biota tersebut, kondisi akhir **12 diantaranya sudah mati** dan sisanya masih hidup dan dilepasliarkan, sedangkan yang mati ditangani dengan dikubur serta ada yang dibakar.

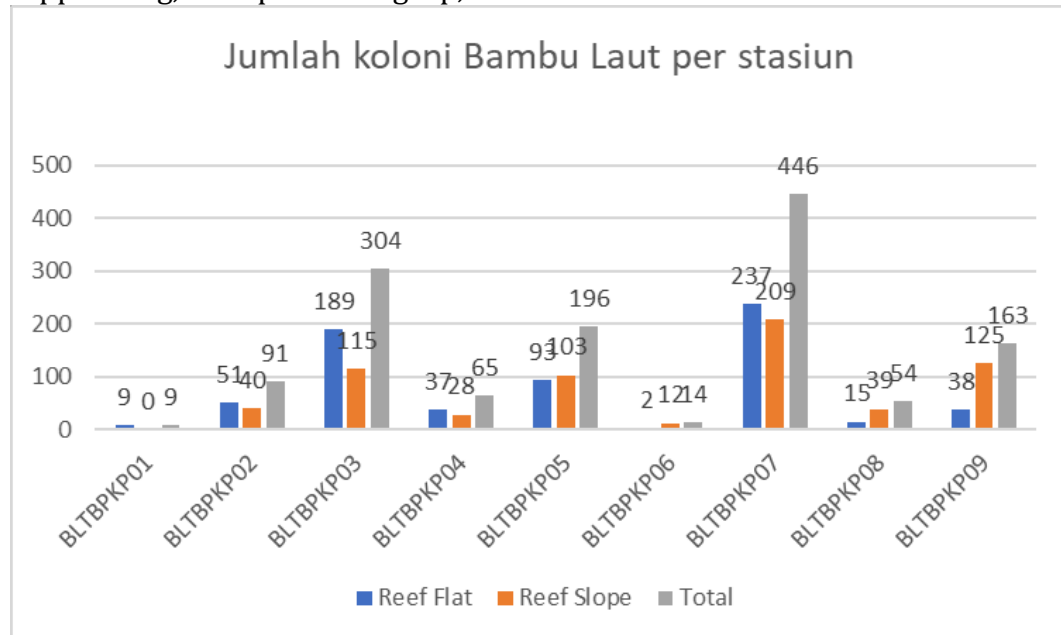
8) Survei Pendataan Populasi Bambu Laut

Survei pendataan populasi bambu laut dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Perairan Liukang Tuppabiring, Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan dan Kab. Bokori, Sulawesi Tenggara. Sampai dengan TW III telah dilaksanakan survei di Perairan Liukang Tuppabiring, Kab. Pangkajene Kepulauan.



Metode pengamatan menggunakan *Underwater Photo Transect* (UPT) sepanjang 50 meter dan pemotretan dilakukan tegak lurus substrat (jarak 60cm) seluas ukuran frame sehingga luas bidang patrean 2552cm², dengan menggunakan frame sebagai alat bantu berukuran 58 x 44 cm.

Berikut adalah hasil survei pendataan populasi bambu laut di perairan liukang tuppabiring, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan:



No.	Stasiun	Nama Lokasi	Koordinat		Total Kelimpahan		
			Bujur	Lintang	Jumlah Koloni	Kepadatan (indv/m ²)	Kategori
1	BLTBPKP01	Taka Bano-banoang	119°17'12.21"T	4°38'34.88"S	9	0,018	Jarang
2	BLTBPKP02	Taka Lappaka	119°15'59.16"T	4°39'10.97"S	91	0,182	Sedang
3	BLTBPKP03	Taka Maduraya	119°15'43.70"T	4°42'01.76"S	304	0,608	Melimpah
4	BLTBPKP04	Taka Pamangaliang	119°16'29.38"T	4°44'29.09"S	65	0,13	Sedikit
5	BLTBPKP05	Taka Sarappo Kecil 1	119°12'46.41"T	4°47'58.88"S	196	0,392	Melimpah
6	BLTBPKP06	Batu tapampang	119°14'43.36"T	4°50'57.93"S	14	0,028	Jarang
7	BLTBPKP07	Taka Sarappo Kecil 2	119°12'51.67"T	4°48'02.57"S	446	0,892	Melimpah
8	BLTBPKP08	Tinting esak	119°10'19.65"T	4°54'05.34"S	54	0,108	Sedikit
9	BLTBPKP09	paddepekang	119°17'01.10"T	4°55'27.79"S	163	0,326	Banyak

Berdasarkan grafik dan table di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Kelimpahan *Isis hippuris* (bambu laut) berdasarkan kelimpahan dari jumlah koloni yang ditemukan adalah kategori jarang sebanyak 2 stasiun, sedikit 2 stasiun, sedang 1 stasiun, banyak 1 stasiun dan melimpah 3 stasiun, secara keseluruhan kelimpahan rata-rata masuk **kategori banyak**
- Secara keseluruhan dominansi ukuran koloni bambu laut di Perairan Liukang Tupabiring masih didominasi oleh ukuran kecil 0 – 30 cm (47%).
- Hasil pengamatan di Perairan Liukang Tupabiring bambu laut tidak ditemukan pada keseluruhan terumbu karang, yang berarti bahwa tidak semua habitat terumbu karang ditumbuhi oleh bambu laut, pola sebarannya adalah distribusi mengelompok.

Selain pendataan bambu laut, dilakukan juga pendataan terumbu karang. Berdasarkan hasil pendataan didapatkan kondisi terumbu karang berada pada kondisi sedang dengan nilai prosentase rata-rata tutupan 29.09% dengan kondisi karang yang rusak di tiga setasiun dan kategori sedang di enam stasiun.

9) Edukasi Penanganan Dan Penyelamatan Biota Perairan Dan Mamalia Laut Terdampar

Sampai dengan triwulan III, telah dilakukan dua kali kegiatan Pembinaan atas kejadian pemanfaatan biota laut/ mamalia laut dilindungi di Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan pada tanggal 6 Februari 2024. Sedangkan pada tanggal 7 Maret 2024 telah dilaksanakan edukasi Penanganan Mamalia/ Biota Laut Dilindungi yang Terdampar. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat kantor bupati Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Selain pemberian materi, dilakukan juga praktik lapangan penanganan mamalia terdampar.



10) Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan dilindungi/terancam punah



Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/ atau Terancam Punah telah dilaksanakan pada 6 Februari 2024. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

7. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran untuk mendukung pencapaian IKU8 tahun 2024 adalah **Rp. 1.060.000.000**, realisasi sampai dengan triwulan III sebesar **Rp. 377.066.847**. Detail informasi pagu dan realisasi untuk mendukung IKU 8 dapat dilihat pada tabel diawah ini:

Tabel 22. Realisasi Capaian IKU 8

No	Komponen / Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Survei Pendataan Sebaran dan Populasi Banggai Cardinal Fish	145,000,000	46,793,951	32.27
2	Pendataan Dan Pemantauan Kemunculan Cetacea (LumbaLumba) di Sulawesi Selatan	70,000,000	40,886,971	58.41
3	Monitoring dan Pendataan Dugong dan Habitat Dugong (Lamun)	120,000,000	108,601,426	90.50
4	Survei Pendataan Populasi Bambu Laut	140.000.000	65,210,022	46.58
5	Monitoring Habitat Hiu Paus Gorontalo	80.000.000	61,464,926	76.83
6	Monitoring dan Pendataan Penyu di Sulawesi Utara	35,000,000	26,861,432	76.75
7	Monitoring CSC	70,000,000	47,247,200	67.49
8	Rehabilitasi Anemon Habitat BCF di Banggai	60,000,000	52,199,125	86.99
9	Respon Cepat Penanganan Dan Penyelamatan Biota Laut Dan Mamalia Terdampar	68,150,000	41,335,717	60.65
10	Edukasi Penanganan Dan Penyelamatan Biota Perairan Dan Mamalia Laut Terdampar	73,850,000	35,473,200	48.03
11	Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan dilindungi/terancam punah	200,000,000	153,316,148	76.66
JUMLAH		1.060.000.000	679,390,118	64.09

8. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU8 pada Triwulan IV Tahun 2024 antara lain: Monitoring dan Pendataan Penyu di Sulawesi Utara, Monitoring CSC, dan Monitoring BCF di Banggai

3.1.9 IKU 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)

Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/ atau look alike species (Hiu Appendiks dan Pari Appendiks)
- Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan (Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Sidat, Napoleon, dan Teripang)

Target Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Pemanfaatan adalah adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Sidat, Teripang, dan Napoleon di wilayah kerja BPSPL Makassar. Teknik menghitung capaian indikator ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan melalui Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau *look alike species*; pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dimanfaatkan; dan Verifikasi Stok Jenis Ikan di wilayah kerja BPSPL Makassar.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 23. Capaian Realisasi IKU 9

SS - 8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar							
IKU - 9	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					5	-	3	-

Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui belum terdapat realisasi capaian pada triwulan III. Hal ini karena target IKU ini adalah target tahunan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU 9 ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena pada Triwulan III sama-sama belum terdapat capaian.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi IKU 9 ini belum bisa dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi karena pada Triwulan III sama-sama belum terdapat capaian.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan dalam penerbitan surat rekomendasi dan SAJI di BPSPL Makassar adalah karena adanya pembagian jadwal yang jelas untuk petugas verifikasi. Selain itu, penggunaan satu aplikasi yaitu e-Saji untuk semua jenis permohonan pemanfaatan

jenis ikan juga membuat alur permohonan hingga penerbitan lebih efektif. Proses verifikasi jenis *look alike* seperti *soft coral* dan *anemone* dilakukan secara *online* sehingga proses verifikasi permohonan dapat dilakukan secara cepat dan relatif aman karena pada jenis *look alike* tidak dibatasi dengan kuota pengambilan dari alam yang rawan disalah gunakan oleh pelaku usaha. Tetapi untuk jenis yang masuk Appendiks CITES dan dilindungi, proses verifikasi tetap dilakukan secara langsung untuk mengantisipasi kecurangan yang dilakukan pelaku usaha.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan pelaksanaan verifikasi *soft coral* dan *anemone* secara *online* dan adanya penambahan jumlah produk maksimal yang verifikasinya dilaksanakan di kantor BPSPL Makassar, maka terdapat efisiensi anggaran berupa perjalanan dinas yang tidak perlu dibayarkan untuk pelaksanaan verifikasi *online* dan verifikasi langsung di kantor.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung progress capaian kinerja IKU5 pada tahun 2024 antara lain:

- Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan Appendiks CITES
- Penyediaan data potensi dan status populasi jenis ikan dilindungi dan Appendiks CITES berupa pemeriksaan Stock Opname ke pelaku usaha
- Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi
- Survey Populasi Bambu Laut di Konawe Selatan

1. Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi, Appendiks CITES, dan *look alike species*

Sampai dengan triwulan III Tahun 2024 telah dilakukan Pelayanan Perizinan di BPSPL Makassar berupa penerbitan **822 Surat Rekomendasi** dan **185 SAJI**, Berikut di bawah ini adalah infografis pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dengan informasi detail perizinan untuk tiap jenis ikan:



Gambar 15. Rekapitulasi Penerbitan dokumen angkut / perizinan di BPSPL Makassar

Berdasarkan infografis di atas dapat diketahui bahwa jumlah pelayanan perizinan yang paling banyak adalah dari jenis **soft coral** dengan total surat

rekomendasi yang diterbitkan sebanyak **395 Rekomendasi DN**, disusul dengan teripang, anemone, dan Hiu Pari. Sedangkan untuk Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) yang terbanyak dari jenis Hiu Pari sebanyak **139 SAJI**, disusul dengan sidat, BCF, Arwana, dan Napoleon serta Kuda Laut.

Semua bentuk pemanfaatan jenis yang masuk dalam kategori Appendix II Cites atau dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memiliki dokumen SIPJI sedangkan lalu lintasnya harus menggunakan dokumen SAJI. Terdapat perbedaan dalam penerbitan dokumen SAJI DN dan LN. Dokumen SAJI DN diterbitkan langsung oleh BPSPL Makassar melalui persetujuan kepala balai sedangkan SAJI LN diterbitkan oleh Direktorat KEBP. Perbedaan tersebut karena PNPB untuk SAJI LN dibayarkan ke Direktorat KEBP walaupun untuk verifikasi jenis yang dimohonkan sama-sama diperiksa oleh verifikator BPSPL Makassar baik untuk SAJI DN maupun SAJI LN. Berikut adalah infografis yang berisi informasi pelaku usaha yang ada di wilayah kerja BPSPL Makassar:



Gambar 16. Pelaku usaha di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

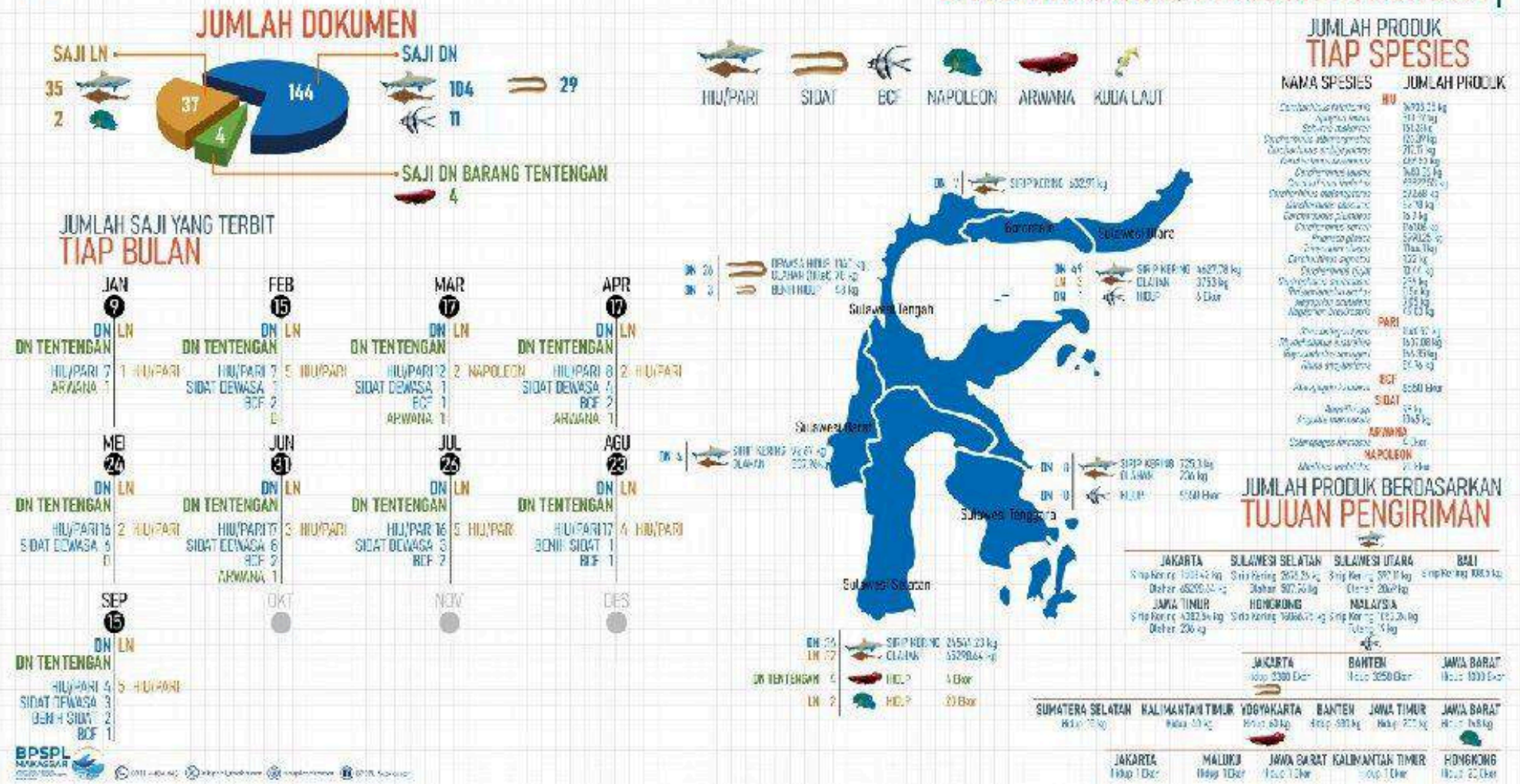
Berdasarkan infografis di atas terdapat **224 pelaku usaha aktif** yang ada di wilayah kerja BPSPL Makassar pada tahun 2024. Dari pelaku usaha di atas terdapat 61 pelaku usaha yang memiliki SIPJI. Berikut adalah infografis yang berisi pelaku usaha yang memiliki SIPJI.



Gambar 17. Pemilik SIPJI di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

Jenis-jenis biota yang termasuk ke dalam kategori Appendix II Cites dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus menggunakan SIPJI dalam pemanfaatannya yang menggunakan SAJI sebagai dokumen angkutnya. Jenis ikan yang berdasarkan kategori di atas yang diedarkan di wilayah kerja BPSPL Makassar melalui penerbitan dokumen SAJI antara lain: **Hiu dan Pari Appendix, Sidat, BCF, dan Arwana serta Napoleon.** Untuk detail produk pengirimannya bisa dilihat di infografis di bawah ini

REKAPITULASI PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN (SAJI) DI BPSPL MAKASSAR, TRIWULAN III TAHUN 2024



Gambar 18. Rekapitulasi Penerbitan SAJI di BPSPL Makassar

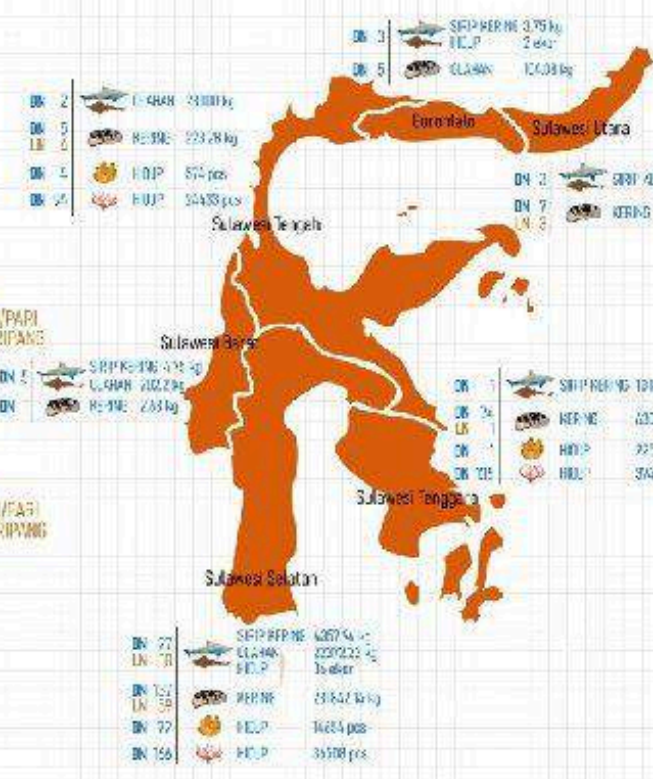
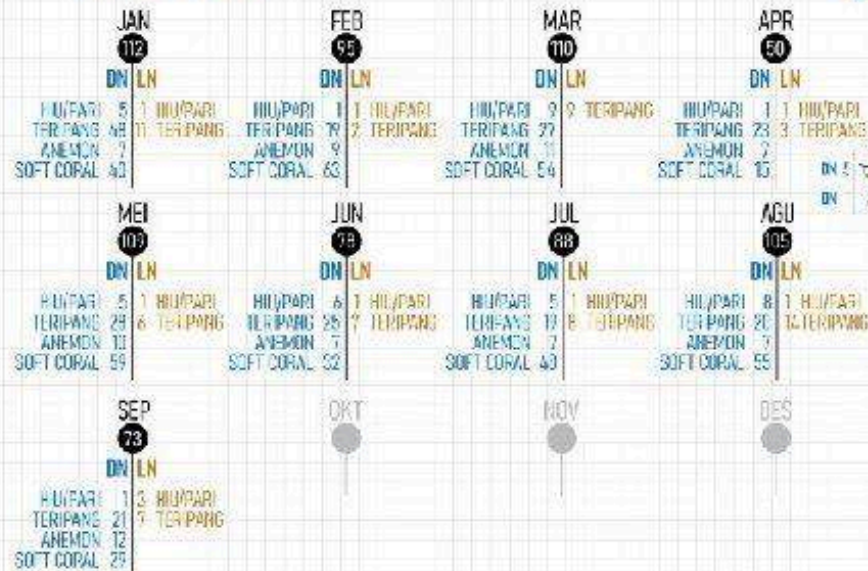
REKAPITULASI PENERBITAN SURAT REKOMENDASI DI BPSPL MAKASSAR, TRIWULAN III TAHUN 2024



JUMLAH PRODUK TIAP JENIS

OLAHAN	SIRIP KERING	HICUP
DN: 45574.47 kg	DN: 78.62 kg	DN: 38 ekor
LN: 0	LN: 4309.65 kg	LN: 0
OLAHAN	KERING	
DN: 0	DN: 279831.96 kg	
LN: 0	LN: 18723 kg	
HICUP	HICUP	
DN: 15453 pcs	DN: 50625 pcs	

JUMLAH REKOMENDASI YANG TERBIT TIAP BULAN



JUMLAH PRODUK BERDASARKAN TUJUAN PENGIRIMAN

JAKARTA Sirip Kering: 57.38 kg Udang: 222262 kg Ikan: 7 ekor	JAWA TENGAH Sirip Kering: 2833 kg	JAWA BARAT Udang: 2 ekor
JAWA TIMUR Sirip Kering: 13.75 kg	HONGKONG Sirip Kering: 10328 kg	SULAWESI SELATAN Sirip Kering: 425 kg Udang: 2822 kg
BALI Ikan: 38 ekor	MALAYSIA Sirip Kering: 54.7 kg	
JAKARTA Kering: 2087.81 kg	MALAYSIA Kering: 46795 kg	JAWA TIMUR Kering: 18277.41 kg
SINGAPURA Kering: 285214 kg	SULAWESI SELATAN Kering: 4584 kg	KEP. RIMA Kering: 14107.42 kg
JAKARTA Udang: 523 pcs	BALI Udang: 1207 pcs	BANTEN Udang: 815 pcs
JAWA BARAT Udang: 71 pcs	JAWA TIMUR Udang: 19 pcs	
JAKARTA Udang: 4370 pcs	BALI Udang: 2124 pcs	BANTEN Udang: 2875 pcs

Gambar 19. Rekapitulasi Penerbitan SAJI di BPSPL Makassar

Informasi detail mengenai jumlah produk, asal pengiriman, dan tujuan pengiriman dapat diketahui melalui infografis di atas. Detail informasi tiap bulan dan tiap spesies juga terdapat pada infografis di atas.

Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang ditemui, antara lain:

- A. Ketidaksiplinan pengusaha dalam mengikuti SOP pelayanan BPSPL Makassar
- B. Ketiadaan petugas BPSPL Makassar di beberapa pintu keluar
- C. Keterlambatan dalam penerbitan dokumen SAJI atau SR
- D. SOP belum terimplementasikan dengan baik oleh petugas pelayanan
- E. Terdapat protes dari pelaku usaha terkait proses pelayanan perizinan yang diberikan bahkan sampai berujung protes keras yang berpotensi konflik.

BAP Stock Bulanan



Selain pelayanan perizinan, dilakukan juga kegiatan BAP Stock Opname dilakukan untuk memverifikasi jumlah jenis ikan khususnya yang terkategori appendix cites untuk memastikan jumlah stock yang tersedia dengan sisa kuota yang telah direalisasikan. Sedangkan untuk jenis *look alike* verifikasi dilakukan untuk memastikan jumlah produk di gudang walaupun tidak ada kuota untuk jenis *look alike*. Pelaksanaan BAP Stock

dapat dijadikan sebagai monitoring kepatuhan pengusaha, karena hasil pelaksanaan BAP Stock dapat mengindikasikan apabila ada pemanfaatan yang illegal.

Sampai dengan TW III, telah dilakukan kepada BAP Stock kepada **31 pelaku usaha**. BAP Stock ini dilakukan kepada 26 pelaku usaha hiu pari, dua pengusaha sidat, dan tiga pengusaha BCF. Berikut adalah hasil pendataan BAP Stock s.d. TW III:

No	Pelaku Usaha	Hasil BAP Stock						
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agsts	Sept
1	CV. Elitism Makassar	44.66	44.49	88.98	-	43.36	-	-
2	CV. Karya Murni	8865.07	2805.26	86884.78	15865.95	16834.73	5894.63	-
3	CV. Michelle Abadi	0	42.5		-	43.65	-	10.55
4	CV. Semangat Kawan Sejati Baru	4529.14	5231.02	13967.58	-	-	3096.84	2967.9
5	Hetty Liemen	115.66	-	-	-	-	-	-

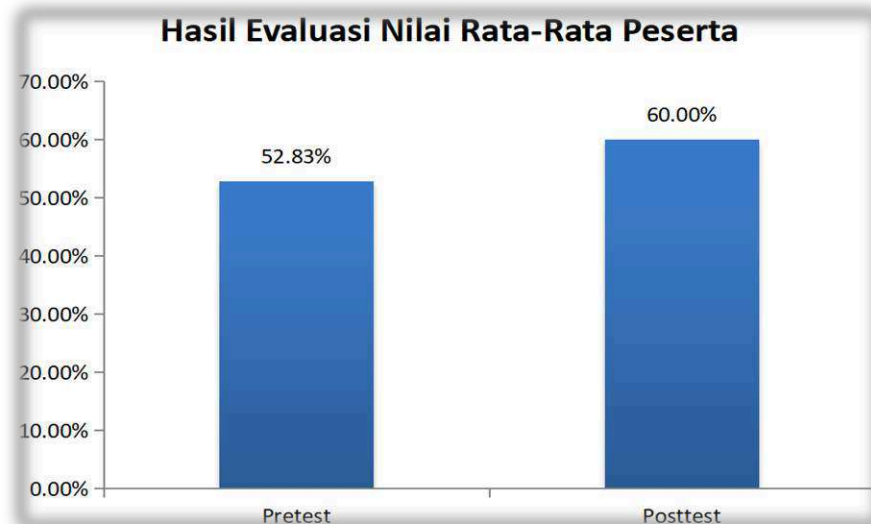
6	Muh Ibnu Fajar Ishak	77.41	0	-	-	66.1	-	-
7	PT Karya Nelayan Paotere	255.94	9.06	138.43	5.23	5.22	38.19	474.86
8	PT. Rohtadi	17161	14290.62	53250.34	-	-	-	-
9	Sandri Tandris	20.72	-	0	-	57.21	-	-
10	Tachmiyatul Chodiyah	55.314	50.92	91.2	-	22.35	118.96	-
11	UD. Sumber Laut	78.56	12.22	44.48	221.59	29.64	19.47	-
12	Widiawati Lawendatu	100	-	-	-	-	-	-
13	Abdul Malik	-	193.05	-	-	-	-	-
14	CV Karya Nelayan	-	302.59	-	290.36	227.88	-	1182.23
15	CV. Berkah Samudera Mandiri	-	5301	4721.8	-	1625	-	10187
16	La Nari	-	118	183	183	173	-	-
17	Rizal	-	311	-	-	-	-	-
18	Hetty Liemen	-	-	293.18	-	123.51	22.16	185.36
19	Sutierlan	-	-	96.6	-	-	-	-
20	Handri	-	-	60	200	-	-	-
21	PT. Dinar Darum Lestari	-	-	0	-	-	2975	2975
22	UD. Kencana Laut Persada	-	-	0	-	-	500	-
23	UD. Lestari Aquatika	-	-	0	-	-	-	-
24	Handri	-	-	-	200	-	-	-
25	CV Sumber Bahari Mandiri	-	-	-	1565.8	-	360.41	1622.85
26	Tendean Ris Engahu	-	-	-	62.43	57.37	-	-
27	Amir	-	-	-	-	12.83	-	-
28	CV Graha Sidat Mandiri	-	-	-	-	10.05	-	-
29	Sutiarlan Lengkas	-	-	-	-	0.8	-	-
30	UD Nirwana Samudra	-	-	-	-	-	-	3.08
31	UD Prames Baruna Mandiri	-	-	-	-	-	-	176.02

2. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi



Sosialisasi pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilaksanakan untuk menunjang kelestarian dan ketelusuran jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix Cites sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum

Dalam Appendix Cites. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, BPSPL Makassar sudah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan di Wisata Pantai Galesong, Desa Sampulungan Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan dengan total peserta sebanyak 75 orang. Kegiatan diikuti oleh berbagai stakeholder yang terkait dengan pemanfaatan jenis ikan meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, Pangkalan PSDKP Bitung Satwas Takalar, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan, Polairud Makassar, Lantamal, Penyuluh, pengepul/pelaku usaha dan nelayan.



Terdapat pre test dan post test untuk mengetahui peningkatan penyadartahuan pada peserta sosialisasi. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan, kegiatan sosialisasi menambah pengetahuan peserta terkait dengan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau termasuk Appendixs CITES.

3. Penyedia Data Sebaran dan Status Populasi Jenis Ikan Dilindungi/ Terancam Punah

Kegiatan penyedia data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/terancam punah berupa kegiatan pendataan enumerator pada lokasi-lokasi pendaratan yang sudah ditentukan. Pada tahun 2024, dilakukan pendataan pada tiga jenis biota yaitu Hiu Pari, Sidat, dan Teripang. Pendataan dilakukan pada lokasi-lokasi antara lain:

1. Pendataan Hiu Pari:

Pendataan hiu pari dilakukan di empat Lokasi yaitu di kab. Takalar, Kab. Luwu Timur, Kab. Luwuk Banggai, dan Pulau Ambo. Berikut adalah hasil pendataan hiu pari di empat Lokasi sampai dengan Triwulan III:

- a. Pendataan Hiu Pari di TPI Beba, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan: Jumlah total Hasil pendataan pendaratan Hiu mulai Bulan Maret - Agustus adalah 3614 Kg (368 ekor), sedangkan Jumlah total Pari yang didaratkan dari Bulan Maret - Agustus adalah 4430 kg (477) ekor.
- b. Pendataan Hiu Pari di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah:

Total produk sirip Hiu dari bulan Maret - Agustus berdasarkan jumlah individunya sebanyak 741 ekor dengan berat total 212,75 Kg. Ttotal produk daging Hiu dari bulan Maret - Juli sebanyak 38.00 Kg. Total

produk sirip pari dari bulan Maret – Agustus berdasarkan jumlah individunya sebanyak 40 ekor dengan berat total 18,98 Kg. Total produk daging pari dari bulan Maret – Agustus sebanyak 49 Kg.

Total jumlah jenis Hiu selama bulan Maret-Juli 14 jenis, sebanyak 10 diantaranya telah teridentifikasi sedangkan 4 jenis lainnya belum teridentifikasi. *Alopias Sp.*, *C. brevipinna*, *C. falciformis*, *C. leucas*, *C. limbatus*, *C. melanopterus*, *G. cuvier*, *P. glauca*, *S. mokarran*, dan *T. obesus*. Sedangkan jenis yang belum teridentifikasi berupa produk daging adalah Sp.1, Sp.2, Sp.3 dan Sp.4. Total jumlah jenis Pari selama bulan Maret-Juni sebanyak 10 jenis, terdapat 5 jenis diantaranya telah teridentifikasi, *Glaucostegus sp.*, *Himantura Sp.*, *N. orientalis*, *R. ancylotoma* dan *Rhynochobatus Sp.* Sedangkan jenis yang belum teridentifikasi berupa produk daging adalah Sp.1, Sp.2, Sp. 3, Sp. 4 dan Sp.5

Berdasarkan jumlah tangkapan, jenis Hiu yang dominan dimanfaatkan mulai dari bulan Maret-Agustus adalah *C. melanopterus* sebanyak 222 ekor dengan berat 26,46 Kg. Jika berdasarkan berat total tangkapan, maka jenis hiu yang paling dominan adalah jenis *C. falciformis* sebanyak 216 ekor dengan berat total mencapai 116,13 Kg. Perbedaan jumlah ini dipengaruhi oleh ukuran sirip Hiu yang diperoleh. Berdasarkan jumlah tangkapan, jenis Pari yang dominan dimanfaatkan selama bulan Maret-Agustus adalah *Rhynochobatus Sp.* sebanyak 29 ekor dengan berat total sebanyak 7,97 Kg. Jika berdasarkan berat total tangkapan, maka produk daging Pari (jenis Sp.4) dari pulau Diolan merupakan jenis paling dominan yang dimanfaatkan. Total berat Jenis Sp.4 sebanyak 21,54 Kg

c. Pendataan Hiu Pari di TPI Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan:

Jumlah keseluruhan hasil tangkapan hiu di bulan Agustus 2024 yaitu sebanyak 36 ekor dengan berat total sebanyak 223,3 Kg, dengan empat jenis hiu yang berbeda-beda. Diantaranya yaitu *Carcharhinus brevipinna* sebanyak 22 ekor dengan berat 136,3 Kg, *Carcharhinus limbatus* sebanyak 11 ekor dengan berat 66,5 Kg, *Carcharhinus amblyrhynchoides* sebanyak 2 ekor dengan berat 10 Kg dan *Carcharhinus leucas* sebanyak 1 ekor dengan berat 10,5 Kg. Jumlah keseluruhan hasil tangkapan pari di bulan Agustus 2024 sebanyak 65 ekor dengan 7 jenis pari yang berbeda-beda diantaranya yaitu 7 ekor *Pateobatis jenkinsii* dengan berat 60, *Neotrygon orientalis* 31 ekor dengan berat 33,5 Kg, *Taeniura lymma* 4 ekor dengan berat 6,7 Kg, *Himantura Undulata* dengan berat 154,9 Kg, diantaranya yaitu *Pateobatis jenkinsii* sebanyak 9 ekor dengan berat 136,3 Kg, *Himantura Uarnak* 10 ekor dengan berat 74 Kg, *Rhynochobatus cf granulates australiae* 1 ekor dengan berat 14 Kg. Dari hasil diatas di simpulkan bahwa jenis ikan Pari yang banyak tertangkap oleh nelayan di Kecamatan Wotu yaitu jenis pari *Neotrygon Orientalis* 31 ekor, sehingga populasi yang paling banyak di sekitar perairan Wotu yaitu *Neotrygon Orientalis* dari informasi para nelayan dan pengasap ikan pari jenis *Neotrygon Orientalis* juga merupakan jenis pari terlaris yang didagangkan di pasar tradisional terdekat.

- d. Pendataan Hiu Pari di Pulau Ambo, Sulawesi Barat:
Pendataan di Pulau Ambo hanya terdapat jenis hiu, berdasarkan grafik di atas total pendaratan Hiu adalah **17 ekor** dengan species dominan *Charcarinus falciformis* sebanyak **12 ekor** dan pendaratan baru terdapat **di Bulan Mei**.

2. Pendataan Sidat di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

Penangkapan glass eel dilakukan di muara Sungai Poso, Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara pada tanggal 5-7 (1-3 Hijriah) Agustus 2024. Total hasil tangkapan 3 malam berturut-turut sejumlah 1.149 ekor dengan rata-rata 383 ekor / malam. Kepadatan rata-rata per meter persegi per malam sebanyak 3 ekor.

Hasil tangkapan sidat dewasa tanggal 1 hingga 31 Agustus 2024 total 97,3 Kg / 27 individu dengan rata-rata berat 3,6 Kg / individu semuanya merupakan spesies *Anguilla marmorata*.

Hasil tangkapan sidat dewasa sebelumnya pada bulan Maret 2024 berjumlah 125,7 Kg / 41 individu, hasil tangkapan sidat dewasa bulan April 2024 berjumlah 235,3 Kg / 61 individu dan hasil tangkapan sidat dewasa bulan Mei 2024 berjumlah 235,7 Kg / 54 individu, hasil tangkapan sidat dewasa bulan Juni 2024 berjumlah 203,1 Kg / 41 individu, hasil tangkapan sidat dewasa bulan Juli 2024 berjumlah 185,2 Kg / 39 individu, dan hasil tangkapan sidat dewasa bulan Agustus 2024 berjumlah 97,3 Kg / 27 individu. Total hasil tangkapan sidat dewasa bulan Maret hingga Agustus 2024 berjumlah 1.082,3 Kg / 263 individu.

Hasil tangkapan sidat dewasa yaitu pada stadia yellow eel dan silver eel dengan berat 1,2 - 10,2 Kg dengan panjang 86 - 121 cm semuanya dimanfaatkan sebagai sumber makanan.

3. Pendataan Teripang di Pulau Barranglompo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Telah teridentifikasi 23 jenis teripang pada bulan juli, dimana 5 diantaranya adalah jenis teripang dengan kategori Appendiks II, sedangkan jumlah species yang teridentifikasi dari Bulan Maret - Juli adalah sebanyak 30 jenis. Jumlah total Hasil pendataan pendaratan teripang mulai Bulan Maret Agustus adalah 45.689,23 kg (138.614,4 individu) dengan jenis yang dominan yakni *Stichopus Naso* dan terendah yakni jenis *whitmae*.

Jumlah total Hasil pendataan teripang kategori Appendiks II mulai Bulan Maret - Agustus adalah sebesar 9.308,8 kg (9.387 individu) yang di dominasi oleh jenis *Holothuria Fuscogilva*

4. Survei Pendataan Populasi Napoleon

Survei Pendataan Populasi Napoleon dilakukan di dua lokasi yaitu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Survei pendataan ini sebagai variabel pendukung penentuan kuota pemanfaatan Napoleon di Sulawesi. Survei tersebut sudah dilaksanakan di semua lokasi sampai dengan triwulan III.

A) Survei Pendataan Populasi Napoleon di Sulawesi Selatan

Berikut adalah hasil pendataan napoleon di Kab. Sinjai:

No	Stasiun	Jumlah Ikan (ind)	Area Sensus (Ha)	Kepadatan (ind/ ha)	Kondisi Karang	Status Populasi
1	Taninting	18	2	9	Sedang - Baik	Normal

2	Makkoddang 1	7	1.64	4.27	Sedang - Sangat baik	Membaik
3	Makkoddang 2	4	1.51	2.65	Sedang	Mulai Membaik
4	Larearea	11	1.04	10.58	Sedang - Baik	Melimpah
5	Bunging Pare'e	8	1.59	5.03	Baik - Sangat baik	Membaik
6	Marempu	6	1.68	3.57	Buruk - Baik	Mulai Membaik
7	Pasiloange	2	0.49	4.08	Sedang - Baik	Membaik
8	Susunang	3	1.23	2.44	Sedang - Baik	Mulai Membaik
TOTAL		59	11.18			
Kepadatan Rata-rata				5.28		Membaik

Berdasarkan hasil pendataan di atas didapatkan status populasi dalam kategori **membaik** dengan **kepadatan rata-rata 5.28** di mana kepadatan paling tinggi terdapat di stasiun **Larearea dengan kepadatan 10.57 ind/ ha** dengan status **populasi melimpah**.

Sedangkan hasil pendataan di Liukang Tuppabiring adalah sebagai berikut:

No	Stasiun	Jumlah Ikan (ind)	Area Sensus (Ha)	Kepadatan (ind/ ha)	Kondisi Karang	Status Populasi
1	Taka Iuara	32	2.76	12	Sedang - Sangat baik	Melimpah
2	Pulau Salebo	37	1.76	21.02	Sedang - Sangat baik	Melimpah
3	Taka Lappaka	6	2.21	2.71	Baik	Mulai Membaik
4	Taka Madurayya	16	1.76	9.09	Sedang - Sangat baik	Normal
5	Samatellu Lompo	24	1.92	12.50	Sedang - Baik	Melimpah
6	Gusung Bontosua	7	2.06	3.40	Buruk - Baik	Mulai Membaik
7	Taka Tintingang Esak	31	1.83	16.94	Sedang - Sangat baik	Melimpah
8	Taka Bone	1	1.68	0.60	Sedang - Sangat baik	Kritis
9	Taka Paddepekang	13	1.62	8.02	Sedang - Baik	Normal
TOTAL		167	17.6			
Kepadatan Rata-rata				9.49		Normal

Berdasarkan hasil pendataan di atas didapatkan status populasi dalam kategori **normal** dengan **kepadatan rata-rata 9.49** di mana kepadatan paling tinggi terdapat di stasiun **Larearea dengan kepadatan 21.02 ind/ ha** dengan status **populasi melimpah**. Dari hasil pendataan di atas didapatkan bahwa kondisi status populasi di Liukang Tuppabiring lebih baik daripada di Kab. Sinjai.

Walaupun terdapat stasiun yang kategori kritis di Liukang Tuppabiring, namun kondisi di stasiun didominasi dengan kondisi melimpah, hal itu membuat status populasinya dalam kondisi normal.

B) Survei Pendataan Populasi Napoleon di Sulawesi Tenggara

Berdasarkan hasil survei populasi ikan Napoleon di perairan Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana diperoleh hasil sebagai berikut:

- Survei populasi Ikan napoleon dilakukan dengan metode Snorkeling Visual Census (SVC) pada 9 lokasi survei yang dilakukan di Kecamatan Pasarwajo (Kondowa, Saragi, Pasarwajo, Holimombo, Holimombo Jaya) dan Kec. Wabula (Bajo Bahari, Wasuemba, Wasampela, dan Koholimombo);
- Ikan napoleon ditemukan di perairan Kec. Wabula dengan total 24 ekor yang tersebar di 4 lokasi sedangkan di perairan Kec. Pasarwajo tersebar di 3 lokasi dari 5 lokasi survei dengan jumlah 7 ekor.
- Hasil pendataan ikan Napoleon dengan Snorkeling Visual Census (SVC), di perairan Pasarwajo dan Wabula Kab. Buton dengan total lokasi pengamatan sebanyak 9 lokasi diperoleh sebanyak 31 ekor dengan total luasan area lintasan survey yaitu 13,15 hektar, dengan total kepadatan ikan napoleon di perairan Kab. Buton yaitu 2,36 ekor/ha dengan kategori populasi yang “masih rentan dan mulai membaik” dengan tingkat kepadatan “sangat rendah”.
- Tingkat kepadatan ikan Napoleon di perairan Buton bervariasi mulai dari tingkat kepadatan sangat rendah (<2 ekor/ha) yang terdapat di daerah Wasuemba, Holimombo, Halimombo Jaya, Saragi, dan Pasarwajo, tingkat kepadatan rendah (2,1 – 4 ekor/ha) pada lokasi Kondowa dan Wasampela, sedangkan tingkat kepadatan tinggi (6,1 – 8 ekor/ha) pada lokasi Koholimombo dan tingkat kepadatan sangat tinggi (> 8 ekor/ha) terdapat pada lokasi Bajo Bahari;
- Dilihat dari ukuran ikan napoleon yang teridentifikasi di perairan Kab. Buton bervariasi mulai dari fase Juvenil sampai dengan Dewasa yang siap matang gonad dengan ukuran fase Juvenil berkisar antara 15 – 30 cm, sedangkan fase dewasa berkisar antara 35 – 55 cm. Ikan napoleon di perairan kab. Buton didominasi oleh ikan napoleon fase Juvenil yaitu 68% yaitu 21 ekor sedangkan fase dewasa teridentifikasi sebanyak 10 ekor atau 32%.
- Status populasi ikan napoleon dari tahun 2014 sampai dengan 2024 yaitu terjadi peningkatan status populasi dari 0,76 ekor/ha pada tahun 2014 dengan kategori populasi yang “sangat kritis” dengan kepadatan “sedang” Survei Pendataan Populasi Ikan Napoloen (*Cheilinus undulatus*) di Perairan Kab. Buton Tahun 2024 50 menjadi 2,36 ekor/ha pada tahun 2024 dengan kategori populasi yang “masih rentan dan mulai membaik” dengan tingkat kepadatan “sangat rendah”.

- Belum ada pemanfaatan ikan napoleon untuk tujuan perdagangan di Kab. Buton, namun terdapat nelayan dari luar yang mencari ikan Napoleon sebagai target tangkapan



G. Realisasi Anggaran

Tabel 24. Realisasi Anggaran IKU 5

No	Komponen / Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Penyedia Data Sebaran dan Status Populasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	266,470,000	195,555,236	73.39
2	Survei Pendataan Populasi Napoleon	140,000,000	133,469,155	95.34
3	Survei Pendataan Populasi Glass Eel di Muara Sungai Poso Sulawesi Tengah	33,530,000	32,974,582	98.34
4	Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Laut	445,600,000	262,999,406	59.02
5	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan	116,316,000	115,656,855	99.43
JUMLAH		1.190,000,000	898,139,894	75.47

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat realisasi anggaran triwulann III Tahun 2024 adalah **Rp.898.139.894 - atau 75.47% dari Pagu Rp.1.190.000.000,-**.

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU9 pada Triwulan IV Tahun 2024 adalah pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan

jenis ikan dilindungi, Penyedia data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/terancam punah, dan BAP Stock Bulanan.

3.1.10 IKU10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar

Identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah tindakan mencari data dan informasi yang menghasilkan produk dan/atau jasa yang akan didorong proses perizinannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengurusan perizinan air laut selain energi. Teknik penghitungan IKU ini adalah dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi. Kegiatan untuk mendukung IKU ini adalah dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Identifikasi di Sulawesi Selatan.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 25. Capaian Realisasi IKU 10

SS - 9		Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar						
IKU - 10		Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)						
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					1	-		

Target IKU ini adalah target tahunan sehingga belum ada capaian sampai dengan Triwulan III 2024.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena pada Triwulan III sama-sama belum terdapat capaian dan IKU ini adalah Indikator Kinerja yang baru terdapat di Tahun 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Belum terdapat realisasi kinerja pada triwulan III untuk dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi yang terdapat di renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor penyebab keberhasilan dari pemenuhan Indikator Kinerja ini adalah koordinasi yang baik dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terkait pendataan pemanfaatan air laut selain energi yang ada di wilayah kerjanya untuk dilakukan sosialisasi. Selain itu, penyusunan juknis dari Direktorat Jasa Kelautan juga perlu diakselerasi untuk disampaikan pada kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan pada triwulan III

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum ada efisiensi sumber daya yang dicapai untuk pelaksanaan kegiatan

yang mendukung IKU ini sampai dengan Triwulan III

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

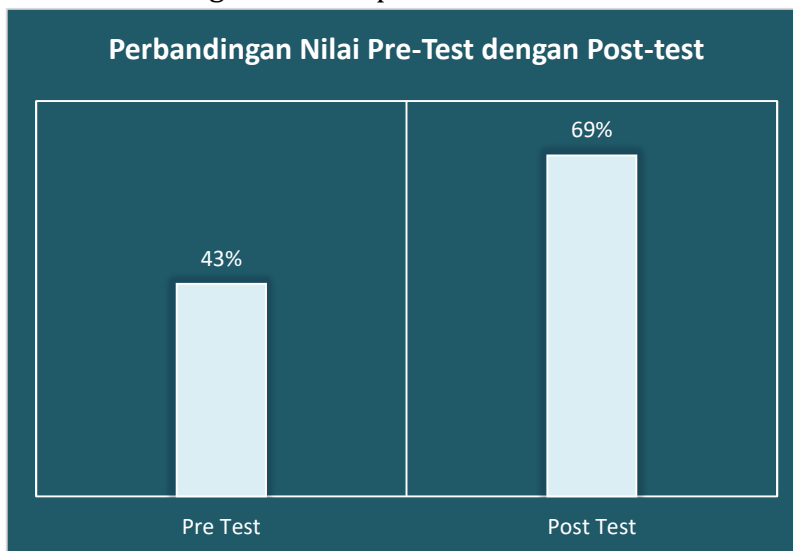


Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IKU ini adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan identifikasi pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE).

Sosialisasi Pemanfaatan ALSE dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2024 di Hotel Novotel Makassar. Sosialisasi ini diadakan secara hybrid (luring dan daring). Pada

kegiatan sosialisasi ini melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan dan Para Pelaku Usaha yang memanfaatkan air laut selain energi di wilayah kerja BPSPL Makassar dengan narasumber dari Direktorat Jasa Kelautan dan Akademisi. Pada sosialisasi ini disampaikan beberapa materi antara lain:

- Panduan Izin Pemanfaatan ALSE oleh Bapak Muhaammad Zakin Mahasin, Direktorat Jasa Kelautan, Direkotrat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
- Perizinan Berusaha Bidang Jasa Kelautan oleh Hendra Nurcahyo, Direktorat Jasa Kelautan, Direkotrat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
- Kajian Ilmiah Kebutuhan Air Bagi Tambak Sistem Intensif serta Kondisi Eksisting Tambak Intensif di Sulawesi Selatan oleh Dr. Ir. Andi Tamsil, MS. IPM – Dosen Fakultas dan Perikanan Universitas Muslim Indonesia dan Pengurus Shrimp Club Indonesia.



Setelah pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, serta untuk mengukur Tingkat pemahaman peserta sosialisasi, maka diberikan pre test dan post test.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pre-test dan post-test didapatkan peningkatan nilai pemahaman peserta sebesar 26% dari 43% menjadi 69%

Identifikasi pemanfaatan Air Laut Selain Energi dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang memanfaatkan air laut selain energi yang sudah memiliki izin KKPR dan ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Sampai dengan triwulan III identifikasi telah dilakukan kepada 18 pemanfaat. Berikut adalah rekapitulasi hasil identifikasi pemanfaatan ALSE:

Tabel 26. Hasil Identifikasi ALSE

PELAKU USAHA	JUMLAH TANDON	JUMLAH TAMBAK / KOLAM	TAMBAK/ KOLAM TERMANFAATKAN	LUAS RATA-RATA JUMLAH TAMBAK/ KOLAM (M ²)	KETINGG IAN AIR (CM)	PENGISIAN/ PENAMBAHAN AIR (PERHARI/ PERPEKAN)	SIKLUS BUDIDAYA DALAM SETAHUN**
Balai Budidaya Perikanan Air Payau Takalar	1	3	3	Diameter 10 m	300	100%	1
	-	4	4	4000	120	15-20%	2
	-	3	3	900	80	15-20%	1
CV Punaga Agung	-	1	1	± 42.000	120-250	15-20%	2
	-	1	1	± 250.000	120-250	15-20%	2
CV Gapura	-	1	1	± 90.000	120-250	15-20%	2
CV Senada Horta	-	6	6	Diameter 16	200	10%	2-3
PT Tritunggal Cemerlang	-	6	6	Diameter 30	-	-	-
PT Dhani Yuwono	-	25	25	4000	130	10%	2
PT Arung Bonto Bahari	-	32	32	3750	120	2.5%	2
PT Gosyen Global Aquaculture	-	35	35	4000	170	11.8%	2
PT Dua Lima Satu Dua	-	89	89	3707.9	150	5%	2
PT Sinar Sukses Persada	-	22	22	3636.4	220	10%	2
PT Don Udang Aquaculture	-	1	1	55000	100-150	20%	2
PLTU Punagaya PT PLN Nusantara Power	perusahaan telah memiliki persetujuan KKPRL untuk area pipa pemasukan air laut dan fasilitas terminal khusus. Terdapat 2 (dua) mesin pembangkit dan menggunakan 4 unit mesin pompa kapasitas 12.607 m ³ /Jam. Estimasi kebutuhan air laut sebanyak 583.314 m ³ /hari, mesin pompa beroperasi 24 jam. Pipa intake berdiameter ± 2000 mm (79") sebanyak 2 pipa yang menyalurkan air laut ke dalam saluran. Sistem pemanfaatan menggunakan sistem sirkulasi, air laut mengalir melalui pipa untuk mendinginkan peralatan, air kemudian dilakukan treatment sebelum dibuang ke laut						
PLTU Jeneponto PT Bosowa Energi	perusahaan belum memiliki persetujuan KKPRL untuk saluran pemasukan air laut dan fasilitas terminal khusus, sehingga tim kembali menegaskan untuk segera melakukan pengurusan perizinan KKPRL. Terdapat 4 (empat) mesin pembangkit dan menggunakan 8 unit mesin pompa kapasitas 11520 m ³ /Jam. Estimasi kebutuhan air laut sebanyak 4.000.000 m ³ /hari, mesin pompa beroperasi 24 jam. Sistem pemanfaatan menggunakan sistem sirkulasi, air laut mengalir melalui pipa untuk mendinginkan peralatan dan backup boiler, air kemudian dilakukan treatment sebelum dibuang ke laut.						
PT Primanusa Alya Bahari	perusahaan ini belum memiliki persetujuan KKPRL untuk area pipa pemasukan air laut. Pipa pemasukan air laut diameter 10 inci dan Panjang 300 meter berjumlah 4 buah. Terdapat 3 unit mesin pompa berkapasitas 900 rpm. Terdapat 8 kolam budidaya dan 2 kolam tandon, masing-masing berukuran 5.041meter persegi. Kegiatan budidaya dilakukan sebanyak 2 siklus dalam setahun, estimasi kebutuhan air laut dalam 1 siklus sebanyak 80.000 m ³ /siklus dengan penambahan air sebesar 0,02 % / hari						
PT Sumber Laut Mitra	perusahaan ini belum memiliki persetujuan KKPRL untuk area pipa pemasukan air laut. Pipa pemasukan air laut diameter 8 inci berjumlah 1 buah dan 1 unit mesin pompa berkapasitas 120 kubik/jam. Terdapat 3 kolam budidaya ukuran (2x120 m ² dan 1x140 m ²) dan 1 kolam tandon (1x400 m ²). Kegiatan budidaya dilakukan sebanyak 3 siklus dalam setahun, estimasi kebutuhan air laut dalam 1 siklus sebanyak 1.770 m ³ /siklus dengan penambahan air sebesar 13% / 2 hari pada kolam budidaya						

Araya Crustacea	2	8	8	-	-	54000 m3 / siklus 2000 m3 / hari	2
Tambak Intensif Mallasoro	tidak diperoleh data karena pihak perusahaan tidak merespon kunjungan tim BPSPL Makassar. Perusahaan ini belum memiliki persetujuan KKPR untuk area pipa pemasukan air laut						
PT Crustacea Indo Farm	masih dalam tahap instalasi dan tim tidak dapat bertemu tim teknis perusahaan dilokasi budidaya, diupayakan komunikasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Perusahaan ini belum memiliki persetujuan KKPR untuk area pipa pemasukan air laut						

G. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung IKU ini adalah sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Tabel 27. Realisasi Anggaran IKU 7

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	ALSE	150.000.000	100,330,224	66.89
JUMLAH		150.000.000	100,330,224	66.89

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada triwulan IV adalah melanjutkan identifikasi pemanfaatan air laut selain energi di Sulawesi Selatan.

3.1.11 IKU11 Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kawasan)

Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang adalah Kawasan pesisir dan pulau – pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL) yang terdiri dari sosialisasi BCL dan Gerakan bersih pantai dan laut. Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil merujuk pada satuan wilayah Kabupaten/Kota dan rencana pelaksanaan kegiatan BCL di BPSPL Makassar akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 28. Capaian Realisasi IKU 7

SS – 10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran							
IKU – 11	Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (kawasan)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 – 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					4	-		

Target IKU ini adalah target tahunan sehingga belum ada capaian sampai dengan Triwulan III 2024.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan

beberapa tahun terakhir karena pada Triwulan III sama-sama belum terdapat capaian dan IKU ini adalah Indikator Kinerja yang baru terdapat di Tahun 2024 karena pada tahun lalu IKU ini dihapus karena anggarannya diblokir seluruhnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Belum terdapat realisasi kinerja pada triwulan III untuk dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi yang terdapat di renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor penyebab keberhasilan dari pemenuhan Indikator Kinerja ini adalah koordinasi yang optimal dengan penyuluh, perangkat desa serta kelompok Masyarakat nelayan yang menjadi target lokasi kegiatan BCL.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemilihan lokasi kegiatan Bulan Cinta Laut di setiap provinsi adalah di dalam kota kantor masing-masing UPT yaitu Kota Makassar, Kota Kendari, Kota Gorontalo, dan Kota Manado. Dengan lokasi yang sama tersebut, memungkinkan adanya pelaksanaan monitoring pengumpulan sampah di masing-masing lokasi dengan lebih intensif menggunakan anggaran yang lebih efisien karena pemberian uang harian adalah uang harian lokal.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja



Kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah pelaksanaan Bulan Cinta Laut berupa kegiatan bersih pantai di Wilayah Kerja BPSPL Makassar. Sampai dengan Triwulan II, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan Gerakan Cinta Laut di empat Lokasi yaitu:

1. Sosialisasi pada tanggal 30 April di Kota Kendari dan 2 Mei di Kota Makassar, Gorontalo, dan Manado.
2. Bimtek ke-1 pada tanggal 14 Mei di Kota Kendari dan 16 Mei di Kota Makassar, Gorontalo, dan Manado.
3. Bimtek ke-2 pada tanggal 27 Mei di Kota Kendari, Makassar, Gorontalo, dan Manado
4. Bimtek ke-3 pada tanggal 13 Juni di Kota Kendari, Gorontalo, dan Manado serta tanggal 20 Juni di Kota Makassar



Selain kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, terdapat juga kegiatan rutin seperti penimbangan dan monitoring sampah untuk mengklasifikasikan jenis sampah berdasarkan masing-masing tipikalnya. Berikut adalah rekapitulasi hasil pelaksanaan Bulan Cinta Laut:

Lokasi	Sampah Terkumpul	Sampah bernilai ekonomis (Kg)	Nilai Sampah bernilai ekonomis (Kg)	Keterlibatan Masyarakat
Kota Makassar, Sulawesi Selatan	26070.7	1094	2.048.000	85
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	17174.43	4734.1	5.162.350	86
Kota Manado, Sulawesi Utara	9246.31	781	402.955	80
Kota Gorontalo, Gorontalo	917.5	638.5	878.875	69
TOTAL	53408.94	7247.6	8.499.180	320

G. Realisasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung IKU ini adalah sebesar **Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)**. Sampai dengan Triwulan II sudah terdapat realisasi sebesar **65.58%**. Berikut adalah realisasi anggaran sampai dengan TW II:

Tabel 29. Realisasi Anggaran IKU 7

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci	800.000.000	739,908,241	92.49
JUMLAH		800.000.000	739,908,241	92.49

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada triwulan IV adalah penyusunan laporan tahunan.

3.1.12 IKM12 Nilai Indikator Pelaksana Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

Reformulasi IKPA 2022 merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Perubahan tersebut sebagai berikut:

1. Tujuan reformulasi IKPA:
 - a. Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.
 - b. Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
 - c. Penetapan kewajaran perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker.
2. Perubahan aspek dan indikator kinerja:
 - a. 3 Aspek:
 - 1) Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
 - 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
 - 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
 - b. 8 Indikator Kinerja:
 - 1) Revisi DIPA (10%)
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA (10%)
 - 3) Data Kontrak (10%)
 - 4) Penyelesaian Tagihan (10%)
 - 5) Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - 6) Dispensasi SPM (5%)
 - 7) Penyerapan Anggaran (20%)
 - 8) Capaian Output (25%).

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Reformulasi IKPA 2022
1	Revisi DIPA	Revisi pagu tetap yang diperhitungkan 14 jenis kode revisi
2	Deviasi Hal III DIPA	<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan deviasi per jenis belanja • Ambang batas deviasi 5% untuk nilai maksimum. • Batas maksimum deviasi per jenis belanja
3	Data Kontrak	Berdasarkan komponen: (1) ketepatan waktu; (2) Kontrak dini (pra DIPA efektif); dan (3) akselerasi kontrak 53.
4	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan komponen: (1) ketepatan waktu; (2) persentase nominal GUP; (3) setoran TUP
5	Dispensasi SPM	Berdasarkan kategori rasio dispensasi SPM yang terbit pada Triwulan IV
6	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap target penyerapan triwulanan per jenis belanja
7	Penyelesaian Tagihan	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual
8	Capaian Output	Berdasarkan komponen: (1) ketepatan waktu; dan (2) Capaian RO

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 30. Capaian Realisasi IKU 12

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar						
IKM – 12		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)						
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 – 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					93.76	-	90	-

IKM ini adalah indikator kinerja yang pengukurannya semesteran, sehingga pada TW III tidak terdapat realisasi dan capaian yang dibandingkan terhadap target tahunan

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja serta capaian kinerja belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena indikator kinerja ini pengukurannya bersifat semesteran sehingga hanya terdapat capaian di Semester I dan akhir tahun.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian IKM12 Triwulan III ini belum bisa apabila dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi yang ada di dalam renstra karena target yang terdapat di jangka menengah adalah target tahunan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Penyebab keberhasilan pencapaian IKPA adalah koordinasi yang baik antara bagian program perencanaan, keuangan, dan penanggung jawab kegiatan. Sedangkan penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian IKPA adalah adanya penambahan anggaran di pertengahan tahun yang dapat menyebabkan indikator realisasi anggaran dan deviasi halaman 3 tidak maksimal.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah dengan cara penunjukan pegawai yang bertanggungjawab dalam penginputan SPM, Oprator SAKTI dan bendahara pengeluaran, serta penginputan capaian output yang tepat waktu. Serta selalu mengingatkan agar mengurangi kesalahan dan keterlambatan dalam pengajuan SPM maupun menyampaikan laporan. Untuk pencapaian indikator kinerja ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Nilai IKPA BPSPL Makassar diantaranya:

1. Menunjuk penanggung jawab kegiatan yang uraian tugasnya termasuk mengawasi capaian kinerja dan anggaran sehingga terdapat mekanisme pengawasan secara berjenjang.

2. Mengelola/menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan.
3. Mendorong tim pelaksana agar tidak menunda pelaporan pertanggungjawaban kegiatan sehingga tidak menghambat tim keuangan dalam penyampaian dokumen pendukung.
4. Mengurangi bahkan menghilangkan kesalahan input SPM.
5. Menginput realisasi capaian output tiap bulan secara tepat waktu.

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk kinerja Nilai IKPA BPSPL Makassar ini sehingga dapat dikatakan **0 Rupiah**.

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk pada Triwulan IV 2024 antara lain melaksanakan input realisasi capaian output setiap bulan dan melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan atau prognosa.

3.1.13 IKM13 Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Indikator perhitungan NKA adalah Capaian Keluaran Kegiatan, Efisiensi, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, dan Penyerapan Anggaran. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja ini yaitu nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan Satuan Kerja Setditjen PRL kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id)

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 31. Capaian Realisasi IKM 13

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar							
IKM – 12		Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 – 2024		
	TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
						86	-	89	-

Capain IKM ini belum bisa dibandingkan dengan target maupun capaian pada triwulan III 2024. Hal ini karena Nilai Kinerja Anggaran target yang diukur adalah target tahunan sehingga capaian baru bisa dibandingkan pada akhir tahun 2024.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena pada Triwulan III sama-sama belum terdapat capaian.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Belum terdapat realisasi kinerja pada triwulan III untuk dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi yang terdapat di renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Penyebab keberhasilan pencapaian NKA adalah koordinasi yang baik antara bagian program perencanaan, keuangan, dan penanggung jawab kegiatan. Sedangkan penyebab kegagalan atau penurunan pencapaian IKPA adalah adanya penambahan anggaran di pertengahan tahun yang dapat menyebabkan indikator realisasi anggaran dan deviasi halaman 3 tidak maksimal.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya dalam efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai indikator kinerja ini adalah dengan menunjuk 1 orang operator untuk menginput capaian output pada aplikasi Smart DJA. Untuk pencapaian indikator kinerja ini tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan sehingga dapat **dikatakan 0 Rupiah**.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKM8 meliputi:

1. Merencanakan kegiatan yang matang sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu
2. Berusaha merealisasikan anggaran sesuai dengan rencana yang sudah disusun
3. Pengisian Capaian Output pada aplikasi SAKTI setiap bulan

Sedangkan faktor yang menyebabkan kegagalan pada indikator kinerja ini adalah keterlambatan dan ketidak tepatan dalam pengisian capaian output

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung Nilai Kinerja Anggaran ini sehingga dapat dikatakan **0 Rupiah**.

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung capaian IKM 13 di TW IV 2024 adalah melaksanakan penyerapan anggaran yang efisien dan konsisten terhadap perencanaan serta melaksanakan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI dengan tepat waktu.

3.1.14 IKM14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju WBK. Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP.

Keterangan Ukuran:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 2,50;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14.

5. Target Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup KKP Tahun 2024 adalah 75. Jika pada tahun anggaran tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian menggunakan capaian tahun sebelumnya.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 32. Capaian Realisasi IKM 14

SS - 11		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar						
IKM - 14		Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Nilai)						
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					75	-	78	-

Capain IKM ini belum bisa dibandingkan dengan target maupun capaian pada triwulan III 2024. Hal ini karena Nilai unit kerja menuju WBK adalah target tahunan sehingga capaian baru bisa dibandingkan pada akhir tahun 2024.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena pada Triwulan III sama-sama belum terdapat capaian.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Belum terdapat realisasi kinerja pada triwulan III untuk dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi yang terdapat di renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini salah satunya adalah karena adanya komitmen pimpinan yang selalu mengingatkan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan juga keterlibatan semua pegawai BPSPL Makassar.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian Indikator Kinerja ini adalah pelaksanaan yang melibatkan seluruh pegawai termasuk yang ada di wilker cukup berkoordinasi melalui online sehingga tidak membutuhkan realisasi anggaran yang signifikan.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah pengumpulan dokumen dan pelaksanaan kegiatan tiap pokja sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Kegiatan pemenuhan dokumen yang melibatkan seluruh pegawai akan membuat implementasi nilai WBK menjadi menyeluruh. Hal tersebut dapat meningkatkan capaian nilai untuk IKU ini apabila dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal maupun Menpan RB.

G. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian IKM14 pada Tahun 2024 adalah Rp. 75.400.000.

Tabel 33. Realisasi Anggaran IKM 11

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup KKP	75.400.000	53,519,300	70.98
JUMLAH		75.400.000	53,519,300	70.98

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV 2024 adalah pemenuhan dokumen pendukung WBK untuk persiapan pemantauan dan evaluasi.

3.1.15 IKM15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi;
 - b. Kompetensi;
 - c. Kinerja; dan
 - d. Disiplin.
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi*)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	0

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91-keatas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

5. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Keterangan Nilai SKP	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun

- terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
 - Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.
- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:
 - Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
 - Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
 - Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
 - Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).
 - Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPL\text{ev } 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPL\text{ev } 1 = IPASN \text{ Pejabat Lev 1} + \text{Rerata Nilai IPL\text{ev } 2}$$

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat Profesional / Sangat Tinggi
81-90	Cenderung Profesional / Tinggi
71-80	Rentan Tidak Profesional / Sedang
61-70	Cenderung Tidak Profesional / Rendah
≤60	Sangat Tidak Profesional / Sangat Rendah

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 34. Capaian Realisasi IKM 15

SS - 11		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar							
IKM - 15		Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024		
	TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
						88	-	76	-

IP ASN adalah indikator kinerja yang diukur secara semesteran, sehingga pada TW III tidak terdapat capaian atau realisasi yang diukur dan dibandingkan dengan target.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa terakhir akan dibandingkan pada capaian akhir tahun.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan jangka menengah yang ada di renstra akan dibandingkan di akhir tahun karena target yang ada di renstra adalah target tahunan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan dalam peningkatan kompetensi SDM BPSPL Makassar pada Tahun 2024 dimana ada beberapa workshop yang diikuti oleh staf BPSPL Makassar dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya:

1. Keterbukaan informasi mengenai peluang untuk mengikuti pelatihan bagi seluruh BPSPL Makassar
2. Peran pimpinan yang selalu mendorong agar semua pegawai mengikuti semua peluang peningkatan kompetensi bagi yang memenuhi kriteria

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya terutama sumberdaya anggaran yang sangat minim dalam peningkatan kompetensi salah satunya karena banyak Pelatihan, Bimtek maupun seminar yang dilakukan secara online, sehingga sangat memudahkan bagi pegawai untuk mengikuti kegiatan tersebut tanpa harus menggunakan anggaran kantor atau 0 rupiah.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKM10 pada Tahun 2024 diantaranya adalah dengan mengikutsertakan pegawai BPSPL Makassar dalam berbagai Pelatihan, Bimtek maupun Workshop diantaranya yang diselenggarakan oleh BPSPL Makassar maupun pihak lain.

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung Indeks Profesionalitas ASN ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKM15 pada Triwulan IV 2024 adalah monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja Pegawai BPSPL Makassar dan menginstruksikan agar pegawai yang belum mengunggah sertifikat dan bukti kepelatihannya agar segera diunggah ke myasn.

3.1.16 IKM16 Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)

Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%),

4. Evaluasi kinerja (25%)

Teknik menghitung pemenuhan IKM ini adalah sebagai berikut Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 35. Capaian Realisasi IKM 16

SS - 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar							
IKM - 16	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					81	-		

Capain IKM ini belum bisa dibandingkan dengan target maupun capaian pada triwulan III 2024. Hal ini karena PM SAKIP adalah target tahunan sehingga capaian baru bisa dibandingkan pada akhir tahun 2024.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKM ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena pada Triwulan III sama-sama belum terdapat capaian.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Belum terdapat realisasi kinerja pada triwulan III untuk dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi yang terdapat di renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor yang menyebabkan keberhasilan IKM ini adalah kompetensi tim pengelola kinerja yang baik, adanya pengawasan dan kontrol yang berlapis baik dari anggota tim kinerja yang lain maupun pimpinan, dan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan memenuhi target.

Sedangkan faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam capaian IKM ini adalah kurangnya pengawasan baik dari anggota tim yang lain maupun pimpinan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum ada efisiensi penggunaan sumber daya sampai dengan triwulan II terkait pencapaian indikator kinerja ini.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKM ini diantaranya :

1. Penunjukan Tim Pengelolaan Kinerja BPSPL Makassar
2. Membuat mekanisme pengumpulan pelaporan kinerja
3. Melakukan rapat monev kinerja setiap bulan
4. Aplikasi kontrol atau pengawasan yang bertingkat dari level sesama anggota tim kinerja sampai dengan level pimpinan



Evaluasi penilaian AKIP di lingkup DJ PRL telah dilakukan pada Bulan Juni. Penilaian ini dilakukan secara mandiri oleh Tim Money Sesditjen dan didampingi oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan KKP. Namun belum terdapat hasil penilaian AKIP dan saat ini masih menunggu perbaikan atau pemenuhan dokumen rekomendasi hasil penilaian. Setelah dilakukan evaluasi dilakukan juga pleno untuk penetapan evaluasi hasil penilaian yang telah dilakukan. Penilaian sementara AKIP BPSPL Makassar adalah 81.75 dengan predikat baik. Sampai dengan triwulan III telah dilaksanakan Pleno Penilaian Mandiri SAKIP DJPKRL. Berdasarkan hasil pleno, nilai PM SAKIP BPSPL Makassar meningkat menjadi 88.3 peningkatan ini karena terdapat perbaikan berupa pemenuhan dokumen perencanaan kinerja dalam lima tahun terakhir dan inovasi dashboard kinerja dan keuangan yaitu Mantap Puang.

G. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk realisasi IKM ini adalah Rp. 28.000.000,- Berikut adalah realisasi anggaran pada IKM ini sampai dengan TW III.

Tabel 36. Realisasi Anggaran IKM 16

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Penyusunan dan Pelaksanaan SAKIP dan LAKIP	28,000,000	26,231,346	93.68
JUMLAH		28,000,000	26,231,346	93.68

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKM16 pada Triwulan IV tahun 2024 adalah pemenuhan dokumen kinerja yang rutin dilakukan seperti evaluasi rencana aksi, pengukuran kinerja, dan penyusunan laporan kinerja.

3.1.17 IKM17 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL. Teknik menghitung IKM17 ini adalah dengan menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 37. Capaian Realisasi IKM 17

SS – 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar							
IKM – 17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Makassar (Nilai)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 – 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
3	3	3	100	0	4	75		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa IKM17 memiliki target satu laporan di Tahun triwulan III 2024. Target IKM ini adalah target triwulanan sehingga pada akhir tahun total capaian adalah empat dokumen.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja IKM17 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sama dimana realisasinya adalah empat dokumen pada akhir tahun 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Laporan SPIP adalah IKM dengan target triwulanan dengan realisasi satu laporan setiap triwulan. Namun IKM ini adalah indikator yang baru saja ada di Tahun 2022 sehingga belum tertuang di target jangka menengah yang terdapat dalam renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Penyebab keberhasilan IKM17 adalah koordinasi yang baik dari semua komponen yang terlibat dan komitmen dari anggota tim SPIP yang sudah ditetapkan untuk menyelesaikan laporan sesuai waktu yang sudah ditetapkan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya dalam efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai indikator kinerja ini adalah dengan komitmen dan kerja sama yang baik dari tim SPIP yang sudah ditetapkan. Tidak ada efisiensi sumber daya anggaran karena tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung IK ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian IKM17 adalah dengan melaporkan setiap progress dan capaian kegiatan serta mengidentifikasi resiko dari masing-masing kegiatan tersebut.

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung Laporan SPIP yang disusun ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung IKM ini pada Triwulan IV 2024 adalah penyusunan laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024

3.1.18 IKM18 Presentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan penerapan Manajemen Pengetahuan lingkup BPSPL Makassar dilakukan atas (i) tingkat sharing dokumen mandatory; (ii) tingkat keikutsertakan pejabat dan staf serta (iii) tingkat keaktifan dalam SI-MP. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan DJPRL ini, diantaranya:

- a. Dokumen (Bobot 20%): Perjanjian Kinerja Tahun 2022; Manual IKU Tahun 2022; Rencana Aksi Kinerja atas PK Tahunan Tahun 2022; dan Laporan Kinerja.
- b. Keikutsertaan (Bobot 10%): Persentase Pejabat Eselon II, Fungsional Tertentu yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator dan Staf Pelaksana (minimal 2 orang); yang tergabung dalam aplikasi Bitrix)
- c. Keaktifan (bobot 70%): (upload dokumentasi kegiatan informasi dilengkapi dengan foto atau video atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh di publikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5 W 1 H, Karya tulis hasil penelitian penyaduran jurnal ataupun video atau campaign terkait K/L)

Cara Mengukur:

- a. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (bitrix).
- b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian:
 - Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan.
 - Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.
- c. Pembobotan yang dimaksud antara lain:
 - Konten dokumentasi kegiatan rapat /seminar/ diseminasi dengan memenuhi unsur 5 W 1 H mendapatkan poin 0,5
 - Konten berupa karya tulis, jurnal atau penelitian sesuai dengan tugas fungsi jabatan dengan poin 1
 - Konten video/campaign diharapkan bersifat edukasi atau ajakan dengan poin 3
- d. Capaian dihitung dengan rumus:
 - Pemenuhan Dokumen
$$\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Diupload}}{\text{Jumlah Target Dokumen}} \times 20\%$$
 - Keikutsertaan
$$\frac{\text{Jumlah Pejabat yang ikutserta/bergabung}}{\text{Jumlah Target Pejabat yang ikutserta/bergabung}} \times 10\%$$
 - Keikutsertaan
$$\frac{\text{Jumlah Pejabat yang Aktif}}{\text{Jumlah Target Pejabat yang Aktif}} \times 70\%$$
- e. Total Nilai Capaian MP: Nilai pemenuhan dokumen + Nilai Keikutsertaan + Nilai Keaktifan

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 38. Capaian Realisasi IKM 15

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar						
IKM – 18		Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Nilai)						
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 – 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
108.69	94	133.3	141.81 120 (kinerjaku)	36.19	94	141.8	90	148.1

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa realisasi pada triwulan III tahun 2024 adalah 133.3 atau dengan %capaian senilai 141.8% atau capaian maksimal kinerjaku 120%, capaian ini meningkat dari periode sebelumnya sebesar 33.11%, kenaikan ini karena terdapat perubahan target di level 1 yang sebelumnya target empat unggahan menjadi tiga unggahan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian IKM18 selalu mencapai nilai 100 pada setiap periodenya dan pada periode ini mencapai 141.8%. Adapun perbedaan presentase capaian karena terdapat perubahan target dengan periode sebelumnya. Hal ini mengakibatkan realisasi dan % capaian pada periode saat ini meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi target IKM18 sudah mencapai 133.3, capaian ini apabila dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi sudah mencapai 148% dari target 90.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Adanya komitmen dari pimpinan untuk mengunggah aktivitas di Bitrix24 secara tepat waktu setiap bulan adalah penyebab keberhasilan tercapainya IKM ini. Komitmen ini dibuktikan dengan selalu terpenuhinya nilai maksimal 100 pada setiap periodenya.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi sumber daya yang dilakukan karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

F. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian IK18 ini adalah mengunggah kegiatan atau konten di aplikasi Bitrix24 secara berkala.

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung system pengetahuan yang terstandar ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan IV 2024 adalah mengunggah kegiatan pada *collaboration office* oleh Kepala Balai BPSPL Makassar

3.1.19 IKM19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS).

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti BPSPL Makassar}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BPSPL Makassar}} \times 100$$

Keterangan:

1. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun rekomendasi tidak masuk dalam sidak maka tindak lanjut rekomendasi **dihitung secara manual oleh Setditjen PRL**
2. Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.
3. Jika ada Audit/Reviu/evaluasi /pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan **capaian 100 sehingga capaian pada kinerjaku 120%**.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 39. Capaian Realisasi IKM 19

SS - 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar							
IKM - 19	Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
100	80	100	125 100 (kinerjaku)	0	80	120	80	120

Dari tabel di atas dilihat bahwa capaian indikator IKM19 pada TW III Tahun 2024 adalah 120% dengan realisasi 100 dari target 80. Capaian ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sama dengan capaian maksimal atau nilai 100.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Capaian TW III Tahun 2024 sama dengan capaian tahun lalu yang mencapai 100

atau 120% dari target di Perjanjian Kinerja.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian TW III Tahun 2024 sebesar 100 sudah melebihi target Tahun 2024. Capaian tersebut 120% dari target jangka menengah organisasi yang terdapat dalam renstra dengan target 80.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan dalam pencapaian target kegiatan yang mendukung IKM19 dikarenakan arahan pimpinan yang jelas tentang penyelesaian rekomendasi Itjen dan juga kerjasama dan koordinasi di semua staf yang bertanggungjawab dalam penyelesaian rekomendasi tersebut.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam penyelesaian rekomendasi itjen tersebut tidak menggunakan anggaran sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan dalam pencapaian progress IKM19 pada triwulan III Tahun 2024 adalah dengan pemenuhan tindak lanjut di aplikasi SIDAK. Terdapat dua rekomendasi di aplikasi SIDAK yang telah dipenuhi pada triwulan II. Rekomendasi ini didapat dari pelaksanaan audit pelayanan publik oleh Inspektorat Jenderal I. Keberhasilan pencapaian IKM ini adalah hasil dari koordinasi yang baik antara tim teknis yaitu pelayanan publik dan admin aplikasi SIDAK dengan arahan pimpinan.

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus untuk kinerja (Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan) ini

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKM19 pada Triwulan IV tahun 2024 adalah pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan audit kinerja dari inspektorat jenderal.

3.1.20 IKM20 Presentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Makassar yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Makassar Tahun 2023.

Teknik Menghitung:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Makassar yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Makassar}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjaku adalah 100.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 40. Capaian Realisasi IKM 20

SS – 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar								
IKM – 20	Presentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Makassar (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 – 2024		
	TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
						100	-	100	-

Capain IKM ini belum bisa dibandingkan dengan target maupun capaian pada triwulan III 2024. Hal ini karena Presentase Temuan adalah target tahunan sehingga capaian baru bisa dibandingkan pada akhir tahun 2024.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena pada Triwulan III sama-sama belum terdapat capaian.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Belum terdapat realisasi kinerja pada triwulan III untuk dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi yang terdapat di renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Kesigapan BPSPL Makassar dalam menyelesaikan temuan dari BPK adalah penyebab keberhasilan kenapa IK ini dapat terpenuhi targetnya.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tidak ada efisiensi penggunaan sumber daya karena tidak ada anggaran khusus untuk pencapaian indikator kinerja ini atau 0 Rupiah.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Beberapa hal yang dilakukan untuk menunjang pencapaian I206 dapat meliputi:

1. Untuk meminimalisir temuan BPK terhadap laporan keuangan BPSPL Makassar maka sebelum pelaksanaan kegiatan terlebih dahulu dibuat dokumen manajemen resiko.
2. Membuat mekanisme (SOP) pengajuan UP/GUP dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan.

G. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan untuk mendukung Presentase Penyelesaian Temuan LHK BPSPL Makassar ini sehingga dapat dikatakan 0 Rupiah.

I. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Tidak ada kegiatan khusus yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKM20 pada Triwulan IV 2024, karena IKM ini termasuk bersifat isidentil yang tidak bisa direncanakan atau ditetapkan periodenya karena menunggu saat ada audit dari BPK.

3.1.21 IKM21 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah adalah suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/ strategis antara lain:

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- f. pertimbangan lainnya.

Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti evaluasi yang telah diperoleh.
4. *Penilaian* efektivitas

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan focus pengukuran pemanfaatannya. Jenis bantuan yang akan dinilai tingkat efektivitasnya adalah Bantuan KOMPAK.

Teknik menghitung capaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target

IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah

AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan hasil penilaian Inspektorat Jenderal (sesuai dengan jenis kegiatannya) dan/atau Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 41. Capaian Realisasi IKM 21

SS - 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar							
IKM - 21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Makassar (%)							
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					80	-	80	-

Capain IKM ini belum bisa dibandingkan dengan target maupun capaian pada triwulan III 2024. Hal ini karena Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah adalah target tahunan sehingga capaian baru bisa dibandingkan pada akhir tahun 2024.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKU ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena pada Triwulan III sama-sama belum terdapat capaian.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Belum terdapat realisasi kinerja pada triwulan III untuk dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi yang terdapat di renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor keberhasilan IKM ini didukung oleh komunikasi yang baik antara BPSPL Makassar dan kelompok penerima bantuan kompak. Sehingga dengan komunikasi yang baik ini penyampaian laporan menjadi lebih lancar dan pemanfaatan bantuan bisa lebih optimal karena kelompok dapat dibimbing apabila tidak mengerti penggunaan barang bantuan yang telah disalurkan.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efiseinsi penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggabungkan kegiatan ini dengan pelaksanaan Monev Kompak sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk menunjang IKM ini adalah 0 rupiah karena anggaran sudah terdapat di kegiatan Monev bantuan Kompak.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKM ini adalah dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan KOMPAK untuk kelompok yang menerima bantuan tahun 2023. Kelompok yang menerima bantuan KOMPAK pada tahun 2023 adalah Kelompok Laut Biru di Kabupaten Palopo, Kelompok Lawarani di

Kabupaten Polewali Mandar, dan Kelompok Orca di Gorontalo. Ketiga kelompok di atas sudah dilakukan Monev di triwulan I tahun 2024 dan akan Kembali dievaluasi pada triwulan III atau IV.

G. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian IKM21 pada Tahun 2024 adalah Rp. 29.460.000. sampai dengan triwulan III, realisasi anggaran sudah mencapai 56.6%.

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Evaluasi efektifitas bantuan pemerintah	29,460,000	16,675,760	56.6
JUMLAH		29,460,000	16,675,760	56.6

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV 2024 adalah berkoordinasi dengan kelompok masyarakat penerima bantuan Kompak terkait perkembangan kondisi dan pemanfaatan barang bantuan KOMPAK.

3.1.22 IKM22 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup Bpspl Makassar (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.

Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Makassar merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip

- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 - 100
A	Memuaskan	>80 - 90
BB	Sangat Baik	>70 - 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 42. Capaian Realisasi IKM 22

SS - 11								
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPSPL Makassar								
IKM - 22								
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BPSPL Makassar (%)								
Realisasi 2023	Tahun 2024				Tahun 2024		Renstra 2020 - 2024	
TW III	Target TW III	Realisasi TW III	%	Kenaikan Thdp TW III 2023 %	Target PK 2024	% Realisasi Thdp PK	Target 2024	% Capaian thdp Renstra
					65	-		

Capain IKM ini belum bisa dibandingkan dengan target maupun capaian pada triwulan III 2024. Hal ini karena Nilai Pengawasan Arsip adalah target tahunan sehingga capaian baru bisa dibandingkan pada akhir tahun 2024

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi IKM ini belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir karena pada Triwulan III sama-sama belum terdapat capaian.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Belum terdapat realisasi kinerja pada triwulan III untuk dibandingkan dengan target jangka menengah organisasi yang terdapat di renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor keberhasilan IKM ini didukung oleh personil yang bersedia dan bertanggung jawab mengerjakan kearsipan. Sedangkan penurunan kinerja atau faktor yang menyebabkan capaian kinerja ini tidak optimal adalah tidak adanya jabatan arsiparis di BPSPL Makassar. Ketiadaan jabatan arsiparis menyebabkan kurangnya nilai pengawasan kearsipan karena berpengaruh langsung berdasarkan juknis atau LKR penilaian arsip.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Belum ada efisiensi penggunaan sumber daya sampai dengan triwulan II terkait pencapaian indikator kinerja ini.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja



Sampai dengan triwulan III telah dilakukan pengawasan internal di lingkup KKP. Berdasarkan hasil pengawasan internal nilai yang didapatkan oleh BPSPL Makassar adalah 80.54 dan termasuk kategori memuaskan. Untuk meningkatkan nilai ini dibutuhkan adanya pranata kearsipan yang bertugas untuk mengelola arsip, karena tidak adanya pengelola arsip ini yang menyebabkan nilai pengawasan arsip menjadi kurang optimal. Terdapat juga bimbingan teknis yang diberikan kepada pengelola arsip.

G. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian IKM22 pada Tahun 2024 adalah Rp. 26.840.000. Sampai dengan triwulan III, realisasi anggaran sudah mencapai 57.72% seperti pada tabel di bawah ini:

No	Komponen/Sub Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	26,840,000	15,492,714	57.72
JUMLAH		26,840,000	15,492,714	57.72

H. Rencana Aksi Triwulan IV 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV 2024 adalah pelaksanaan penilaian pengawasan kearsipan oleh ANRI.

3.2 Perbandingan Capaian Dengan Unit Kerja Lain (UPT PSPL Lingkup DJPRL)

Indikator kinerja diantara UPT PSPL hampir sama satu sama lain. Untuk detail perbandingan indikator kinerja beserta target dan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di lingkup DJPRL pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 43. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPSPL Makassar dengan UPT PSPL di Lingkup DJPRL

Indikator Kinerja		BPSPL MAKASSAR	BPSPL PONTIANAK	BPSPL PADANG	BPSPL DENPASAR	LPSPL SERANG	LPSPL SORONG
1	Nilai PNBP (Rp.000)	Target	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0
2	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja (Orang)	Target	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0
3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja (Dokumen)	Target	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0
4	Persentase Peningkatan nilai Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak	Target		0			
		Capaian		0			
		%		0			
4	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan	Target	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0

	Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja (Daerah)							
5	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja (Kesepakatan)	Target	0	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0
	Kemitraan Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	Target		0				
		Capaian		0				
		%		0				
6	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja (Kelompok)	Target	2	2	2	3	2	2
		Capaian	3	2	2	3	2	2
		%	120	100	120	100	100	100
7	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	Target	0	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0
8	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja (Jenis)	Target	0	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0

9	Jenis Keaneekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja (Jenis)	Target	0	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0
10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja (Dokumen)	Target	0	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0
11	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar	Target	0	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0
12	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup (Nilai)	Target	0	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0
13	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup (Nilai)	Target	0	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja (Nilai)	Target	0	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0
15	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup (Indeks)	Target	0	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0

16	Nilai PM SAKIP Lingkup (Nilai)	Target	0	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0
17	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup (Dokumen)	Target	3	3	3	3	3	3
		Capaian	3	3	3	3	3	3
		%	100	100	100	100	100	100
18	Persentase Unit Kerja Lingkup yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	Target	94	94	94	94	94	94
		Capaian	133.3	116.67	133.3	133.3	133.3	133.3
		%	120	120	120	120	120	120
19	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	Target	80	80	80	80	80	80
		Capaian	100	100	100	100	100	100
		%	120	120	120	120	120	120
20	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup (%)	Target	0	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup(%)	Target	0	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0
22	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup (nilai)	Target	0	0	0	0	0	0
		Capaian	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Tabel 44. Pagu dan realiasi anggaran per program BPSPL Makassar Tahun 2024

Program	Anggaran Rupiah Murni, PNBP, dan PHLN			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	5,991,220,000	2,261,950,060	37.80	3,726,269,940
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	800,000,000	739,908,241	92.49	60,091,759
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	150,000,000	100,330,224	66.89	49,669,776
Perencanaan Ruang Laut	1,100,000,000	965,067,214	87.73	134,932,786
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	11,994,172,000	9,902,861,660	82.56	1,296,555,200
TOTAL	20,035,392,000	13,970,117,399	69.73	6,065,274,601

Dalam mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU BPSPL Makassar tahun 2024, BPSPL Makassar didukung dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.20.035.392.000,- (Dua Puluh Milyar Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)** yang terdiri dari sumber anggaran Rupiah Murni, PNBP, dan PHLN. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2024 adalah sebesar **Rp.13.970.117.399,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)** atau **69.73%** dari Pagu. Sisa anggaran adalah sebesar **Rp 6.065.274.601,- (Enam Milyar Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Satu Rupiah)**.

Sampai dengan triwulan III 2024 revisi anggaran sudah dilaksanakan beberapa kali baik itu revisi yang bersifat kewenangan KPA yaitu Perihal Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan yang bersifat kewenangan DJA maupun Kanwil yaitu revisi DIPA. Berikut adalah daftar revisi yang telah dilaksanakan di BPSPL Makassar:

Tabel 45. Revisi Anggaran BPSPL Makassar tahun 2023

Tanggal	Keterangan
15 Januari 2024	Revisi DIPA 1 dalam rangka Pembukaan Blokir pada KRO: REB. Konservasi Jenis/Spesies; RO: REB.002.053: Sarana Prasarana Keanekaragaman hayati menjadi KRO : 2362.RAL.Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan RO: 2362.RAL.001Penyediaan Sarana Pendukung Penyelenggaraan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan)

2 Februari 2024	Revisi DIPA 2 dalam rangka Perubahan rencana penarikan dana dalam Halaman III DIPA melalui surat : B.207/BPSPL.3/RC.420/II/2024 perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA sesuai surat Kepala BPSPL Makassar Nomor: SP DIPA-032.07.2.477431/2024
19 Maret 2024	Revisi DIPA 3 dalam Rangka Untuk memenuhi administrasi pembayaran gaji dan tunjangan lainnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan Surat Kepala BPSPL Makassar Nomor : B.449/BPSPL.3/RC.420/III/2024
3 April 2024	Revisi DIPA 4 dalam rangka revisi Halaman III DIPA sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.600/BPSPL.3/RC.420/IV/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431
3 Mei 2024	Revisi DIPA terpusat pada Direktorat Jenderal PKRL dalam rangka penambahan anggaran yang bersumber dari PHLN untruk program program Proyek Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA)
29 Mei 2024	Revisi DIPA 5 Dalam rangka menyelaraskan penyusunan RPD Halaman III DIPA periode triwulan II tahun 2024 dengan formula indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran sesuai Perdirjen Perbendaharaan no PER-5/PB/2024. Revisi anggran sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar nomor: B.994/BPSPL.3/RC.420/V/2024 perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431
20 Juni 2024	Revisi DIPA pembukaan blokir untuk kegiatan sarana prasarana keanekaragaman hayati laut dan pemberdayaan enokonimi masyarakat, sesuai surat Nomor: 132/DJPKRL/RC.420/VI/2024 Perihal usulan revisi anggaran tanggal 13 Juni 2024 dan pengesaran revisi oleh Kementerian Keuangan melalui surat nomor: S-382/AG/AG.3/2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP TA 2024 (Revisi ke-3)
11 Juli 2024	Revisi Dipa 7 dalam rangka revisi Halaman III DIPA sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.1364/BPSPL.3/RC.420/VII/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431
1 Agustus 2024	Revisi Dipa 8 dalam rangka Pemuktahiran Data Petunjuk oprasional Kegiatan (POK) sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.1502/BPSPL.3/RC.420/VIII/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431
7 Agustus 2024	Revisi Dipa 9 dalam rangka DIPA Penambahan Anggran yang bersumber dari Pinjaman dan hibah luar negeri secara terpusat Lingkup DJPKRL sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor: B.188/DJPKRL/RC.420/VIII/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran
11 September	Revisi Dipa 10 dalam rangka Pemuktahiran Data Petunjuk oprasional Kegiatan (POK) sesuai dengan surat kepala BPSPL Makassar Nomor: B.1795/BPSPL.3/RC.420/IX/2024 Perihal Usulan Revisi Anggaran DIPA Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477431



photo by: Audi Sumendap (BPSPL Makassar)

BAB IV

PENUTUP

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja BPSPL Makassar Triwulan III Tahun 2024 adalah kategori **istimewa** dengan nilai kinerja organisasi **117.50%**, sementara capaian realisasi anggaran sampai dengan III Tahun 2024 sebesar **Rp.13.970.117.399-** (**Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah**) atau **69.73%** dari Pagu **Rp.20.035.392.000,-** (**Dua Puluh Milyar Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah**)

Capaian Indikator Kinerja pada triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok) telah mencapai target dengan realisasi tiga kelompok dari target dua kelompok.
2. Laporan SPIP yang disusun di BPSPL Makassar telah mencapai target triwulanan dengan capaian satu laporan dari target satu laporan.
3. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Makassar yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar telah mencapai target dengan nilai 133 dari target 94.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan telah mencapai target dengan capaian 100 dari target 80.

4.2 Rekomendasi

Terdapat rekomendasi untuk mendukung kinerja pada triwulan IV antara lain:

- Perubahan Perjanjian Kinerja karena terdapat penambahan anggaran dari sumber pinjaman luar negeri untuk kegiatan Lautra (Laut Insan Sejahtera);
- Pelaksanaan monitoring atau pengendalian pemanfaatan ruang laut di satu titik;
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk menilai efektivitas bantuan KOMPAK yang disalurkan pada tahun 2023 dan 2024;
- Pelaksanaan survei Monitoring BCF di Kab. Banggai, Sulawesi Tengah;
- Percepatan realisasi anggaran sampai dengan 99% pada akhir triwulan IV

4.3 Tindak Lanjut

Terdapat rekomendasi pada Triwulan II Tahun 2024 yang harus dilakukan tindak lanjut pada Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 46. Tindak lanjut atas rekomendasi TW II Tahun 2024

Rekomendasi TW II Tahun 2024	Tindak Lanjut atas Rekomendasi TW III Tahun 2024
Pelaksanaan monitoring atau pengendalian pemanfaatan ruang laut di sembilan titik	Monitoring telah dilaksanakan sesuai jadwal dengan realisasi delapan titik karena satu titiknya menunggu konfirmasi subjek hukum
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan universitas Samratulangi Manado untuk penyusunan rancangan perjanjian kerja sama	Penyusunan RKT dilaksanakan dan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama pada TW IV
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk menilai efektivitas bantuan KOMPAK yang disalurkan pada tahun 2023	Pelaksanaan Monitoring telah dilaksanakan dan akan dilanjutkan di TW IV dengan tambahan kelompok yang sudah disalurkan bantuan pada tahun 2024
Pelaksanaan survei Bambu Laut di Sulawesi Selatan dan Pelaksanaan survei monitoring Napoleon di Sulawesi Tenggara	Survei Bambu Laut di Sulawesi Selatan dan Survei Monitoring Napoleon di Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan
Pelaksanaan Acara Puncak Bulan Cinta Laut di Kota Makassar	Pelaksanaan acara puncak Bulan Cinta Laut telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024
Percepatan realisasi anggaran minimal sampai dengan 75% pada akhir triwulan III	Realisasi anggaran telah terealisasi sebesar 79.8% apabila dari sumber dana Rupiah Murni dan PNBPN, namun realisasi tersebut terkoreksi menjadi 69.7% karena terdapat tambahan anggaran dari sumber dana PHLN sebesar 2,5 Milyar rupiah



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Permana Yudianto**

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar


Permana Yudianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
MAKASSAR**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Makassar	1.	Nilai PNBP BPSPL Makassar (Rp.000)	500.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Makassar (Orang)	320
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Daerah)	2
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Kelompok)	3
		7.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Makassar yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	6
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar	10.	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Makassar (Dokumen)	1
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Makassar (Kawasan)	4
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Makassar	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	86
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Makassar (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Makassar (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Makassar (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Makassar (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		18. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Makassar yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94
		19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Makassar yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Makassar (%)	100
		21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Makassar (%)	80
		22. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup BPSPL Makassar(nilai)	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	3.465.000.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	800.000.000
4.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	150.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	11.994.172.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Tahun 2024		17.509.712.000

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Makassar


Permana Yudiarso



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B. 5932/DJPKRL.1/HP.470/X/2024 10 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Lingkup Ditjen PKRL” Triwulan III Tahun 2024

Yth. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PKRL

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor: 1705/ITJ.0/TU.140/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 hal Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP dan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Lingkup KKP” Triwulan III Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU Satker UPT Lingkup Direktorat Jenderal PKRL sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Juli 2024 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing UPT Ditjen PKRL sampai dengan 30 September 2024;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan III Tahun 2024 lingkup UPT Ditjen PKRL sebesar 100% yaitu seluruh rekomendasi telah berstatus tuntas;
3. Rincian capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dan sisa temuan yang belum tuntas sebagaimana terlampir;
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh UPT Lingkup Ditjen PKRL.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut,
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dedhy Wibowo Setiawan

Tembusan:

1. Dirjen PKRL
2. Sesditjen PKRL

Lampiran 1 Surat
Nomor : B. 5932/DJPKRL.1/HP.470/X/2024
Tanggal : 10 Oktober 2024

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja UPT Lingkup Ditjen PKRL" Triwulan III Tahun 2024

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut Tuntas		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	BKKPN Kupang	4	4	100	0	0	100
2	BPSPL Makasar	2	2	100	0	0	100
3	BPSPL Padang	10	10	100	0	0	100
4	LPSPL Sorong	7	7	100	0	0	100
5	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
6	LKKPN Pekanbaru	11	11	100	0	0	100
7	BPSPL Denpasar	0	0	0	0	0	100
8	BPSPL Pontianak	13	13	100	0	0	100
Jumlah		47	47	100	0	0	100

a.n. Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut,
Plh.Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dedhy Wibowo Setiawan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

Nomor : B.5909/DJPKRL.1/TU.140/X/2024 9 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024

Yth. Daftar Terlampir

Berkeaan dengan pengukuran capaian kinerja Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghitungan poin berdasarkan *posting* berbagi pengetahuan melalui laman <https://portal.kkp.go.id/> dengan target 3 poin dan nilai maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin per triwulan.
2. Poin berasal dari pilihan kategori dan pembobotan, yaitu:
 - a. dokumentasi kegiatan **rapat/seminar/workshop/diseminasi** yang diunggah dan dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai **bobot poin 0,5**. Dalam hal unggah kegiatan **Apel Pagi** tidak mendapatkan nilai;
 - b. berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 1**; dan/atau
 - c. berbagi informasi berupa video atau *campaign* dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 3**.

Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut dengan penghitungan sesuai rumus:

$$\text{Keaktifan} = \frac{\text{Jumlah poin pejabat yang aktif}}{\text{Jumlah target poin pejabat yang aktif}} \times 100\%$$

3. Hasil pengukuran capaian Nilai Manajemen Pengetahuan Terstandar Triwulan III disajikan sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dedhy Wibowo Setiawan

Tembusan:
Sekretaris DJPKRL

Lampiran 1 Surat
Nomor : B.5909/DJPKRL.1/TU.140/X/2024
Tanggal : 9 Oktober 2024

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar
2. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar
3. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak
4. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang
5. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang
6. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru
7. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang
8. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dedhy Wibowo Setiawan

A. Capaian Presentase Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2024

No	Satker	Target PK	Capaian (%)				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Rata-Rata
1.	BPSPL Padang	94	133.33	133.33	133.33	-	133.33
2.	LKKPN Pekanbaru	94	133.33	133.33	133.33	-	133.33
3.	LPSPL Serang	94	133.33	133.33	133.33	-	133.33
4.	BPSPL Pontianak	94	116.67	116.67	133.33	-	122.22
5.	BPSPL Makassar	94	133.33	133.33	133.33	-	133.33
6.	BPSPL Denpasar	94	133.33	133.33	133.33	-	133.33
7.	BKKPN Kupang	94	133.33	133.33	133.33	-	133.33
8.	LPSPL Sorong	94	133.33	133.33	133.33	-	133.33

B. Daftar Nilai Rinci per Satuan Kerja UPT Lingkup DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan II Tahun 2024

1. BPSPL Padang

BPSPL Padang	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133.33%
Nilai MP	133.33%
Nilai MP TW I	133.33%
Nilai MP TW II	133.33%
Nilai MP TW III	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	133.33%

2. LKKPN Pekanbaru

LKKPN Pekanbaru	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133.33%
Nilai MP	133.33%
Nilai MP TW I	133.33%
Nilai MP TW II	133.33%
Nilai MP TW III	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	133.33%

3. LPSPL Serang

LPSPL Serang	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133.33%
Nilai MP	133.33%
Nilai MP TW I	133.33%
Nilai MP TW II	133.33%
Nilai MP TW III	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	133.33%

4. BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4.0
Skor	133.3%
Nilai MP	133.3%
Nilai MP TW I	116.67%
Nilai MP TW II	116.67%
Nilai MP TW III	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	122.22%

5. BPSPL Makassar

BPSPL Makassar	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133.33%
Nilai MP	133.33%
Nilai MP TW I	133.33%
Nilai MP TW II	133.33%
Nilai MP TW III	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	133.33%

6. BPSPL Denpasar

BPSPL Denpasar	Dokumen	Keaktifan
Target		3
Realisasi		4
Skor		133.33%
Nilai MP		133.33%
Nilai MP TW I		133.33%
Nilai MP TW II		133.33%
Nilai MP TW III		133.33%
Rata-Rata Nilai MP		133.33%

7. BKKPN Kupang

BKKPN Kupang	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133.3%
Nilai MP	133.3%
Nilai MP TW I	133.33%
Nilai MP TW II	133.33%
Nilai MP TW III	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	133.33%

8. LPSPL Sorong

LPSPL Sorong	Keaktifan
Target	3
Realisasi	4
Skor	133.3%
Nilai MP	133.3%
Nilai MP TW I	133.33%
Nilai MP TW II	133.33%
Nilai MP TW III	133.33%
Rata-Rata Nilai MP	133.33%

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dedhy Wibowo Setiawan



SCAN HERE

